

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI  
INI DENGAN BAIK  
SUA TU SAAT ANAK DAN CUCUNYA  
SANGAT MEMBUTURANNYA



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PENELITIAN**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

**PROFIL PEREMPUAN  
SUMATERA BARAT**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BALITBANG)**

*Kerjasama dengan:*

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
PADANG  
2003**

## JUDUL PENELITIAN

## PROFIL PEREMPUAN SUMATERA BARAT

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	31 Des. '03
SUMBER HARGA :	HADIAH
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	416/K/2003 - p1 (2)
KLASIFIKASI :	305.4 Bad - p1

## **DAFTAR ANGGOTA PENELITI**

**DRA. YURNI SUASTI, M.Si**

**DRA FATMARIZA. M, Hum**

**DRS. SURYANEF, M.Si**

**IR. YENIWARTI DALIM, MS**

**DRA. ARMIDA SILVIA, M.Si**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **A. Pendahuluan**

Penelitian ini dilatar belakangi pelh terbatasnya data tentang profil perempuan yang dapat dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat di kabupaten kota, dan nagari. Profil perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah gambaran perempuan dengan berbagai karakteristiknya dalam kapasitasnya sebagai individu, posisi, dan dinamika kehidupannya di dalam keluarga, dan masyarakat yang dianalisis dengan perspektif gender. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menyusun profil penduduk perempuan Sumatera Barat di kabupaten kota versi data sekunder meliputi: (a) komposisi penduduk, (b) kesehatan, (c) angka perceraian, dan (d) tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta profil penduduk perempuan di nagari meliputi: (1) karaktersitik responden, dan anggota rumah tangganya, (2) fertilitas, dan partisipasi perempuan dalam KB, (3) mortalitas, (4) mobilitas nonpermanen, dan (5) kehidupan keagamaan. Temuan tentang profil penduduk perempuan ini akan bermanfaat bagi penyusunan strategi, dan program pemberdayaan perempuan Sumatera Barat.

### **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan kombinasi pendekatan kuantitatif, dan kualitatif berspektif gender. Pengambilan sampel wilayah dilakukan secara bertahap (*multy stage*). *Pertama*, pengambilan sampel kabupaten kota didasarkan atas wilayah administratif, dan pembagian wilayah *Minangkabau*. Berdasarkan pertimbangan tersebut lokasi penelitian ini adalah kota Padang, kabupaten Agam, dan Padang Pariaman.



Tahap *kedua*, pengambilan sampel nagari di kabupaten Agam, berdasarkan pertimbangan (a) geografis daerah, dan (b) Keragaman mata pencaharian penduduknya atau berdasarkan tipe nagari, yang terdiri dari nagari tipe pertanian tradisional yaitu Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, nagari pertanian komersial/perdagangan yaitu Padang Luar Kecamatan Banuhampu Sei Puar, nagari industri kecil yaitu Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Candung, dan nagari tipe nelayan yaitu Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara. Selain itu, penetapan wilayah sampel juga dipertimbangkan ketersediaan dana dari Balitbang. Responden penelitian ini adalah perempuan yang sudah menikah, masing-masing sebanyak 60 orang berdasarkan status dan lapangan pekerjaan dari perempuan itu sendiri.

Teknik dan analisis data penelitian meliputi; pengumpulan dan analisis data sekunder untuk kabupaten kota, dan survai rumah tangga di nagari. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Data hasil survai dan data sekunder disusun ke dalam tabel tunggal dan tabel silang, menggunakan analisis persentase.

Dalam konteks metodologi ini, perlu ditegaskan hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian. Karena lokus penelitian tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Sumatera Barat, maka beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari temuan penelitian tidak bisa digeneralisir ke beberapa daerah yang lain.

### **C. Hasil Penelitian**

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan, penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah perempuan di tiga kabupaten kota daerah penelitian lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Kenyataan ini berangkat dari besaran angka *sex ratio* di kota Padang sebesar 97,2, di Padang Pariaman sebesar 92,

dan di kabupaten Agam 92,1. Meskipun demikian pada umur-umur tertentu juga terdapat jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terutama pada kelompok umur muda.

2. Berdasarkan struktur umur, penduduk di tiga kabupaten kota termasuk ke dalam struktur umur muda, beban ketergantungan yang termasuk besar terdapat di Padang Pariaman, dan kabupaten Agam. Di Padang Pariaman setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 74 orang yang tidak produktif, dan di Agam sebanyak 63 orang. Sementara di Padang tiap 100 orang produktif menanggung beban tidak produktif yang lebih sedikit yaitu sebanyak 51 orang.
3. Lapangan kerja yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di kota Padang adalah sektor jasa. Sedangkan Padang Pariaman dan Agam adalah pertanian. Sementara itu dari data pencari kerja tercatat jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan yang mencari kerja untuk Padang dan Pariaman, kecuali Agam. Demikian juga halnya berdasarkan analisis data di nagari lokasi penelitian, bahwa perempuan menjadi pihak yang turut berkontribusi bagi peningkatan ekonomi keluarga, sehingga mereka menanggung beban kerja ganda.
4. Tindak kejahatan yang terjadi di tiga kabupaten kota, menunjukkan kerentanan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Kuantitas jenis tindak kejahatan terbesar adalah kekerasan/penganiaya, perkosaan serta pencabulan. Hal yang tragis dari sisi ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa anak-anak pun turut sebagai pelaku tindak kejahatan pencabulan.
5. Tingkat pendidikan perempuan di kabupaten kota relatif cukup baik, terutama dilihat dari jumlah perempuan yang memiliki ijazah sudah lebih banyak dibanding perempuan yang tidak memiliki ijazah. Kondisi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berkiprah di sektor publik, tidak hanya domestik seperti paradigma yang berlaku selama ini. Hanya

saja perempuan maupun laki-laki yang berijazah terkonsentrasi pada pendidikan menengah. Selain itu, perempuan putus sekolah, dan yang tidak bisa baca tulis juga lebih besar dari laki-laki. Jumlah terbanyak, dari ketiga kabupaten kota, terdapat di kabupaten Agam. Persoalan yang hampir sama juga terdapat di nagari lokasi penelitian, responden yang tidak tamat Sekolah Dasar ditemukan dalam jumlah yang agak besar, bahkan di nagari pertanian tradisional hampir separoh responden yang ada tidak tamat Sekolah Dasar. Selain itu, di keempat nagari lokasi penelitian juga terdapat anak-anak responden yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, jumlah yang juga cukup besar terdapat di nagari tipe pertanian tradisional, dan nagari tipe nelayan.

6. Kasus perceraian yang terjadi memberi gambaran bahwa proporsi cerai gugat lebih besar daripada cerai talak. Di sini terdapat indikasi bahwa perempuan memiliki "keberanian" dalam menentukan sikap serta menghadapi segala konsekuensi yang timbul dari sikap yang diambilnya itu. Berdasarkan kelompok umur, perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, dominan pada kelompok umur 26-35 tahun. Pada kelompok umur yang lebih muda (16-25) maupun pada kelompok umur tua (55+) juga terjadi perceraian, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Sedangkan pekerjaan perempuan bercerai dominan ibu rumah tangga. Implikasi dari perceraian yang terjadi adalah beban ekonomi perempuan akan semakin berat, karena setelah bercerai biasanya anak ikut ibunya, apalagi bila tanggung jawab seorang ayah terputus terhadap anaknya. Fenomena lain yang terungkap dari kasus cerai ini bahwa, salah satu sebab perempuan mengajukan gugat cerai adalah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dengan alasan pembuktian, dan prosedural yang relatif rumit, dalam proses peradilan argumentasi tersebut tidak dimunculkan.

7. Rata-rata anak yang dimiliki oleh seorang perempuan di tingkat kabupaten kota meningkat seiring dengan peningkatan umur. Artinya paritas yang dimiliki oleh perempuan setelah habis masa reproduksinya termasuk besar, rata-rata 5 orang per perempuan. Namun dalam analisis ini, fertilitas di kabupaten kota dari karakteristik lain tidak dapat dikemukakan, karena pada data publikasi BPS hasil sensus tahun 2000 tidak dilengkapi karakteristik lainnya.
8. Jumlah anak lahir hidup yang dimiliki responden di nagari cukup bervariasi, dari yang tidak mempunyai anak sampai yang memiliki anak lahir hidup sebanyak 13 orang. Tetapi pada umumnya responden juga memiliki anak lahir hidup dalam jumlah yang besar, sekalipun pada nagari tipikal pertanian komersial, dan industri rumah tangga dengan aksesibilitas daerah yang lebih baik. Dilihat dari rata-rata anak lahir hidup setelah habis masa reproduksinya, sama halnya dengan yang ditemukan di kabupaten kota, juga termasuk besar untuk keempat nagari lokasi penelitian. Sedangkan dari usia kali pertama kawin memberi pembenaran bahwa perempuan yang kawin pada usia muda mempunyai rata-rata anak lahir hidup lebih banyak dibanding yang kawin pada umur yang lebih tua (matang). Sementara dilihat dari pekerjaannya, perempuan bertani termasuk buruh tani, cenderung mempunyai rata-rata anak lebih besar. Sedangkan dilihat dari pendidikan perempuan, rata-rata anak yang dilahirkan bervariasi per jenjang pendidikan.
9. Partisipasi PUS khususnya perempuan dalam KB di kabupaten kota sudah cukup tinggi, meskipun demikian dari data rata-rata anak lahir hidup setelah habis masa reproduksinya menunjukkan jumlah yang besar. Sehubungan dengan data sekunder tentang partisipasi KB dan rata-rata jumlah anak ini, perlu dipertanyakan kenapa terdapat ketimpangan seperti itu. Selanjutnya bila dilihat partisipasi suami dalam KB di kabupaten kota secara keseluruhan sangat rendah sekali. Agak berbeda dengan temuan

di kabupaten kota, partisipasi responden (perempuan) dalam KB di nagari masih rendah untuk keempat nagari. Diantara alasan yang dikemukakan responden adalah tidak diizinkan suami, meskipun responden punya keinginan yang besar untuk ikut KB. Sedangkan dari persepsi laki-laki di nagari, laki-laki ber-KB dianggap tidak lumrah. Realita ini menunjukkan masih tingginya nilai *patriakhis* yang membelenggu kehidupan perempuan termasuk untuk tubuhnya sendiri.

10. Kasus abortus, bayi mati, dan kematian anak ditemukan di setiap nagari dengan tipikal dan aksesibilitas daerah yang berbeda. Dari hasil wawancara terungkap bahwa diantara perempuan yang mempunyai anak lahir mati adalah perempuan yang frekuensi melahirkannya lebih sering. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu indikasi masih rendahnya kualitas kesehatan perempuan.
11. Tingginya paritas yang dimiliki perempuan, rendahnya partisipasi PUS, khususnya laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi, dan sebaran rata-rata anak lahir hidup terutama dilihat dari umur kali pertama kawin di tingkat nagari, mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan khususnya kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Kesehatan reproduksi lebih merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk pada saat keluarga mau ber-KB secara otomatis perempuanlah yang ikut KB. Persoalan ini diperparah oleh masih rendahnya pelayanan kesehatan yang diberikan, termasuk sarana dan akses terhadap pusat-pusat pelayanan.
12. Intensitas mobilitas perempuan ke pasar antar nagari yang tinggi adalah di nagari tipikal pertanian tradisional, dan nagari tipikal industri rumah tangga. Sementara di nagari tipikal daerah pesisir, mobilitas perempuan ke pasar antar nagari tetap rendah, sekalipun tidak ada pasar nagari, karena minimnya sarana transportasi yang tersedia, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan di tipikal daerah pertanian dengan

aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas ke pasar antar nagari juga rendah. Tingginya mobilitas ke pasar antar nagari lebih disebabkan ketidaktersediaan pasar di nagari tersebut, dan kalupun ada barang-barang yang ditawarkan tidak lengkap. Selain itu juga dipengaruhi oleh aksesibilitas daerah.

13. Sebaliknya mobilitas perempuan ke kota kabupaten, kota propinsi, dan ke luar propinsi sangat rendah untuk semua tipe daerah. Kecuali mobilitas ke kota lainnya (kota terdekat) pada daerah tipikal tertentu termasuk tinggi terutama yang aksesibilitas daerahnya juga baik. Rendahnya mobilitas non permanen perempuan menjadi kendala yang sangat menentukan bagi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, baik secara sosial maupun bagi peningkatan kualitas dirinya sendiri.
14. Kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan dan keluarganya, serta rendahnya kapasitas intelektual dan pengetahuan agama menjadikan mereka tidak punya kesungguhan dalam menjalankan kehidupan keagamaan secara baik, demikian juga anak-anak mereka.
15. Dilema kehidupan masyarakat yang sangat komplit di tingkat nagari terjadi di Tikus V Jorong dengan tipikal daerah pesisir, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan, transportasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan.

## **5.2 Rekomendasi dan *Action Plan***

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat direkomendasikan beberapa hal dalam bentuk kebijakan dan penelitian lanjutan.

### **Rekomendasi pertama**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih cenderung mengalami bentuk ketidakadilan berupa beban kerja ganda, kekerasan, streatip, dan subordinasi, sebagai akibat konstruksi sosial di dalam

masyarakat (gender). Mensikapi hal ini Biro PP Propinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* pemberdayaan perempuan perlu berkoordinasi dengan DIKNAS, DEPAG, MUI, LKAAM, Dinas Kesehatan, BKKBN, PSW di Perguruan Tinggi, dalam upaya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.

### **Action Plan**

DIKNAS perlu mengupayakan terintegrasinya prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam kurikulum maupun dalam proses pembelajaran mulai dari TK sampai sekolah menengah. Dalam konteks ini, DIKNAS harus menjadikan guru sebagai khalayak sasaran strategis.

DEPAG, dalam hal ini BP4 bekerjasama dengan lembaga pendidikan, psikolog, seksolog, praktisi hukum untuk menyusun program pendidikan pranikah yang komprehensif bagi calon pengantin dalam kemasan *short course*. BP4 juga diharapkan dapat mensosialisasikan dan memantapkan perjanjian bagi pasangan yang akan menikah. Disamping itu, perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan sensitivitas gender hakim pengadilan agama, dan KUA.

MUI diharapkan berperan untuk membekali para ulama, dan mubalig untuk mensosialisasikan konstruksi kepemimpinan, dan posisi perempuan dalam berbagai bidang. Disamping itu, perlu kajian yang kontekstual tentang perempuan dalam perspektif islam.

LKAAM bersama pemangku adat perlu melakukan reevaluasi posisi perempuan dalam budaya Minangkabau, karena dalam realitasnya posisi perempuan sebagai bundo kanduang lebih bermakna simbolik.

Dinas Kesehatan, BKKBN perlu melakukan, meningkatkan sosialisasi KB, dan kesehatan reproduksi bagi laki-laki, mengingat masih tingginya nilai

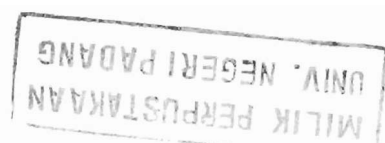
*patriarkhis* yang membelenggu kehidupan perempuan termasuk terhadap dirinya sendiri. Selain itu, lembaga/intansi ini juga perlu meningkatkan sensitivitas gender petugas kesehatan.

PSW yang ada di Perguruan Tinggi perlu proaktif melakukan kajian yang mendalam, dan evaluasi terhadap program sosialisasi kesetaraan, dan keadilan gender, seperti materi, metoda, dan media sosialisasi yang digunakan. Sehingga ditemukan model sosialisasi yang efektif guna tercapainya pemahaman yang tepat terhadap kesetaraan gender. PSW juga perlu meningkatkan tawaran program sosialisasi melalui Lembaga pengabdian pada Masyarakat yang ada di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Biro pemberdayaan Perempuan propinsi maupun kabupaten kota perlu meningkatkan penyebarluasan informasi tentang kesetaraan, dan keadilan gender melalui *talk show*, dan *bill board*. Penyebarluasan informasi ini dapat juga dilakukan melalui kompetisi karya seni, sastra, dan budaya serta simulasi yang bernuansa gender.

### ***Rekomendasi kedua***

Sejauh ini persoalan ketidaksetaraan, dan ketidakadilan terhadap perempuan masih banyak bersumber dari kebijakan yang belum sensitif gender. Untuk itu perlu upaya peningkatan penyusunan berbagai kebijakan, hukum, dan aturan yang lebih sensitif gender. Dalam hal ini oleh pemerintah, DPRD, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan DIKNAS.





### ***Action Plan***

DPRD bersama pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota perlu merealisasikan APBD yang berspektif gender. Sehingga dengan dukungan dana yang memadai pada bidang-bidang yang banyak terkait dengan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor informal akan dapat meningkatkan kesejahteraan, dan eksistensi perempuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam setiap Perda yang akan dibuat, DPRD harus mempertimbangkan konsepsi kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan memposisikan perempuan sebagai salah satu *Agenda Setter* dalam proses penyusunan Rancangan Perda.

Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) hendaknya dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak mengupayakan kebijakan yang berpihak kepada korban. Hal ini didasarkan atas realitas ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan, dan anak terutama dalam kasus perkosaan yang kurang mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban. Demikian juga dalam proses penyidikan, dan peradilan, korban cenderung dijadikan pihak yang disudutkan. Sehubungan dengan komplitnya permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak, diharapkan LSM pemerhati perempuan perlu meningkatkan upaya advokasi bagi korban.

Pihak pengadilan agama dalam menetapkan putusan perceraian harus mengeksplisitkan kewajiban material maupun spritual seorang Bapak, dan Ibu terhadap anaknya, beserta sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Selain itu, pengadilan agama juga perlu menetapkan aturan tentang Surat

Izin Cerai dan Pembagian Gaji bagi pasangan yang suaminya bekerja tetap dari instansi tempat mereka bekerja. Sedangkan bagi pasangan yang suaminya tidak bekerja tetap.

Dinas Kesehatan dan BKKBN perlu merevitalisasi pelaksanaan program KB di nagari terutama dalam peningkatan kualitas layanan serta membangun kemauan untuk memberikan kejelasan memilih alat kontrasepsi yang cocok serta efek sampingnya. Disamping itu, institusi ini perlu selektif dalam rekrutmen kader kesehatan di nagari dengan mempertimbangkan kemampuan intelektual calon kader.

Dinas Pendidikan perlu melakukan kajian untuk memformulasikan model pendidikan informal yang efektif untuk mengembangkan potensi perempuan yang putus sekolah terutama dalam mengasah wawasan dan keterampilan hidupnya.

Pemerintah kabupaten Agam, harus memberikan perhatian khusus terhadap nagari Tikur V Jorong terutama untuk memperbaiki serta meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi yang akan berimplikasi terhadap pengembangan diri masyarakat pesisir yang secara sosial budaya relatif terpinggirkan

Dinas Pertanian Agam melalui PPL dapat berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Nagari membina masyarakat, khususnya perempuan, untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan atau lingkungan tempat tinggal mereka untuk usaha produktif. Diharapkan PKK kecamatan untuk dapat membina dan memfungsikan PKK, dan kelompok perpuhuan (Dasawisma) nagari.

Pemerintah nagari beserta segenap komponen masyarakat harus mengupayakan implementasi nyata dari gerakan kembali ke nagari dan kembali ke surau dengan menganggarkan dana bagi pencapaian tujuan tersebut serta memfokuskan pembangunan bidang keagamaan pada aspek Sumber Daya Manusianya melalui pelatihan kader mubalig, dan menggiatkan majelis taklim. Dalam konteks ini, DEPAG juga perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif bagi guru TPA/TPSA.

### ***Rekomendasi Ketiga***

Tidak ada atau terbatasnya data menyangkut aspek kependudukan yang terdapat di nagari, baik yang ditemukan dari penelitian ini maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti, BPS perlu melakukan reorganisasi pengumpulan data dalam bentuk sensus maupun survai. Sehingga nagari memiliki data, dan nagari dapat melakukan pembaharuan data setiap tahunnya dengan sistem registrasi penduduk. Disamping itu dalam upaya penyebaran data dan informasi yang ada, diperlukan keterbukaan berbagai institusi bagi peneliti dalam mengakses data yang dimiliki, sehingga berkontribusi bagi perencanaan pembangunan.

### ***Action Plan***

BPS perlu melakukan reorganisasi dengan menempatkan stafnya di nagari sebagai penanggung jawab tersedianya *data base* nagari.

BPS perlu melatih staf pemerintah nagari untuk terampil dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

BPS perlu melibatkan pemerintah ataupun lembaga yang ada di nagari dalam melakukan sensus ataupun survai.

BPS maupun institusi lainnya perlu responsif terhadap upaya pengaksesan data oleh peneliti.

#### ***Rekomendasi Keempat Tentang Penelitian Lanjutan***

Penelitian ini tidak mengungkapkan mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan domestik terjadi serta mengapa perempuan enggan mengungkapkannya. Selain itu perlu diungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan perkosaan dan pencabulan, terutama dilihat dari pengaruh pornografi dan porno aksi.

Implikasi rendahnya mobilitas non permanen perempuan terhadap aktualisasi dirinya sehingga diperoleh data guna membuat kebijakan strategis bagi pemberdayaan perempuan. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB perlu ditelusuri lebih jauh dengan meneliti bagaimana persepsi laki-laki terhadap pemakaian alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi perempuan.

Untuk mengungkapkan kecenderungan fertilitas dan mortalitas secara lebih dalam perlu diteliti dengan jangkauan responden yang lebih besar sekalipun penelitian telah menyinggung hal tersebut dari beberapa aspek dengan responden yang sangat terbatas. Termasuk keengganan dan ketakutan perempuan terhadap risiko pemakaian alat kontrasepsi terutama dalam kaitannya dengan bentuk dan kualitas pelayanan yang diberikan dalam KB dan kesehatan reproduksi.

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Proyek Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balitbangda Propinsi Sumatra Barat telah melakukan penelitian tentang *Profil Perempuan Sumatra Barat*, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 074/11/SPK/2003 tanggal 05 Juni 2003.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Sumatra Barat.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian Balitbangda Propinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan reviewer/tenaga peneliti Balitbangda Propinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang khususnya.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Proyek Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balitbangda Propinsi Sumatra Barat yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2003  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. H. Agus Irianto  
NIP. 130879791

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ANGGOTA PENELITI.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
BAB 1 <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Konseptual .....	18
BAB 2 <b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	20
2.1 Kaedah Penelitian .....	20
2.2 Definisi Operasional .....	20
2.3 Kerangka dan Jumlah Sampel .....	20
2.4 Unit Analisis .....	22
2.5 Metode Analisis .....	22
2.6 Keterbatasan Penelitian .....	24
BAB 3 <b>PROFIL PEREMPUAN DI TIGA KABUPATEN KOTA           VERSI DATA SEKUNDER</b> .....	25
3.1 Komposisi Penduduk .....	25
3.2 Kesehatan .....	30
3.3 Angka Perceraian .....	35
3.4 Tindak kejahatan terhadap Perempuan dan Anak ....	44
BAB 4 <b>PROFIL PEREMPUAN DI NAGARI</b> .....	48
4.1 Karakteristik Responden dan Anggota Rumah Tangganya	48
4.2 Fertilitas dan Partisipasi Responden Dalam KB .....	61
4.3 Mortalitas .....	75
4.4 Mobilitas Nonpermanen .....	77
4.5 Kehidupan Keagamaan .....	83
BAB 5 <b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	88
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Rekomendasi dan Action Plan .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	99

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis kelamin .....	26
Tabel 2 Jumlah Pendiduk 15 Tahun Keatas Mneurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan .....	28
Tabel 3 Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki .....	29
Tabel 4 Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis .....	29
Tabel 5 Rata-rata Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Per-Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2000 ...	31
Tabel 6 Jumlah PUS dan Partisipasinya dalam KB .....	32
Tabel 7 Status Gizi Bayi Baru Lahir dan Anak Balita Daerah Penelitian Tahun 2001 .....	33
Tabel 8 Kelahiran Bayi dan Kematian Bayi di Daerah Penelitian Tahun 2001 .....	34
Tabel 9 Cerai Gugat Berdasarkan Kelompok Umur Penggugat dan Tergugat Tahun 2001 .....	36
Tabel 10 Cerai Gugat Berdasarkan Kelompok Umur Penggugat dan Tergugat Tahun 2002 .....	37
Tabel 11 Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur Penggugat dan Tergugat Tahun 2001 .....	37
Tabel 12 Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur Penggugat dan Tergugat Tahun 2002 .....	38
Tabel 13 Cerai Gugat Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2001 .....	39

Tabel 14	Cerai Gugat Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2002 .....	40
Tabel 15	Cerai Talak Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2001 .....	41
Tabel 16	Cerai Talak Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2002 .....	42
Tabel 17	Korban Tindak Kejahatan di Kota Padang Tahun 2001-2002 .....	44
Tabel 18	Pekaku Tindak Kejahatan di Kota Padang Tahun 2001-2002 .....	45
Tabel 19	Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak di Padang Pariaman Tahun 2001-2003 .....	46
Tabel 20	Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Agam Tahun 2001-2003 .....	47
Tabel 21	Frekuensi Umur Responden .....	49
Tabel 22	Jumlah Responden Menurut Status Kawin .....	50
Tabel 23	Frekuensi Responden Menurut Umur Kali Pertama Kawin	51
Tabel 24	Frekuensi Responden Menurut Lapangan Pekerjaan.	53
Tabel 25	Frekuensi Pekerjaan Suami Responden .....	54
Tabel 26	Tingkat Pendidikan responden dan Suaminya .....	55
Tabel 27	Frekuensi responden Menurut Penyakit yang Dikeluhkan Selama Satu Tahun Terakhir .....	56
Tabel 28	Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Rumah yang Ditempati .....	57
Tabel 29	Frekuensi Responden Berdasarkan Status Rumah yang Ditempati .....	58
Tabel 30	Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden .....	58



Tabel 31	Distribusi Status Pendidikan Anak Responden Pada Tingkat Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .....	60
Tabel 32	Jumlah Responden menurut Anak Lahir Hidup .....	62
Tabel 33	Partisipasi Responden Dalam KB dan Alasan Ketidakikutannya .....	67
Tabel 34	Distribusi Alat Kontarsepsi Yang Digunakan Responden Peserta KB .....	68
Tabel 35	Frekuensi Responden Berdasarkan Informasi KB .....	69
Tabel 36	Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Responden .....	70
Tabel 37	Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Kali Pertama Kawin Responden ...	71
Tabel 38	Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Pekerjaan Responden .....	72
Tabel 39	Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Pendidikan Responden .....	73
Tabel 40	Distribusi Persalinan Yang ditolong Oleh Dukun Dan Tenaga Medis .....	74
Tabel 41	Responden Yang Abortus dan Mempunyai Bayi Lahir Mati, Bayi, bayi mati, dan Anak Mati Per-Wilayah	76
Tabel 42	Mobilitas ke Pasar Antar Nagari .....	79
Tabel 43	Frekuensi Mobilitas Responden ke Ibukota Kabupaten.	81
Tabel 44	Frekuensi Responden ke Ibukota Propinsi .....	81
Tabel 45	Frekuensi Mobilitas Responden ke Kota Lain di dalam Propinsi .....	82
Tabel 46	Frekuensi Mobilitas Responden ke Luar Propinsi .....	83

Tabel 47	Aktivitas Ibadah Shalat Wajib responden Dalam Dua Tahun Terakhir .....	84
Tabel 48	Aktivitas Shalat berjamaah Yang Dilakukan Responden Dalam Satu Tahun Terakhir .....	85
Tabel 49	Aktivitas Ibadah mengaji Yang Dilakukan Responden Dalam Dua Bulan Terakhir .....	86

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan yang berkenaan dengan persoalan perempuan selama ini banyak dipengaruhi oleh teori sosial yang secara umum dapat dibagi kedalam dua aliran (Anonim, tt; Ihromi, 1995). *Pertama*, aliran yang memfokuskan kepada "persoalan perempuan", yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan dalam pembangunan. Model ini lebih dikenal dengan *Women in Development* (WID). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan hanya sekedar melibatkan dan memfasilitasi perempuan dalam pembangunan, justru mempertajam ketimpangan gender yang cenderung menjerumuskan mereka pada beban ganda misalnya. Dalam pendekatan ini perempuan lebih hanya sebagai objek ketimbang subjek pembangunan. Kegagalan model WID, mendapat kritikan dari mereka yang lebih mengusahakan perubahan posisi perempuan dalam pembangunan melalui perspektif gender, atau yang lebih dikenal dengan *Gender and Development* (GAD). *Gender and Development* merupakan suatu strategi untuk memberikan kepada perempuan bagian yang adil dari hasil-hasil pembangunan, dengan melihat bagaimana masyarakat diorganisir baik secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Sejalan dengan meningkatnya pengakuan akan pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan, juga telah meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap kelemahan perencanaan pembangunan dalam memperhatikan secara penuh dan memperhitungkan secara tepat, dan sistematis sumbangan perempuan terhadap proses pembangunan maupun dampak pembangunan tersebut terhadap perempuan.

Di Sumatera Barat, khususnya dalam tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau, menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi

dan terhormat, yang terkenal dengan filosofi *Bundo Kandung*. Komitmen pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dituangkan dalam visi pembangunan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat, yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dalam struktur pemerintahan daerah dibentuk Biro Pemberdayaan Perempuan (Anonim, 2000).

Meskipun demikian, sejauh ini beberapa hasil penelitian membuat kesimpulan yang hampir sama bahwa dalam banyak hal, peran dan posisi perempuan Sumatera Barat masih tidak jauh berbeda dengan permasalahan perempuan di daerah lain. Misalnya penelitian yang dilakukan Fatmariza, dkk (2002) tentang "*Partisipasi Perempuan di Nagari*" yang dilakukan di delapan nagari Sumatera Barat, menemukan bahwa secara umum keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi sudah cukup tinggi, akan tetapi dengan polarisasi pembagian kerja dalam masyarakat menyebabkan perempuan (istri) memikul beban kerja yang relatif berat, karena selain bekerja di sektor publik perempuan mesti bertanggung jawab pada pekerjaan rumah tangga. Bila dilihat perbandingan persentase penduduk yang bekerja, data tahun 2000 menunjukkan persentase laki-laki yang bekerja tetap lebih besar dibanding persentase penduduk perempuan yang bekerja. Secara total jumlah perempuan yang bekerja adalah 35,8 persen, sedangkan laki yang bekerja adalah 64,2 persen, dan lapangan kerja utama yang banyak dilakukan oleh perempuan di Sumatera Barat adalah pertanian (Anonim, 2002).

Dalam bidang politik pemerintahan, masih dari hasil penelitian Fatmariza, dkk (2002) ditemukan bahwa dari tujuh item yang ditanyakan, keterlibatan perempuan yang terbesar (81 persen) adalah pemberian suara atau hak memilih, sedangkan enam item lainnya seperti mengikuti pertemuan di nagari, membantu memecahkan persoalan yang terjadi di nagari,

keterlibatan perempuan masih rendah (di bawah 40 persen). Disisi lain, dari lebih 500 nagari yang sudah diresmikan hanya ada empat orang perempuan yang menduduki jabatan wali nagari. Sedangkan representasi perempuan di lembaga BPAN rata-rata hanya 2 orang per nagari. Jumlah itupun diisi oleh utusan Bundo Kandung.

Sehubungan dengan keterlibatan perempuan dalam politik pemerintahan, dalam buku "*Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000*" dinyatakan bahwa jumlah wakil rakyat dari kaum perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD sangat rendah sekali, hanya 5,77 persen, dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,2 juta jiwa. Padahal 53 persen diantara jumlah penduduk tersebut adalah perempuan (Anonim, 2002). Lebih lanjut dari hasil laporan buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Sumatera Barat masih banyak terdapat ketimpangan antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki, baik dalam hal aksesnya terhadap bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya, maupun dalam hal peran, kontrol dan manfaat dari program pembangunan yang belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk perempuan, khususnya perempuan di level bawah atau *grassroot*. Dengan kata lain kebijakan pembangunan yang ada, dirasakan masih memposisikan perempuan pada posisi subordinat.

Ketimpangan tersebut erat kaitannya dengan program pemberdayaan perempuan yang belum sepenuhnya didasarkan kepada kebutuhan perempuan di masing-masing daerah, terutama di tingkat Nagari, karena keterbatasan data yang ada. Effendi (1995) mengemukakan bahwa keterbatasan data merupakan salah satu faktor yang menghambat keleluasaan dalam mengamati, mencermati dan merencanakan pembangunan pemberdayaan.

Dari pengalaman peneliti ketika menghimpun data tentang partisipasi perempuan di nagari, secara umum dapat dikatakan bahwa ketersediaan

data di tingkat nagari sangat terbatas. Baik data tentang jumlah dan struktur penduduk. Apalagi data tentang dinamika penduduk, khususnya penduduk perempuan, tidak tersedia sama sekali. Apalagi data yang secara utuh dapat menggambarkan tentang profil penduduk perempuan. Sementara itu di tingkat Kabupaten Kota walaupun data tentang penduduk tersebut cukup tersedia, akan tetapi belum menggambarkan tentang profil penduduk perempuan secara komprehensif. Data yang tersedia, lebih bersifat umum tentang jumlah dan struktur, dan masih perlu dilakukan analisis serta pemaknaan lebih lanjut. Selain itu, data yang tersedia belum sepenuhnya menyentuh isu-isu khusus tentang perempuan, dan walaupun ada data tersebut sifatnya kasuistik. Sehingga kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang dirancang masih belum efektif.

Dengan demikian agar kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan lebih efektif, ketersediaan data profil penduduk perempuan terutama di tingkat nagari menyangkut data tentang: jumlah, struktur: demografi, ekonomi, sosial, dan dinamika penduduk itu sendiri (fertilitas, mortalitas, mobilitas), serta keterkaitannya dengan struktur umur, pendidikan dan pekerjaan, sangat diperlukan. Data ini dapat dijadikan *entry point* dalam menentukan perencanaan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat secara komprehensif. Selain itu, informasi tentang profil penduduk perempuan menyangkut persoalan ketidakadilan gender yang mereka alami juga diperlukan. Hal ini dapat menunjukkan warna, permasalahan dan keanekaragaman isu perempuan di daerah tertentu, terutama tingkat nagari, yang sekaligus dapat dijadikan landasan berpijak dalam penyusunan dan penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan, mencakup di dalamnya *gender sensitive budgetting*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terbatasnya data tentang profil perempuan yang dapat dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat terutama di tingkat nagari.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun profil penduduk perempuan Sumatera Barat di tingkat nagari berdasarkan tipe nagari meliputi, data individu, dan data rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada jabaran di bawah ini,

### **1. Data Individu (Responden)**

- a. Umur, umur kawin pertama
- b. Status perkawinan, perempuan Kepala Keluarga
- c. Pendidikan, pendidikan tertinggi, kemampuan baca tulis
- d. Pekerjaan dan pekerjaan berdasarkan lapangan usaha
- e. Kegiatan produktif, reproduktif dan sosial
- f. Pemanfaatan pelayanan kesehatan, keikutsertaan dalam KB, alat kontrasepsi yang digunakan, penyakit yang pernah diderita
- g. Mobilitas, teritorial dan alasan

### **2. Data Rumah Tangga**

- a. Keadaan bangunan dan status tempat tinggal
- b. Fertilitas meliputi, jumlah anak lahir hidup, anak masih hidup, jarak kelahiran anak, umur melahirkan pertama
- c. Jumlah anggota rumah tangga (keluarga inti dan keluarga luas)
- d. Umur, pendidikan, pekerjaan anak, suami serta anggota rumah tangga lainnya
- e. Anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar
- f. Mortalitas, abortus, anak lahir mati, kematian bayi, kematian anak

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan profil perempuan di tingkat kabupaten kota meliputi data tentang komposisi penduduk perempuan dan laki-laki, pendidikan, kesehatan, perceraian, serta tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Seperti dijabarkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyusun profil penduduk perempuan Sumatera Barat, baik di tingkat Nagari maupun Kabupaten Kota berdasarkan kriteria daerah administratif, budaya, geografis dan keanekaragaman mata pencaharian penduduk. Data tersebut menyangkut data individu, data rumah tangga. Atau secara umum, data aspek kependudukan yang dilihat dari struktur dan proses demografi. Selain itu, juga diungkapkan tentang data ketidakadilan gender.

##### **1.4.1 Struktur Penduduk**

Aspek kependudukan suatu wilayah meliputi struktur, dan dinamika penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk merupakan aspek statis, berupa potret atau gambaran penduduk suatu wilayah, dapat meliputi jumlah, persebaran dan komposisi. Struktur penduduk dapat berubah sejalan dengan dinamika penduduk atau karena proses demografi yaitu: fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk baik mobilitas secara horizontal maupun mobilitas vertikal (Mantra, 1985 ; 1997/1998).

Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan ini sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti : (1) untuk mengetahui dan menggambarkan '*Human Resources*' yang ada sebagai pendukung utama dalam proses pembangunan, baik meliputi aspek demografis seperti umur, maupun sosial ekonomi, (2) untuk mengambil suatu kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan dan kesejahteraan. Misalnya dari



data pendidikan, jika ternyata banyak perempuan yang buta huruf, kebijakan yang diperlukan adalah peningkatan kejar paket A. Contoh lain misalnya dengan fertilitas yang tinggi sementara pendidikan ibu rendah, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang KIA maupun melanjutkan program KB. (3) membuat perbandingan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya (Nurdin, 1981; Anonim, 1993), dalam hal ini adalah perbandingan profil penduduk perempuan antar Kabupaten Kota dan antar Nagari.

Komposisi penduduk atau struktur penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu dapat diklasifikasi sebagai berikut: (a ) Biologis, meliputi umur dan jenis kelamin. Berdasarkan umur dan jenis kelamin . Perbedaan struktur umur akan dapat menimbulkan perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Dari struktur umur dan jenis kelamin juga dapat diketahui tentang beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Tingginya angka rasio beban tanggungan merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh golongan penduduk produktif terpaksa harus dibagikan atau dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum dan tidak produktif lagi. Selain itu, dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga dapat dihitung tentang rasio jenis kelamin. Struktur umur penduduk, khususnya perempuan, juga dapat dilihat dari umur kawin pertama, umur memulai hubungan kelamin, dan umur rata-rata melahirkan anak pertama, (b) sosial, antara lain tingkat pendidikan, dan status perkawinan. Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, termasuk dalam hal pemberian respon terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, profil penduduk perempuan perlu dilihat dari pendidikan perempuan itu sendiri dan juga pendidikan anggota rumah tangganya, (c) Ekonomi dan ketenagakerjaan. Secara ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk

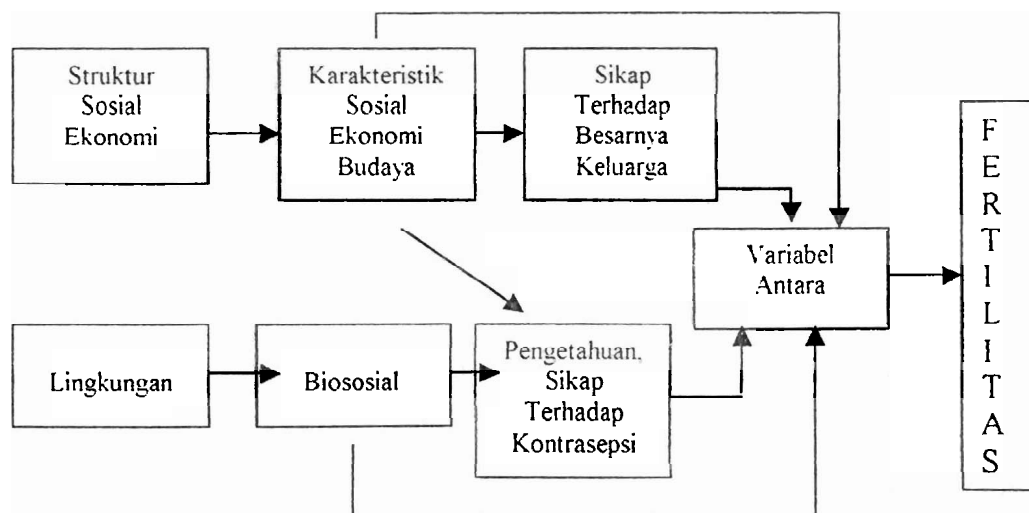
yang berumur 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan konsep ketenagakerjaan di atas, yang perlu dilihat tentang profil penduduk menyangkut komposisi penduduk dalam bidang ekonomi adalah angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan jenis kegiatan yang dilakukan, baik perempuan (responden) secara individu maupun anggota rumah tangganya. Komposisi penduduk menurut ekonomi dapat secara lebih tegas menggambarkan tentang kemandirian perempuan secara ekonomi, maupun anggota keluarganya. Hasil survei Ithromi (1995) menemukan, kecenderungan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebagai salah satu indikator partisipasi dalam bidang ekonomi menunjukkan peningkatan dibanding dari peningkatan laju partisipasi laki-laki. Namun pekerja perempuan sangat kurang diperhitungkan dalam buku-buku statistik nasional, pendidikan dan keterampilan yang rendah memaksa perempuan memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif, under estimate, dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan di dalam rumah, karena mereka mesti mengerjakan pekerjaan domestik. (d) geografis, berdasarkan tempat tinggal, kabupaten/kota, dan berdasarkan tipikal lainnya, seperti dalam penelitian ini adalah berdasarkan tipe nagari, dan pembagian wilayah pesisir dan pedalaman atau jauh dari pesisir.

#### **1.4.2 Dinamika Penduduk**

Dinamika penduduk dikatakan sebagai aspek yang dinamis, yang selalu berubah sehingga juga membawa perubahan pada struktur penduduk dan persebarannya. Dinamika penduduk atau proses demografi, seperti disebutkan di atas terdiri dari fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk.

Fertilitas merupakan gambaran tentang jumlah anak lahir hidup yang dimiliki seorang perempuan atau sekelompok perempuan pada wilayah atau daerah tertentu. Tingkat fertilitas dapat menggunakan parameter fertilitas

tahunan, seperti Angka Kelahiran Menurut Umur Tertentu (ASFR), dan fertilitas general atau kumulatif seperti Angka Fertilitas Total (TFR). Baik dilihat dari jumlah anak yang lahir hidup maupun jumlah anak yang masih hidup atau yang menggambarkan paritas perempuan. Tingkat fertilitas sangat berguna dalam hal menentukan kebijakan penduduk atau dalam usaha untuk membentuk keluarga kecil berkualitas. Irawan dan Suparmoko (1992) menegaskan bahwa tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan makin besarnya jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua, sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata, karena tingkat produksi yang relatif tetap. Artinya fertilitas yang tinggi merupakan beban, baik bagi keluarga maupun bagi anggaran pemerintahan. Secara spesifik, jumlah fertilitas yang tinggi bagi perempuan akan menyita sebagian waktunya, baik karena kodratnya dalam menyusui anak maupun karena tatanan adat dan budaya Minangkabau. Oleh karena itu, profil perempuan juga perlu mengangkat tentang fertilitas yang dimilikinya.



Gambar 1 Model World Fertility Survey (1977)  
Dalam Tukiran (1997)

Davis dan Blake (1956) dalam tulisannya yang berjudul "*The Social Structure of Fertility: An Analytical Framework*" menyatakan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial melalui variabel antara yang terdiri dari 11 variabel (*dalam Mantra, 1985*). Kemudian World Fertility Survey sebagaimana yang dikutip oleh Tukiran (1997) mengembangkan kerangka model analisis fertilitas yang lebih komprehensif dengan menggabungkan model Freedman, yang digambarkan dalam hubungan saling pengaruh mempengaruhi dari faktor sosial ekonomi, lingkungan, sikap terhadap besarnya keluarga dan fertilitas.

Ediastuti dan Faturochman (1995) dalam latar penelitiannya tentang fertilitas di pedesaan Jawa menyebutkan bahwa dari beberapa hasil penelitian fertilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat dari segi ekonomi terungkap ada dua pandangan tentang nilai anak. pandangan *pertama* beranggapan bahwa mempunyai anak yang banyak dapat meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung orang tua, sedangkan pandangan *kedua*, beranggapan bahwa anak banyak bila tidak berkualitas justru menambah beban orang tua dikemudian hari.

Selain mengungkapkan tentang fertilitas yang dimiliki perempuan, khususnya di tingkat nagari, penelitian ini juga akan mengungkapkan tentang mortalitas yang terkait erat dengan persoalan perempuan, yaitu tentang kematian bayi (IMR), kematian balita, dan kematian ibu (*Mathernal Mortality Rate*). Jika dikaji lebih jauh, kematian akan selalu berkaitan dengan kesehatan. Namun Kasto (1997) mengingatkan bahwa kesehatan tidak dapat menjelaskan perubahan tingkat kematian secara berdiri sendiri tanpa harus dikaitkan dengan faktor lain. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kematian, khususnya kematian bayi, dengan pembangunan ekonomi. Artinya apabila kematian bayi rendah maka hal itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang maju. Sebaliknya apabila kematian bayi tinggi, maka pembangunan ekonomi rendah.

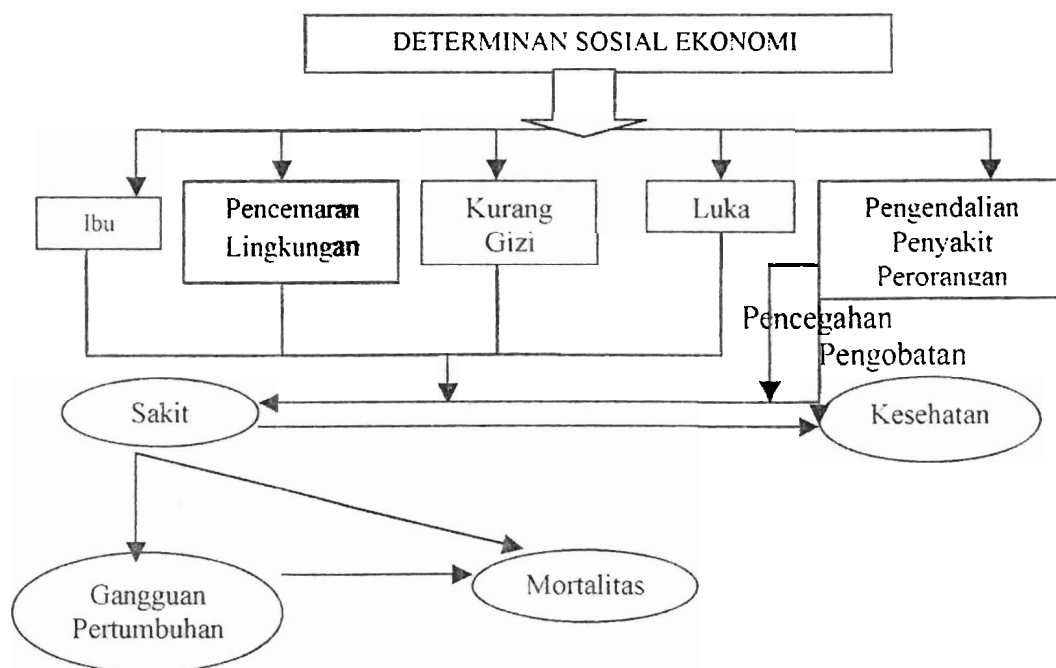
Pengukuran mortalitas penduduk di Indonesia yang telah dilakukan selama ini lebih ditujukan pada mortalitas bayi, anak, dan mortalitas ibu melahirkan. Hal ini disebabkan mortalitas bayi, anak dan mortalitas ibu melahirkan mempunyai porsi yang lebih penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, terutama perempuan. Disamping itu, ukuran mortalitas ini seringkali dijadikan sebagai salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Sukamdi (1995) secara lugas memaparkan ada empat faktor yang berkaitan dengan kematian khususnya IMR dan kematian balita, yaitu faktor sosial ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan faktor demografis.

Dalam kaitannya dengan kematian, Khrisnan (1975) berpendapat bahwa pendidikan memainkan dua peranan, khususnya kematian bayi, yaitu dalam hal pencegahan (*preventive*) dan pengontrolan. Hal yang berkaitan dengan pencegahan misalnya pemberian makanan yang higienis dan sehat untuk anak. Sedangkan yang bersifat pengontrolan adalah kesadaran untuk menggunakan fasilitas kedokteran. Artinya seorang ibu yang berpendidikan akan dapat mengadopsi alternatif modern untuk perawatan anak dan juga terapi. Selain itu, ibu yang berpendidikan akan dapat merubah sifat tradisional hubungan keluarga dan dapat memahami saran paramedis. Sedangkan dari faktor ekonomi, antara lain dapat dibedakan fertilitas seorang atau sekelompok perempuan berdasarkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Jayachandaran dan Jarvis (dalam Kasto, 1997) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor non pertanian biasanya mempunyai anak yang sedikit. Disamping itu, mereka juga mempunyai "exposure" yang tinggi terhadap fasilitas medis dan kesehatan, serta cenderung untuk merawat anaknya dengan lebih baik.

Selanjutnya faktor budaya dikatakan sebagai salah satu variabel yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kematian. Agama misalnya, yang biasanya dimasukkan ke dalam indikator budaya, selalu dikaitkan

dengan peranan perempuan dalam keluarga (*female role*), termasuk dalam perawatan anak. Kasto (1997) mengatakan bahwa Islam biasanya dikenali sebagai suatu agama dengan mortalitas yang tinggi. Hal ini dikaitkan dengan suatu pemahaman bahwa Islam cenderung membelakangkan peran perempuan di dalam keluarga, yang berakibat pada rendahnya tingkat perawatan anak. Namun dalam hal ini, masih perlu kajian yang mendalam apakah kematian tersebut memang karena pemahaman tersebut atau lebih karena kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, maupun keberpihakan program perencanaan pembangunan terhadap laki-laki. Variabel budaya lain, misalnya menyangkut "Sex Preference" yang pada dasarnya berhubungan dengan nilai anak (*value of children*). Dalam kaitan ini misalnya ada pemahaman yang umum di masyarakat Minang untuk memiliki anak perempuan. Dengan demikian setiap keluarga akan berusaha untuk memiliki anak perempuan meskipun jumlah anaknya sudah cukup banyak, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kematian bayi ataupun anak.



Gambar 2 Determinan Sosial Ekonomi dan Mortalitas

Variabel lain yang juga mempengaruhi kematian bayi maupun fertilitas adalah variabel demografi. Ibu yang mulai melahirkan anak pada usia muda (belasan tahun) mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mempunyai anak yang mati pada usia kurang dari satu tahun. Selanjutnya dalam kaitannya dengan mortalitas anak di negara berkembang, Mosley dan Chen (1988: *dalam* Kasto, 1997) memberikan suatu kerangka yang didasarkan atas anggapan bahwa semua faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi mortalitas anak melalui serangkaian mekanisme biologi atau determinan terdekat.

Seperti telah disebutkan di atas, dinamika penduduk perempuan juga dapat dilihat dari gerak atau mobilitas penduduk perempuan itu sendiri. Secara umum, mobilitas penduduk dapat dibagi atas dua bagian yaitu yang bersifat permanen dan non permanen. Di Indonesia yang dikatakan mobilitas permanen adalah mereka yang telah menetap di daerah lain dalam kurun waktu minimal enam bulan, namun berniat untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas nonpermanen adalah mobilitas penduduk yang dilakukan dengan menetap di tempat tujuan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan (Chotib, 1996). Dalam penelitian ini akan digambarkan mobilitas harian yang dilakukan penduduk perempuan dan alasan melakukan mobilitas tersebut melewati batas teritorial jorong.

#### **1.4.3 Manifestasi Ketidakadilan Gender**

Berdasarkan beberapa literatur dan kajian di atas, dalam penelitian ini ada beberapa data/informasi tentang profil perempuan yang dianalisis dari perpektif gender seperti jabaran pada tujuan penelitian ini. Analisis gender menekankan pada proses menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang status laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dilihat dari akses dan peran

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan maupun kontrol dan manfaat dari pembangunan pemberdayaan perempuan.

Secara spesifik ketidakadilan gender diidentifikasi oleh Fakih (1996) dalam bukunya yang berjudul "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", ke dalam lima segi: *Pertama*, Gender dan Marginalisasi Perempuan. Marginalisasi didefinisikan sebagai proses pemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab yang mengakibatkan salah satu gender terpinggirkan dan menjadi miskin, dalam kenyataannya yang banyak terkena adalah perempuan. Sebagai contoh adanya revolusi hijau dalam pertanian yang menggantikan alat panen seperti ani-ani dengan sabit, yang menyebabkan perempuan tidak ikut lagi sebagai pekerja pada waktu panen.

*Kedua*, Gender dan Subordinasi. Oleh karena peran gender perempuan yang sempit, sehingga diasosiasikan perempuan sebagai makhluk yang emosional dan irrasional. Sehingga perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan menjadi pemimpin, dan selamanya diposisikan lebih rendah dari laki-laki. Sehubungan dengan ini, hasil survey Fatmariza, dkk (2002) di delapan nagari di Sumbar menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan lebih diposisikan pada peran domestik. Pada saat perempuan berusaha untuk berperan lebih maju, lebih tinggi, seperti menjadi walinagari, ditemukan hambatan budaya yang kental.

*Ketiga*, Gender dan Stereotip. Stereotip merupakan pelabelan yang cenderung negatif pada jenis kelamin tertentu, yang mengakibatkan ketidakadilan. Misalnya perempuan sebagai pesolek yang tujuannya untuk menarik lawan jenis, kalau terjadi perkosaan yang disalahkan adalah dandanan perempuan. Dari hasil penelitian Isnarmi dan Suasti (2002) tentang pemberitaan koran lokal, ternyata koran lokal atau dari sisi media massa terbentuk opini bahwa peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi perempuan, semuanya disebabkan oleh stereotip perempuan sebagai



mahluk yang menggiurkan laki-laki. Untuk mempertegasnya, media massa mengungkap secara jelas ciri feminin yang umum dianggap milik perempuan.

*Keempat, Gender dan Beban Kerja.* Adanya anggapan bahwa perempuan teliti, rajin, dan sejenisnya, maka perempuan hanya cocok menjadi pengurus tetek bengek rumah tangga. Sebaliknya tidak cocok menjadi kepala rumah tangga (pencari nafkah). Namun kemudian, ketika terbuka peluang perempuan untuk bekerja, peran domestik tetap menjadi tugas perempuan. Akibatnya perempuan menyanggah tugas dua kali lipat lebih berat. Karena peran yang seperti itu, meskipun perempuan secara ekonomi menyumbang cukup besar dalam ekonomi rumah tangga tidak pernah diperhitungkan. Misalnya temuan Suasti,dkk (2000) tentang pekerja industri bordiran, mengungkapkan bahwa usaha yang dirintis dan diusahakan oleh perempuan sulit untuk berkembang karena beban ganda, serta kurangnya penghargaan terhadap kerja perempuan secara ekonomi. Artinya, seberapa banyakpun waktu yang digunakan perempuan untuk aktivitas ekonomi dan sebesar apapun jumlah uang yang dapat dikontribusikannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pekerjaan tersebut tetap dihargai sebagai pekerjaan sampingan.

*Kelima, Gender dan kekerasan terhadap perempuan.* Gender sebagai konstruksi sosial membedakan peran dan posisi perempuan dengan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, yang diturunkan secara kultural dan menjadi kepercayaan serta diyakini sebagai ideologi. Oleh karenanya gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotip, yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan (Nadia, 1998) dapat terjadi dalam bentuk: (a) pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, (b)

pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (*domestic violence*), (c) perkosaan, (d) sunat pada bayi atau anak perempuan, (e) perdagangan perempuan, dan (f) pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti pemasangan alat KB secara paksa.

Keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani, cenderung menyebabkan perempuan sebagai properti milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semaunya, termasuk dengan cara kekerasan. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai konstruksi gender juga menempatkan laki-laki mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari pada perempuan. Pola hubungan demikian membentuk sistem yang disebut patriarkhi. Sistem ini hidup mulai dari keluarga sampai negara. Artinya bahwa beroperasinya mulai dari kehidupan keluarga sampai pada kebijakan negara, yang diperkuat dengan penafsiran agama, yang terkandung dalam hukum yang mengatur kehidupan rakyat terutama kaum perempuan.

Sekaitan dengan sistem patriarkhi lebih lanjut dikatakan Nadia (1998) bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan, diantaranya: (a) penyiksaan emosi, membuat istri merasa bersalah, dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga, (b) penyiksaan secara ekonomi membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan keluarga ditentukan oleh suami, (c) penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual, (d) ancaman, mengancam akan menyiksa, akan membunuh, mempergunakan hak istimewa sebagai laki-laki, serta kekuasaan dan keputusan pada laki-laki.

Semua menifestasi ketidakadilan gender itu dapat muncul secara bersamaan menimpa kaum perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam masyarakat dan negara. Ironisnya kenyataan itu diterima, adakalanya secara pasrah oleh perempuan, seperti terungkap dalam penelitian Fatmariza, dkk (2002).

416/11/2003-912)

305.4

Bad.

PO

Aspek lain dari manifestasi ketidakadilan gender dalam keluarga dapat bermuara pada terjadinya perceraian. Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Goode (*dalam* Karim, 1999) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apalagi bila dilihat dari sisi penggugat (laki-laki atau perempuan).

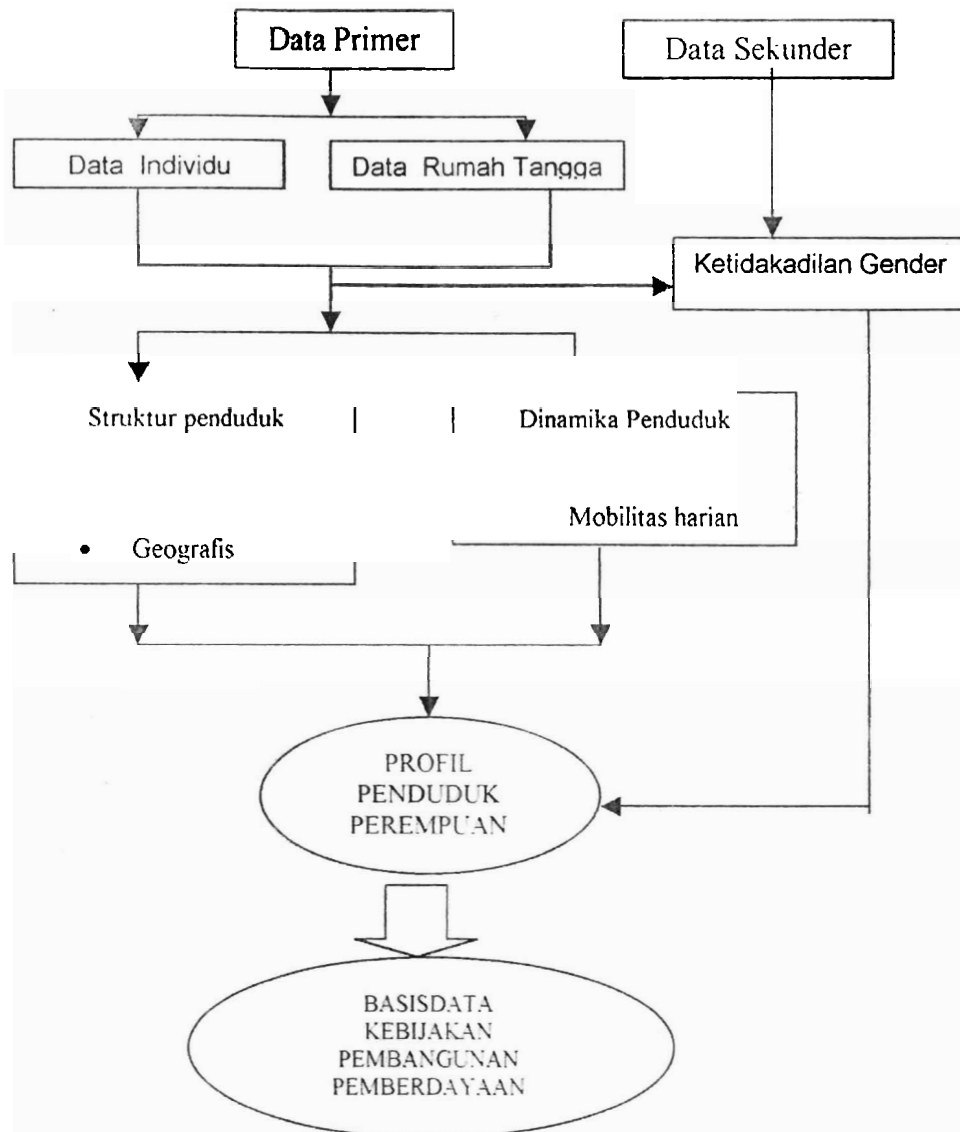
Di samping itu, Goode melihat pada adanya kaitan antara tingkat perceraian dengan sistem keluarga yang berlaku. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem keluarga inti, yang mengandalkan pasangan suami-istri untuk berbuat lebih banyak terhadap kehidupan keluarga masing-masing, tampaknya lebih berpengaruh pada tingkat perceraian. Kerabat keluarga luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami istri. Konsekuensi logisnya adalah kontrol sosial dari anggota kerabat keluarga luas menjadi berkurang dan tidak efektif lagi, sehingga beban emosional dan finansial keluarga inti menjadi lebih berat. Keluarga inti ini akan menjadi lebih mudah pecah apabila terjadi konflik antara suami istri karena sedikitnya tekanan kerabat yang memungkinkan mereka bersatu dan mempertahankan perkawinan.

Lebih banyaknya perceraian yang terjadi karena gugatan pihak istri (Cerai Gugat) menurut Gulardi (1999) tidak seluruhnya mencerminkan semakin bertambahnya ketidakstabilan keluarga, tetapi lebih banyak disebabkan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem nilai,

khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan dan perubahan status perempuan dalam masyarakat. Perubahan tersebut nampaknya telah mendorong keberanian kaum perempuan untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.

### **1.5 Kerangka konseptual**

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penelitian ini dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini dalam suatu bagan skematis pada gambar 3. Data menyangkut profil perempuan yang dikumpulkan adalah meliputi data individu perempuan itu sendiri, data rumah tangga yang dapat dijabarkan ke dalam bentuk komposisi dan dinamika penduduk, keterhubungan data struktur dan jumlah penduduk dengan dinamika penduduk (fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk). Selain itu juga dihimpun data tentang bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan perempuan. Ketiga bagian data tersebut dapat mencerminkan tentang profil perempuan, yang kemudian dapat digunakan sebagai basis data perencanaan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah berdasarkan tipikal daerah masing-masing.



Gambar 3 Kerangka Konseptual Penelitian

## BAB 2 METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Kaedah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif berspektif gender. Branen (1993) mengungkapkan bahwa penggabungan kedua metode tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti, terutama tentang permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia (Poerwandari, 2001).

Sementara itu, Sadli (1996); (Abdullah dalam ulasan makalahnya 2003) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berspektif gender bertujuan untuk dapat mengungkap secara lebih dalam tentang persoalan yang dihadapi perempuan dalam relasinya dengan laki-laki, negara, dan pasar. Relasi ini dapat dilihat dari aksesnya, peran, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.

### 2.2 Definisi Operasionalisasi

Profil perempuan dalam penelitian ini adalah gambaran perempuan dengan berbagai karakteristiknya dalam kapasitasnya sebagai individu, posisi dan dinamika kehidupannya di dalam keluarga dan masyarakat dianalisis dengan perspektif gender

### 2.3 Kerangka dan Jumlah Sampel

Penelitian mengenai profil penduduk perempuan tidak dilakukan di setiap kabupaten kota dan nagari yang terdapat di Sumatera Barat, akan tetapi dengan pengambilan sampel wilayah secara bertahap (*multy stage*). *Pertama*, pengambilan sampel kabupaten kota didasarkan atas wilayah administratif, yaitu kabupaten dan kota, dan pembagian wilayah

*Minangkabau* atas wilayah *darek* dan *pesisir/rantau*. Berdasarkan pertimbangan tersebut diambil kota Padang sebagai pusat pemerintahan ibukota propinsi Sumatera Barat, kabupaten Agam dan Padang Pariaman yang merupakan wilayah administratif kabupaten dan sekaligus sebagai wilayah *darek rantau*.

Tahap *kedua*, pengambilan sampel nagari di salah satu kabupaten kota di atas. Dalam hal ini adalah kabupaten Agam, dengan pertimbangan (a) geografis, daerah ini merupakan salah satu kabupaten yang sebagian wilayahnya terletak di pinggir pantai (yang masih terdapat nuansa *rantau*), dan sebagian lainnya merupakan daerah pedalaman ataupun pegunungan yang jauh dari pantai. Kondisi geografis daerah secara umum akan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakatnya, termasuk penduduk perempuan, (b) Keragaman mata pencaharian penduduknya. Dalam kaitan ini, Sudjana (2000) menegaskan satuan analisis penilaian yang menekankan pada aktifitas utama yang terdapat di masing-masing wilayah seperti pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan sampel wilayah. Dengan kondisi geografis dan keragaman mata pencaharian penduduknya, maka lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Agam. Nagari-nagari di Kabupaten Agam dikelompokkan ke dalam tipe: pertanian subsisten, pertanian komersial/perdagangan, industri rumah tangga, dan nagari nelayan. Dalam penelitian ini keempat tipe wilayah/nagari tersebut adalah, nagari Tigo Koto Silungkang kecamatan Palembayan, nagari Padang Luar kecamatan Banuhampu Sei Puar, nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Candung, dan Tiku V Jorong kecamatan Tanjung Mutiara. Penetapan wilayah sampel di atas juga mempertimbangkan kemudahan jangkauan oleh peneliti sesuai dengan ketersediaan dana dari Balitbang. Sedangkan di tingkat Propinsi, penelitian tidak dilakukan dengan pertimbangan, pemerintahan daerah Sumatera Barat telah dan baru

mempublikasikan data profil penduduk perempuan yang berjudul "*Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000*".

Responden penelitian diambil sebanyak 60 orang berdasarkan status dan lapangan pekerjaan dari perempuan itu sendiri. Untuk analisis data profil penduduk dari perspektif gender dipilih responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi perempuan dengan fertilitas tinggi, yang memiliki anak lahir mati, memiliki IMR, dan kematian balita.

#### **2.4 Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini di tingkat nagari adalah perempuan yang sudah menikah dan rumah tangganya. Sedangkan di tingkat kabupaten kota adalah data sekunder yang terkait dengan profil perempuan meliputi: (1) struktur umur, pendidikan, dan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, (2) persoalan kesehatan yang terkait dengan perempuan, dan anak, (3) angka perceraian, terutama dilihat dari kelompok umur dan pekerjaan, dan (4) tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak. Diasumsikan keempat aspek tersebut sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

#### **2.5 Metode Analisis**

Teknik dan analisis data dilakukan melalui dua tahapan analisis. *Tahap pertama*, Pengumpulan dan analisis data sekunder untuk tingkat kabupaten kota. Data sekunder di tiga kabupaten kota diolah dari file-file hasil Sensus Penduduk, Susenas (BPS) dan sumber lainnya yang terdokumentasikan di BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, dan Kepolisian. Data tersebut diperlukan dalam rangka menyusun variabel komposit yang mencerminkan tentang profil penduduk perempuan tingkat kabupaten kota.



*Tahap Kedua*, survai rumah tangga dilakukan di empat nagari terpilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan seperti di atas. Pada fase ini mencakup pengumpulan data primer meliputi, data tentang identitas individu penduduk perempuan, identitas rumah tangga penduduk perempuan yang kemudian disusun ke dalam struktur atau komposisi penduduk perempuan itu sendiri dan rumah tangga perempuan serta persebarannya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan oleh tenaga pencacah yang diambil dari mahasiswa tingkat akhir, dan tim peneliti sendiri. Sebelum pengumpulan data dilaksanakan, tenaga pencacah diberi pengarahan singkat mengenai jalannya penelitian dan dilanjutkan dengan *coaching* yang diarahkan untuk menyatubahasakan pemahaman mereka atas berbagai konsep yang terkandung dalam setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi dan kualitas data yang diperoleh. Khusus wawancara mendalam dilakukan oleh tim peneliti terhadap responden terpilih berdasarkan kriteria tertentu, meliputi perempuan dengan fertilitas tinggi, pernah mengalami abortus, memiliki anak lahir mati, status sosial rendah, pernah mengalami kekerasan.

Editing atas daftar pertanyaan yang sudah terisi akan dilakukan sendiri oleh tim peneliti, sebelum suatu daftar pertanyaan dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemahaman isi dan pengisian kuesioner oleh setiap pencacah, kelengkapan jawaban responden serta konsistensi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan.

Data hasil survai dan data sekunder akan disusun ke dalam tabel tunggal dan tabel silang, dengan menggunakan analisis sederhana, yaitu persentase. Sudjana (2000) menyatakan bahwa Metode Survai dapat digunakan untuk menjajaki, mengumpulkan, menggambarkan, menerangkan sasaran atau objek yang dievaluasi. Dalam menjajaki, mengumpulkan dan

menggambarkan, metode ini berguna untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa dari akumulasi data deskriptif. Mengacu kepada Alwasilah (2002), analisis data kualitatif sudah dimulai dari model menulis memo pada saat penelitian berlangsung, kemudian mengkoding data, mencari tema dan kategori, diskusi data serta penyimpulan.

## **2.6 Keterbatasan Penelitian**

Dalam konteks metodologi ini, perlu ditegaskan hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian. Karena lokus penelitian tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Sumatera Barat, maka beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari temuan penelitian tidak bisa digeneralisir ke beberapa daerah yang lain.

### BAB 3 PROFIL PEREMPUAN DI TIGA KABUPATEN KOTA VERSI DATA SEKUNDER

Untuk tingkat kabupaten kota sebagaimana telah disebutkan dalam bagian metodologi, penelitian ini dilakukan di kota Padang, Padang Pariaman, dan kabupaten Agam. Data yang dipaparkan adalah berupa data sekunder yang dihimpun dari berbagai instansi, BPS, BKKBN, Pengadilan Agama, Kantor Polisi, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Data tersebut meliputi data tentang komposisi penduduk, kesehatan, perceraian, serta kejahatan terhadap perempuan dan anak.

#### **3.1 Komposisi Penduduk**

Komposisi penduduk seperti disebutkan sebelumnya, merupakan susunan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Analisis demografi tidak dapat mengabaikan komposisi penduduk. Dalam hal ini komposisi penduduk dilihat dari karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan di ketiga kabupaten kota.

##### **3.1.1 Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir ditemukan jumlah penduduk laki-laki kota Padang adalah 351.570 jiwa dan perempuan 361.672 jiwa sehingga diperoleh *sex ratio* sebesar 97,2. Di Padang Pariaman jumlah laki-laki adalah 207.367 jiwa dan perempuan 225.423 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 92,0. Kemudian kabupaten Agam jumlah laki-laki adalah 198.933 jiwa dan perempuan 216.039 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 92,1. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan di lokasi penelitian lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Data tabel 1 juga menunjukkan bahwa penduduk umur 0 tahun hingga 14 tahun, dan penduduk umur 40 tahun sampai 54 tahun di kota Padang mempunyai *sex ratio* yang lebih dari 100, dan pada umur lainnya dibawah

100. Sementara di Padang Pariaman, *sex ratio* yang lebih dari 100 hanya ditemukan pada dua kelompok umur, yaitu 5-9 tahun dan 10-14 tahun. Sedangkan Di Kabupaten Agam kelompok umur dengan *sex ratio* lebih dari 100, ditemui pada tiga kelompok umur, dari umur 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan kelompok umur 10-14 tahun.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin

Umur	Padang			Padang Pariaman			Agam		
	L	P	SR	L	P	SR	L	P	SR
0-4	36 304	36 037	100,7	22 275	24 321	91,6	23 120	22 048	104,9
5-9	35 707	33 554	106,4	26 938	25 331	106,3	23 435	22 485	104,2
10-14	42 076	34 078	123,5	27 903	26 936	103,6	24 803	23 595	105,1
15-19	31 007	44 999	68,9	22 495	24 299	92,6	21 916	23 185	94,5
20-24	42 076	48 183	87,3	12 919	15 182	85,1	13 189	14 702	89,7
25-29	31 007	33 854	91,6	11 781	14 287	82,5	12 381	14 136	87,6
30-34	26 748	28 563	93,6	11 749	13 296	88,4	11 726	12 989	90,3
35-39	24 541	25 010	98,1	12 423	14 327	86,7	12 379	13 958	88,7
40-44	22 276	21 433	103,9	11 772	13 368	88,1	11 905	12 842	92,7
45-49	17 796	16 112	110,5	10 498	11 632	90,2	10 627	11 471	92,6
50-54	10 590	9 973	106,2	8 360	9 124	91,6	7 641	8 278	92,3
55-59	7 964	8 111	98,2	6 203	7 473	83,0	6 284	7 895	79,6
60-64	6 865	7 457	92,1	6 723	8 226	81,7	6 581	8 475	77,7
65-69	4 195	5 503	76,2	4 617	6 383	72,3	4 969	7 012	70,9
70-74	3 621	4 489	80,7	4 169	5 655	73,7	4 383	6 495	67,5
75+	2 636	4 316	61,1	3 092	5 583	55,4	3 594	6 473	55,5
Jumlah	351570	361672	97,2	207367	225423	92,0	198933	216039	92,1

Sumber: BPS Hasil Sensus Tahun 2000

Dilihat dari dimensi umur, secara ekonomis jumlah penduduk dapat dikelompokkan atas tiga bagian besar, belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-64 tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Berdasarkan hal ini juga dapat dihitung beban ketergantungan (*dependency ratio*). Dari data tabel 1 diperoleh angka beban tanggungan di kota Padang sebesar 51,44, di Padang Pariaman sebesar 74,43, dan di kabupaten Agam sebesar 62,83. Angka tersebut menunjukkan bahwa beban tanggungan di Padang Pariaman dan kabupaten Agam termasuk besar. Artinya tiap 100 orang usia produktif di Agam harus menanggung 62,83 orang yang tidak produktif, sedangkan di Padang Pariaman lebih besar lagi yaitu tiap 100 orang produktif harus menanggung 74,43 orang yang tidak produktif. Diantara penduduk tidak produktif tersebut adalah

penduduk berumur tua atau lansia, jumlah ini ditemukan di Padang sebesar 3,47 persen terdiri dari 1,46 persen laki-laki dan 2,01 persen perempuan, di Padang Pariaman 6,87 persen, 2,77 persen laki-laki dan 4,10 persen perempuan, sedangkan jumlah lansia di Agam angkanya lebih besar dibanding kedua daerah pertama yaitu 8,34 persen, 3,28 persen laki-laki dan 5,06 perempuan. Bila dilihat dari perbandingan lansia berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Artinya angka harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding laki-laki.

### **3.1.2 Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan**

Data tabel 20 hasil sensus tahun 2000 menunjukkan laki-laki yang mencari pekerjaan di kota Padang dan Padang Pariaman lebih banyak daripada perempuan yang mencari pekerja. Sebaliknya di kabupaten Agam jumlah pencari kerja justru lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Dari tabel 2 juga dapat dilihat distribusi laki-laki dan perempuan yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Di kota Padang proporsi terbesar penduduk yang bekerja terserap dalam sektor jasa, baik laki maupun perempuan. Sektor lain yang termasuk besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan. Sedangkan dilihat dari perbandingan jenis kelamin untuk kedua sektor tersebut proporsi perempuan yang terserap di dalamnya relatif lebih besar. Sementara di Padang Pariaman, penyerapan tenaga kerja yang dominan secara berurutan adalah dalam sektor pertanian, kemudian perdagangan dan jasa, dengan proporsi penyerapan tenaga kerja laki-laki relatif lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja perempuan. Sama halnya dengan di Padang Pariaman, penyerapan tenaga kerja yang dominan secara berurutan di kabupaten Agam adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Meskipun demikian dilihat dari proporsi penduduk yang terserap dalam lapangan kerja yang ada berbeda di kedua wilayah. Di kabupaten Agam hampir separoh dari penduduk

yang bekerja terserap di sektor pertanian, atau sekitar 10 persen lebih besar daripada di Padang Pariaman.

Tabel 2 Jumlah Penduduk 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan

Ket	Padang				Padang Pariaman				Agam			
	Lk	%	Pr	%	Lk	%	Pr	%	Lk	%	Pr	%
1	13698	55,33	11057	44,66	4059	52,23	3711	47,76	4551	35,18	8385	64,81
2	128124	44,67	53210	55,34	48987	47,77	131910	52,24	89929	64,82	68270	35,19
a.	8372	6,53	2006	3,78	18592	37,95	49956	37,87	43564	48,11	32998	48,33
b.	488	0,38	130	0,24	790	1,61	2212	1,68	3277	3,64	2435	3,57
c.	4317	2,67	168	0,32	161	0,33	2844	2,16	1821	2,02	294	0,43
d.	605	0,47	215	0,40	361	0,74	1055	0,80	476	0,53	305	0,45
e.	3149	2,46	639	1,20	3571	7,29	10927	8,28	6830	7,59	5171	7,57
f.	10421	8,13	2952	5,55	4197	8,57	8426	6,39	3780	4,20	4393	6,44
g.	27934	21,80	14564	27,37	11417	23,31	26163	19,83	12232	13,60	10484	15,36
h.	62036	48,42	32142	60,41	9655	19,71	25321	19,20	13969	15,53	12041	14,70
i.	10802	8,43	394	0,74	243	0,50	5006	3,80	3980	4,43	149	0,22

Sumber. BPS Hasil Sensus Tahun 2000

Keterangan

1 Mencari kerja, 2 Bekerja: a. Pertanian, b. Perkebunan, c. Perikanan, d. Peternakan  
e. Pertanian lainnya, f. Industri pengolahan, g. Perdagangan, h. Jasa, i. Angkutan

Dilihat dari distribusi penduduk yang bekerja, perempuan yang bekerja di daerah penelitian sudah relatif banyak, terutama di Padang Pariaman. Lapangan pekerjaan yang dominan menyerap tenaga kerja di daerah perkotaan, Padang, adalah sektor jasa dan perdagangan. Sedangkan di daerah kabupaten adalah sektor pertanian, baru kemudian perdagangan dan jasa.

### 3.1.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

Merujuk pada hasil SUSENAS 2002 yang ada di tabel 3, ternyata penduduk yang berpendidikan tinggi proporsinya sangat kecil, dan baru terkonsentrasi pada jenjang pendidikan menengah. Sementara yang memiliki ijazah Diploma satu sampai Diploma tiga jumlahnya relatif kecil, baik perempuan maupun laki-laki berkisar antara 1,83 persen sampai 4,46 persen. Tetapi penduduk yang memiliki ijazah Diploma empat atau sarjana penuh, khusus untuk kota Padang jumlahnya sedikit lebih besar, laki-laki (10,31 persen), dan perempuan (7,10 persen). Sedangkan di Agam dan Pariaman penduduk yang memiliki ijazah sarjana/Diploma IV

jumlahnya relatif sedikit. Selanjutnya dilihat dari yang tidak punya ijazah, jumlah perempuan tetap lebih banyak dibanding laki-laki yang tidak memiliki ijazah untuk ketiga lokasi penelitian, tetapi yang terbanyak ditemukan di Padang Pariaman, masing-masing laki-laki tidak punya ijazah (27,84 persen), perempuan (44,68 persen).

Meskipun demikian, bila dilihat dari perbandingan persentase perempuan yang berijazah untuk ketiga lokasi penelitian sudah lebih besar dibanding yang berijazah untuk ketiga lokasi penelitian. Sebagian besar atau lebih dari separoh, perempuan sudah berijazah meski terkonsentrasi pada pendidikan menengah seperti disebutkan di atas.

Tabel 3 Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

No.	Klasifikasi Ijazah	Padang		Pariaman		Agam	
		Lk (%)	Pr (%)	Lk (%)	Pr (%)	Lk (%)	Pr (%)
1.	Tidak punya ijazah	15,04	16,41	36,82	44,68	27,20	31,51
2.	SD/MI	17,45	19,35	27,84	24,01	27,91	29,56
3.	SMTp	22,36	17,79	16,17	13,63	22,16	19,82
4.	SMTA	31,98	32,89	15,73	11,83	18,12	15,64
5.	D II/III/IV	2,87	4,46	1,97	4,19	1,83	2,32
6.	D IV sd. UNIV.	10,31	7,10	1,47	1,66	2,79	1,16

Sumber : BPS, SUSENAS 2002, Provinsi Sumatera Barat.

Selain eksplanasi tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dipaparkan pula proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dari segi kemampuan baca tulis. Temuan yang terekam pada tabel 4, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak dapat baca tulis terbesar di Padang Pariaman dan terkecil di Padang.

Tabel 4 Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis

No.	Kabupaten/ Kota	Dapat Baca Tulis				Tidak Dapat Baca Tulis	
		Huruf Latin		Huruf Lainnya		Lk (%)	Pr (%)
		Lk (%)	Pr (%)	Lk (%)	Pr (%)		
1.	Padang	97,6	96,13	1,38	1,70	1,02	2,18
2.	Pariaman	94,21	88,65	2,18	3,82	3,62	7,53
3.	Agam	95,82	93,76	0,74	0,76	2,43	5,47

Sumber : BPS, SUSENAS, 2002 Provinsi Sumbar.

Sehubungan dengan temuan tentang pendidikan di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan; (a) berdasarkan komparasi tingkat pendidikan menengah dan tinggi antar kabupaten-kota, Padang lebih baik dari dua daerah lainnya, (b) jumlah yang tidak memiliki ijazah, maupun yang tidak bisa baca tulis relatif lebih banyak dari penduduk perempuan dibandingkan laki-laki, meskipun demikian secara keseluruhan tingkat pendidikan perempuan sudah lebih baik dari jumlah yang berijazah dan yang tidak berijazah, dan (c) data tersebut juga memberikan indikasi telah terjadi pergeseran paradigma bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya hanya akan bersentuhan dengan sektor domestik.

### **3.2 Kesehatan**

Profil perempuan dan anak dalam bidang kesehatan di kabupaten-kota lokasi penelitian difokuskan pada rata-rata jumlah anak lahir hidup per perempuan, pasangan usia subur (PUS) dan partisipasinya dalam KB, status gizi bayi dan anak balita, serta angka kematian bayi.

#### **3.2.1 Rata-rata Jumlah Anak Lahir hidup Per Perempuan Berdasarkan Umur**

Rata-rata anak lahir hidup per perempuan berdasarkan kelompok umur menunjukkan makin tua usia perempuan, rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki makin banyak. Kecenderungan ini sama untuk ketiga lokasi penelitian. Paritas seorang perempuan setelah habis masa reproduksinya berkisar antara 4,83 sampai 5,89 (rata-rata fertilitas pada kelompok umur 50-54 tahun). Paritas tertinggi ditemukan di Padang Pariaman. Artinya rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang perempuan di Padang Pariaman setelah habis masa reproduksinya adalah sebanyak 5,89 atau enam orang setelah pembulatan.



Tabel 5 Rata-rata Anak Lahir Hidup, dan Masih Hidup Per Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2000

Umur	Padang		Padang Pariaman		Agam	
	LH	MH	LH	MH	LH	MH
10-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-19	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
20-24	0,22	0,21	0,42	0,31	0,43	0,45
25-29	0,98	0,95	1,47	1,11	1,38	1,39
30-34	2,05	1,98	2,76	2,10	2,51	2,45
35-39	3,08	2,95	4,01	3,17	3,58	3,43
40-44	3,86	3,65	5,02	4,03	4,31	4,03
45-49	4,37	4,06	5,57	4,46	4,73	4,34
50-54	4,83	4,38	5,89	4,77	5,01	4,45

Sumber: BPS Hasil Sensus Tahun 2000

Dari data tabel 5 juga tampak rata-rata anak yang masih hidup mengalami penurunan mulai dari kelompok 20-24 tahun ke atas. Selisih terbesar antara jumlah lahir hidup dengan anak yang masih hidup yang dimiliki oleh setiap perempuan di ketiga lokasi penelitian adalah pada kelompok umur 50-54, berkisar antara 0,45 sampai 1,12 per perempuan.

Data fertilitas menurut karakteristik lain, seperti fertilitas menurut pendidikan dan lapangan pekerjaan, dalam analisis data sekunder di tingkat kabupaten kota daerah penelitian tidak dapat dikemukakan. Hal ini karena struktur data distribusi anak lahir hidup dan masih hidup yang ada pada publikasi BPS hasil sensus tahun 2000 tidak dilengkapi dengan karakteristik lainnya. Meskipun secara teoritis dapat dilakukan namun cukup rumit dalam perhitungan. Sementara itu, dalam analisis data primer di daerah penelitian, fenomena fertilitas yang dikemukakan dilihat dari berbagai karakteristik, seperti pendidikan, usia kali pertama kawin, dan pekerjaan.

### 3.2.2 Pasangan Usia Subur (PUS), dan Kesertaannya dalam KB

Data tabel 6 memberi penjelasan bahwa kesertaan PUS dalam program KB di ketiga lokasi penelitian menunjukkan angka partisipasi yang besar, berkisar antara 56,14 persen sampai 60,10 persen. Partisipasi

tertinggi adalah di kabupaten Agam, sedangkan Padang dan Pariaman menunjukkan angka yang berimbang.

Terkait dengan partisipasi PUS dalam program KB, menunjukkan proporsi perempuan dalam program KB dengan biaya sendiri cukup besar, yang dapat diartikan inisiatif yang sangat besar dari perempuan. Dalam hal ini Agam tampak lebih menonjol dibandingkan dua daerah lainnya (57,73 persen). Sementara Padang sebagai sebuah kota besar justru menunjukkan angka yang lebih rendah yaitu 27,15 persen.

Tabel 6 Jumlah PUS dan Partisipasinya Dalam KB

No	Keterangan	Padang *	Padang ** Pariaman	Agam *
1	PUS	101.432	52431	54598
2	PUS tidak Peserta KB	44662	21804	21784
3	PUS Peserta KB Pemerintah	41356	18004	13870
4	PUS Peserta KB Swasta	15414	<b>12623</b>	18944

Sumber: Pendataan Keluarga kabupaten Kota, BKKBN

\* Data tahun 2001

\*\*Data per februari 2003

Disisi lain kesertaan laki-laki dalam program KB untuk daerah Sumatera Barat masih sangat rendah, hanya 0,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab reproduksi lebih besar pada pihak perempuan. Dengan kata lain, bila keluarga ingin mengikuti program KB, secara otomatis pesertanya adalah perempuan. Karena selain alat-alat kontrasepsi direduksi untuk perempuan, juga karena masih dominannya nilai patriarkhi di dalam masyarakat. Sehingga resiko penggunaan alat kontrasepsi juga lebih banyak dialami perempuan.

Meskipun demikian, program KB masih merupakan salah satu alternatif terbaik saat ini untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Karena dengan "ber KB" beban reproduksi perempuan secara biologis dapat dikurangi. Yang perlu diupayakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan kontinuitas konsultasi pasca pemasangan alat KB. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan terhadap

alat kontrasepsi dan mempunyai pengetahuan tentang efek samping penggunaan alat kontrasepsi.

### 3.2.3 Status Gizi Bayi Baru Lahir dan Gizi Anak Balita

Status gizi bayi dan anak balita juga merupakan indikator tentang kualitas hidup dan derajat kesehatan perempuan. Dari data tabel 7 dapat dilihat jumlah BBLR (Berat Badan Bayi Lahir Rendah) terbesar ditemukan di Kabupaten Agam, meskipun angkanya relatif kecil yaitu 1,64 persen. Dimensi lain yang dapat dilihat dari data tabel 7 adalah status gizi anak balita, bila dijumlahkan antara balita yang bergizi buruk dengan bergizi kurang di ketiga lokasi penelitian jumlahnya relatif sama berkisar antara 13,28 persen sampai 15,4 persen.

Tabel 7 Status Gizi Bayi Baru Lahir dan Anak Balita Daerah Penelitian Tahun 2001

Jumlah Bayi, Balita dan Status Gizi	Padang		Padang Pariaman		Agam	
	f	%	F	%	f	%
1. Jumlah bayi	12539	100	6990	100	7538	100
• BBLR	19	0,15	75	0,01	123	1,64
2. Jumlah Balita	5128	100	7902	100	4026	100
a. Gizi buruk	138	2,69	159	2,17	79	1,96
b. Gizi kurang	652	12,71	937	12,80	456	11,32
c. Gizi baik	4243	82,74	6138	77,67	3395	84,32
d. Gizi lebih	95	1,85	97	1,22	96	2,38

*Data diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota*

### 3.2.4 Kelahiran dan kematian bayi

Kelahiran dan kematian bayi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas hidup, dan derajat kesehatan perempuan. Dalam kaitan ini seperti dikemukakan sebelumnya ada hipotesis yang menyatakan bahwa makin tinggi angka kematian bayi menunjukkan kualitas hidup perempuan yang rendah. Artinya angka kematian bayi merupakan cerminan kondisi kesehatan dan gizi perempuan terutama pra hamil, hamil dan pasca kehamilan. Secara lebih rinci besarnya angka kelahiran, dan kematian bayi terangkum dalam tabel 8.

Tabel 8 Kelahiran Bayi, dan Kematian Bayi di Daerah Penelitian Tahun 2001

No	Keterangan	Padang	Padang Pariaman	Agam
1	Lahir Hidup	12607	7861	7538
2	Lahir Mati	3	31	58
3	Jumlah bayi mati	30 (2,38/1000)	49 (6,23/1000)	50 (6,63/1000)
4	Jumlah bayi mati baru lahir	17 (1,35/1000)	27 (3,43/1000)	40 (5,31/1000)
5	Jumlah bayi mati lepas baru lahir	13 (1,03/1000)	22 (2,80/1000)	10 (1,33/1000)

Data diolah dari *Profil Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan 2002*

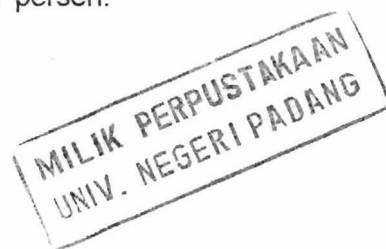
Dari data tabel 8 tampak bahwa jumlah lahir hidup di kota Padang relatif lebih banyak dibanding di Pariaman, dan Agam. Karena jumlah penduduk Padang juga lebih banyak. Tetapi dilihat dari tingkat kematian bayi, maupun jumlah lahir mati yang teridentifikasi di Dinas Kesehatan kabupaten kota menunjukkan Agam lebih dominan. Fakta ini memberikan indikasi bahwa kualitas hidup dan kesehatan perempuan di Padang relatif lebih baik dibanding dua daerah lainnya. Walaupun demikian, angka-angka tersebut masih perlu dipertanyakan, karena ada beberapa angka yang tidak sinkron. Misalnya dalam "*Profil Kesehatan Kota Padang*", pada bab IV tentang "*Pencapaian Pembangunan Kesehatan*" dinyatakan bahwa AKB kota Padang tahun 2001 adalah 26,1 perseribu kelahiran hidup. Sementara yang tertera pada data mentah, masih dalam Profil kesehatan Kota Padang, jumlah AKB jauh lebih kecil yaitu 30 dari 12607 kelahiran hidup, atau dari perhitungan peneliti sebanyak 2,38 perseribu kelahiran hidup. Persoalan yang sama juga dapat dicontohkan untuk AKB di Pariaman dalam usulan *Master Plan Peningkatan Kesehatan*, dinyatakan bahwa AKB tahun 2002 adalah 39/1000 kelahiran hidup, sedangkan dilihat dari angka total yang ditampilkan adalah 49/7861 kelahiran hidup. Dari laporan Dinas Kesehatanpun, angka-angka yang ada dinyatakan belum sepenuhnya dipercayai karena belum sesuai dengan mekanisme yang standar sistem Informasi Kesehatan, pelaporan yang disampaikan terbatas dari Pelayanan Puskesmas yang ada.

### 3.3 Angka Perceraian

Angka perceraian penting dikemukakan karena perceraian memiliki banyak persoalan menyangkut hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan yang berdimensi gender. Pada bagian ini dikemukakan angka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama di tiga kabupaten kota lokasi penelitian. Jumlah cerai talak, dan cerai gugat yang dikemukakan dilihat dari struktur umur, dan pekerjaan baik penggugat maupun tergugat.

#### 3.3.1 Cerai Gugat Tahun 2001 dan 2002

Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan sebagai pihak penggugat. Sehubungan dengan Cerai Gugat, dari data tabel 9 dapat dilihat bahwa, tahun 2001 struktur umur perempuan (penggugat) cenderung terdistribusi pada kelompok umur 26- 35 tahun, 36-45 tahun dan kelompok umur 16-25 tahun. Secara parsial di kabupaten Padang Pariaman, jumlah perempuan yang menggugat cerai pada umumnya (58,11 persen) adalah pada kelompok umur 26-35 tahun. Hal yang sama juga terjadi di kota Padang, jumlah perempuan yang mengajukan cerai gugat terbanyak adalah pada kelompok umur 26-35 tahun sebanyak 45,61 persen. Sementara di kabupaten Agam jumlah perempuan yang mengajukan cerai gugat terbanyak justru pada kelompok umur muda 16- 25 tahun sebanyak 40 persen. Artinya, perceraian di Kabupaten Agam lebih banyak terjadi pada keluarga yang masa perkawinannya masih relatif singkat. Perempuan yang mengajukan cerai gugat pada perkawinan muda usia juga terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus di kabupaten Agam, yaitu sebanyak 17,98 Padang Pariaman, dan kota Padang 17,57 persen.



Tabel 9 Cerai Gugat Berdasarkan Kelompok Umur  
Penggugat dan Tergugat Tahun 2001

Kel Umur	Padang Pariaman*				Kabupaten Agam**				Kota Padang*			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
16-25	13	17,57	1	1,35	8	40	3	15	41	17,98	11	4,82
26-35	43	58,11	43	58,11	7	35	8	40	104	45,61	89	39,04
36-45	13	17,57	19	25,68	4	20	6	30	74	32,46	98	42,98
46-55	5	6,76	10	13,51	0	0	2	10	8	3,51	25	10,97
55+	0	0	1	1,35	1	5	1	5	1	0,44	5	2,19
Jlh	74	100	74	100	20	100	20	100	228	100	228	100

Sumber: *Pengadilan Agama, 2001*

\*Perkara yang masuk

\*\* Perkara yang diputus

Jumlah perempuan (penggugat) dari data Cerai Gugat tahun 2002 menunjukkan jumlah penggugat, masih relatif banyak pada kelompok umur 25-36 tahun, yaitu 53,12 persen di Padang Pariaman, 73,52 persen di Kabupaten Agam, dan 48,91 persen di Kota Padang. Meskipun demikian dibandingkan dengan data Cerai Gugat tahun 2001, pada kelompok umur tertentu terjadi pergeseran jumlah penggugat, khususnya pada kelompok umur muda (16-25 tahun) ke kelompok umur yang lebih tinggi (26-35 tahun). Penurunan yang sangat drastis terjadi di Kabupaten Agam yaitu dari 40 persen turun menjadi 2,94 persen. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang penurunan hanya terjadi sekitar 4,03 persen. Jumlah penggugat yang juga relatif banyak adalah pada kelompok umur 36-45 tahun, secara berturut-turut di Padang Pariaman sebanyak 28,13 persen, Agam 17,64 persen, dan Kota Padang 28,82 persen.

Struktur umur tergugat, baik pada tahun 2001 maupun tahun 2002, di ketiga lokasi penelitian, yang dominan adalah pada kelompok umur 26-35 tahun, dan 36-45 tahun. Jumlah tergugat terbanyak adalah pada kelompok umur 26-35 tahun terdapat di kabupaten Agam. Sedangkan di Kota Padang jumlah tergugat terbanyak pada kelompok umur 36-45 tahun (41,48 persen), angka ini hampir sama dengan jumlah tergugat pada satu kelompok umur sebelumnya, 25-36 (41,05 persen). Kemudian di Pariaman, sama halnya di Agam adalah pada kelompok umur 25-36 (42,70 persen).

Tabel 10 Cerai Gugat Berdasarkan Kelompok Umur  
Penggugat dan Tergugat Tahun 2002

Kel Umur	Padang Pariaman*				Kabupaten Agam**				Kota Padang*			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
16-25	13	13,54	3	3,13	1	2,94	1	2,94	32	13,97	7	3,06
26-35	51	53,12	41	42,70	25	73,52	17	50,01	112	48,91	94	41,05
36-45	27	28,13	36	37,5	6	17,64	11	32,35	66	28,82	95	41,48
46-55	4	4,17	12	12,5	1	2,95	4	11,76	14	6,12	25	10,92
55+	1	1,04	4	4,17	1	2,95	1	2,94	5	2,18	8	2,49
	96	100	96	100	34	100	34	100	229	100	229	100

Sumber: Pengadilan Agama, 2003

\*Perkara yang masuk

\*\* Perkara yang diputus

### 3.3.2 Cerai Talak Tahun 2001, dan 2002

Cerai talak adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki sebagai penggugat. Pada tahun 2001 secara absolut dari ketiga lokasi penelitian, jumlah cerai talak terbanyak ditemukan di Kota Padang. Hal ini karena jumlah penduduk Kota Padang juga lebih banyak dibanding jumlah penduduk Kabupaten Agam, maupun kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, masyarakatnya juga lebih heterogen.

Tabel 11 Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur  
Penggugat dan Tergugat Tahun 2001

Kel Umur	Padang Pariaman*				Kabupaten Agam**				Kota Padang*			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
16-25	3	6,52	14	30,44	-	-	-	-	3	2,29	13	9,92
26-35	19	41,31	14	30,44	2	18,18	4	36,36	53	40,47	58	44,28
36-45	11	23,91	10	21,74	6	54,55	3	27,28	49	37,41	43	32,83
46-55	5	10,87	4	8,69	3	27,27	4	36,36	16	6,99	13	9,92
55+	8	17,39	4	8,69	-	-	-	-	10	7,64	4	3,05
Jml	46	100	46	100	11	100	11	100	131	100	131	100

Sumber: Pengadilan Agama, 2003

\*perkara yang masuk

\*\*perkara yang diputus

Sama halnya dengan cerai gugat, struktur umur terduga (perempuan) untuk daerah Padang Pariaman dapat ditemukan pada kelompok umur 16-25, 26-35, dan kelompok umur 36-45 tahun. Sementara di kabupaten Agam ditemukan pada kelompok umur 26-35, 46-55 tahun, dan kelompok umur 36-45 tahun. Sedangkan di Kota

Padang, jumlah tergugat terutama ditemukan pada dua kelompok umur yaitu kelompok umur 26-35, dan 36-45 tahun.

Selanjutnya dilihat dari struktur umur penggugat (laki-laki) pada kasus cerai talak tahun 2001, di Padang Pariaman berada pada kelompok umur 26-35, dan 36-45 tahun. Demikian juga halnya di kota Padang. Sedangkan di Kabupaten Agam umur penggugat terkonsentrasi pada tiga kelompok umur, yaitu 36-45, 46-55, dan kelompok umur 26-35 tahun.

Selanjutnya bila dilihat data cerai talak tahun 2002 berdasarkan kelompok umur di ketiga lokasi penelitian, baik umur penggugat maupun tergugat, terkonsentrasi pada dua kelompok umur yaitu 26-35, dan 36-45 tahun. Hal yang menarik dari data cerai talak tahun 2001, dan 2002 ternyata jumlah perceraian pada kelompok umur 55 tahun ke atas lebih tinggi dari kelompok umur muda (16-25 tahun).

Tabel 12 Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur Penggugat dan Tergugat 2002

Kel Umur	Padang Pariaman				Kabupaten Agam				Kota Padang			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
16-25	4	6,67	9	15,00	1	7,14	2	14,29	-	-	12	8,93
26-35	27	45,00	31	51,67	6	42,86	6	42,86	50	40,65	53	44,71
36-45	17	28,33	11	18,33	5	35,71	5	35,71	41	32,52	40	32,52
46-55	2	3,33	3	5,00	-	-	-	-	19	16,25	9	7,32
55+	10	16,67	6	10,00	2	14,29	1	7,14	13	10,58	9	7,32
Jml	60	100	60	100	14	100	14	100	123	100	123	100

Sumber: Pengadilan Agama, 2003

\*perkara yang masuk

\*\*perkara yang diputus

Terkait dengan struktur umur penggugat, tergugat dalam kasus perceraian terlihat bahwa ada kecenderungan perceraian relatif banyak terjadi pada kelompok umur muda, 16 – 35 tahun. Hal ini memberikan indikasi perceraian banyak terjadi pada usia perkawinan yang relatif pendek, atau dalam kisaran sepuluh tahun.



### 3.3.3 Cerai Gugat Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2001, dan 2002

Dari dimensi pekerjaan sebagaimana terangkum dalam tabel 13, penggugat terbanyak di ketiga lokasi penelitian adalah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, yaitu 71,62 persen di Padang Pariaman, 75 persen di Agam, dan 60,09 di Padang. Temuan ini menjadi pertanyaan besar bagi peneliti mengapa dengan kondisi yang tidak bekerja, perempuan pada tiga lokasi penelitian berani mengajukan gugat cerai.

Sisi menarik lain dari data cerai gugat dilihat dari pekerjaan penggugat, di Pariaman dan Agam juga dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai PNS. Masing 12,16 persen, dan 20 persen. Sementara di kota Padang, pekerjaan penggugat terbanyak kedua adalah swasta, 18,86 persen. Dengan demikian kasus cerai gugat dilihat dari pekerjaan penggugat justru terjadi pada dua spektrum yang diametral, yaitu mereka yang tidak bekerja, dan mempunyai pekerjaan tetap.

Tabel 13 Cerai Gugat berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2001

Pekerjaan	Padang Pariaman*				Kabupaten Agam**				Kota Padang*			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tani/N	-	-	7	9,46	1	1,35	6	30	1	0,44	2	0,88
PNS/A/P	9	12,16	7	9,46	4	20	3	15	37	16,23	29	12,72
Dagang	3	4,05	14	18,92	-	-	4	20	6	2,63	6	2,63
Jasa	2	2,70	13	17,57	-	-	3	15	3	1,32	12	5,26
R. tangga	53	71,62	-	-	15	75	-	-	137	60,09	-	-
Tdk kerja	-	-	2	2,70	-	-	-	-	1	0,44	7	3,07
Swasta	6	8,11	26	35,14	-	-	4	20	43	18,86	172	75,44
T. Tahu	1	1,35	5	6,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	74	100	74	100	20	100	20	100	228	100	228	100

Sumber: Pangadilan Agama, 2003

\*perkara yang masuk

\*\*perkara yang diputus

Dari sisi pekerjaan tergugat pada kasus cerai gugat, jumlah terbanyak terjadi pada mereka yang bekerja di sektor swasta, masing-masing 35,14 persen, 75,44 persen. Kecuali di Agam pekerjaan tergugat terbanyak adalah petani, 30 persen. Nomor dua terbanyak, pekerjaan tergugat bervariasi untuk setiap daerah, di Pariaman dagang (18,92 persen), di Agam dagang dan swasta (masing-masing 20 persen), dan di

Padang adalah tergugat yang bekerja sebagai PNS/ABRI/Pensiunan, 12,72 persen.

Tidak jauh berbeda dengan fenomena gugat cerai tahun 2001, pada tahun 2002 dari data tabel 14 juga terlihat bahwa pekerjaan penggugat yang dominan mengajukan gugat cerai adalah ibu rumah tangga. Masing-masing di Padang Pariaman 71,88 persen, di Agam 50 persen, dan di Padang 51,97 persen. Pekerjaan penggugat terbanyak kedua adalah yang bekerja di sektor swasta, khususnya Padang Pariaman, dan Padang. Masing-masing 10,42 persen, dan 24,45 persen. Sementara di Agam adalah yang bekerja sebagai PNS dan pensiunan, 14,71 persen.

Tabel 14 Cerai Gugat Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2002

Pekerjaan	Padang Pariaman				Kabupaten Agam				Kota Padang			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tani/N	-		2	2,08	3	8,82	8	23,53	-	-	1	0,44
PNS/A/P	9	9,38	4	4,16	5	14,71	4	11,76	42	18,34	39	17,03
Dagang	8	8,33	20	20,83	2	5,88	3	8,82	8	3,49	19	8,30
Jasa	-	-	18	18,75	4	11,76	4	11,76	3	1,31	31	13,54
R. tangga	69	71,88	-	-	17	50,0	-	-	119	51,97	-	-
Tdk kerja	-	-	4	4,16	-	-	-	-	1	0,44	7	3,06
Swasta	10	10,42	48	50,0	3	8,82	15	44,12	56	24,45	132	57,64
T. Tahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	96	100	96	100	34	100	34	100	229	100	229	100

Sumber: *Pangadilan Agama, 2003*

\*perkara yang masuk

\*\*perkaran yang diputus

Dilihat dari pekerjaan tergugat pada kasus cerai gugat tahun 2002, pekerjaan tergugat terbanyak di ketiga lokasi penelitian adalah yang bekerja di sektor swasta. Masing-masing di Pariaman 50 persen, di Agam 44,12 persen, dan di Padang 57,64 persen. Berikutnya gugat cerai terbanyak dilakukan oleh mereka yang bekerja sebagai pedagang (20,83 persen) di Pariaman, petani (23,53 persen) di Agam, dan PNS/ABRI/Pensiunan (17,03 persen) di kota Padang.

### 3.3.4 Cerai Talak Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2001, dan 2002

Dalam kasus cerai talak tahun 2001 pada data tabel 15, pekerjaan penggugat untuk Padang dan Padang Pariaman didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor swasta, dengan proporsi 60,30 persen, 32,60 persen. Sedangkan penggugat yang bekerja sebagai PNS menjadi yang dominan di Kabupaten Agam. Kasus terbanyak kedua dalam cerai talak dilakukan oleh PNS/ABRI/Pensiunan di Padang Pariaman 26,08 persen, dan di Padang 26,71 persen. Sementara di Agam adalah mereka penggugat yang bekerja di sektor jasa, dan dagang, masing-masing 18,18 persen.

Tabel 15 Cerai Talak berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2001

Pekerjaan	Padang Pariaman*				Kabupaten Agam**				Kota Padang*			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tani/N	6	13,04	-	-	1	9,09	-	-	4	3,05	-	-
PNS/A/P	12	26,08	9	19,56	5	45,45	4	36,36	35	26,71	28	21,37
Dagang	6	13,04	1	2,17	2	18,18	-	-	-	-	-	-
Jasa	5	10,86	-	-	2	18,18	-	-	12	9,16	2	1,52
R. tangga	-	-	33	71,73	-	-	6	54,54	-	-	92	70,22
Tdk kerja	1	2,17	-	-	-	-	-	-	1	0,76	1	0,76
Swasta	15	32,60	2	4,34	1	9,09	1	9,09	79	60,30	8	6,10
T. Tahu	1	2,17	1	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	46	100	46	100	11	100	11	100	131	100	131	100

Sumber: Pengadilan Agama, 2003

\*perkara yang masuk

\*\*perkara yang diputus

Dilihat dari sisi pekerjaan tergugat pada kasus cerai talak 2001 untuk seluruh lokasi penelitian didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Masing-masing 71,73 di Padang Pariaman, 54,54 di Agam, dan 70,22 di Padang. Berikut adalah tergugat yang bekerja sebagai PNS, baik di Padang Pariaman, Agam maupun di Padang.

Data cerai talak tahun 2002 dari data tabel 16 menunjukkan bahwa pekerjaan penggugat yang dominan adalah mereka yang bekerja di sektor swasta. Hal ini terjadi di ketiga lokasi penelitian, masing-masing 38,33 persen di Padang Pariaman, 50 persen di Kabupaten Agam, dan 47,96 persen di Kota Padang. Pekerjaan penggugat terbanyak berikutnya

adalah PNS/ABRI/Pensiunan, yaitu 26,66 persen di Padang Pariaman, 28,57 persen, 38,21 persen di Kota Padang.

Sama dengan fenomena cerai talak pada tahun 2001, pekerjaan tergugat yang dominan adalah mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, masing-masing 78,33 persen di Padang Pariaman, 50 persen di Kabupaten Agam, dan 68,29 persen di Kota Padang. Demikian juga halnya dengan pekerjaan tergugat terbanyak berikutnya adalah sebagai PNS.

Tabel 16 Cerai Talak Berdasarkan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat Tahun 2002

Pekerjaan	Padang Pariaman				Kabupaten Agam				Kota Padang			
	Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat		Penggugat		Tergugat	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tani/N	4	1,66	-	-	2	14,28	-	-	1	4,37	-	-
PNS/A/P	16	26,66	7	11,66	4	28,57	1	7,14	47	38,21	28	22,76
Dagang	10	16,66	3	5,00	-	-	5	35,71	8	6,50	1	4,37
Jasa	7	11,66	-	-	1	7,14	-	-	7	5,69	1	4,37
R. tangga	-	-	47	78,33	-	-	7	50,00	-	-	84	68,29
Tdk kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,37	-	-
Swasta	23	38,33	3	5,00	7	50,00	1	7,14	59	47,96	9	7,31
T. Tahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	60	100	60	100	14	100	14	100	123	100	123	100S

Sumber: Pengadilan Agama, 2003

\*perkara yang masuk

\*\*perkara yang diputus

Berangkat dari semua temuan yang terkait dengan perceraian beberapa catatan penting dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dibanding kasus cerai talak. *Kedua*, cerai talak maupun cerai gugat yang relatif banyak terjadi pada umur muda membawa konsekwensi tersendiri bagi perempuan, karena mereka akan berstatus janda pada usia yang relatif muda yang secara sosial tidak menguntungkan. *Ketiga*, beban ekonomi yang ditanggung oleh perempuan sebagai implikasi dari perceraian yang terjadi akan semakin berat, karena data yang ada menunjukkan perempuan bercerai dominan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu anak-anak dominan menjadi tanggung jawab perempuan janda. Hal ini diperkuat dari pengamatan peneliti bahwa, bekas suami terkadang tidak menafkahi anak-anaknya.

Meskipun disisi lain, ada nilai positif yang bisa dimaknai dari kasus ini bahwa, perempuan memiliki kemandirian, keberanian dalam membuat keputusan. *Keempat*, data temuan menyangkut cerai talak dan cerai gugat memberi membenaran bahwa perceraian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat terdidikpun rentan terhadap perceraian. *Kelima*, dari perbandingan dimensi penggugat dan tergugat, ternyata perceraian pada kelompok umur tua, jumlah penggugat (laki-laki) lebih banyak dibanding tergugat. Artinya “kehangatan” rumah tangga cenderung berkurang disaat perempuan, dan pasangannya berusia senja. Temuan ini juga diperkuat oleh pengamatan peneliti dalam kehidupan masyarakat keseharian, pada saat anak-anak mereka mulai dewasa ataupun kawin, ada kecenderungan pasangan lansia tidur dalam kamar yang terpisah, atau karena perempuan pasangan lansia menginap di rumah anak-anaknya. Demikian juga halnya kunjungan bagi pasangan lansia pada saat kerabat mereka mempunyai hajatan di daerah lain/rantau, hanya diikuti oleh perempuan pasangan lansia. Asumsi ini belum dapat menjawab secara ilmiah tentang kecenderungan cerai talak pada usia lansia, masih perlu penelitian lebih lanjut.

Fenomena lain yang terungkap dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan salah seorang panitera Pengadilan Agama Padang Pariaman terungkap bahwa dalam kasus perceraian, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu sebab perempuan mengajukan gugat cerai. Akan tetapi dalam proses peradilan argumentasi atau alasan seperti itu tidak dimunculkan, karena memerlukan pembuktian dengan prosedural yang relatif rumit.

### 3.4 Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak

Belakangan ini berbagai tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Berangkat dari data yang diperoleh dari Kepolisian di tiga kabupaten kota, kejahatan dalam konteks ini mencakup tindak perkosaan, pencabulan, poligami, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, dan melarikan anak di bawah umur.

#### 3.4.1 Kota Padang

Tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang antara tahun 2001 dan 2002 menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari 95 kasus menjadi 167 kasus, dengan peningkatan sebesar 75,79 persen. Jumlah kasus kekerasan dan penganiayaan menjadi tindak kejahatan yang dominan, baik pada tahun 2001 maupun pada tahun 2002, dengan peningkatan sebesar 36 persen. Kasus tindak kejahatan lainnya yang juga menonjol untuk kedua tahun tersebut adalah pencabulan, dengan peningkatan 53,80 persen.

Tabel 17 Korban Tindak Kejahatan di Kota Padang  
Tahun 2001. 2002

Jenis Tindak Kejahatan	2001						2002					
	Jumlah		Anak-anak		Dewasa		Jumlah		Anak-anak		Dewasa	
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Perkosaan	5	5,26	4	4,21	1	1,05	6	3,59	3	1,80	3	1,80
Pencabulan	13	13,68	6	6,31	7	7,36	20	11,98	10	5,99	10	5,99
Poligami	3	3,16	-	-	3	3,16	13	7,78	-	-	13	7,80
Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	3	1,79	1	0,59	2	1,20
Penganiayaan	60	62,50	1	1,05	59	62,10	96	57,49	1	0,59	95	56,99
Penghinaan	5	5,26	-	-	5	5,26	15	8,98	-	-	15	8,90
Pelarian anak	9	9,47	9	9,47	-	-	14	8,38	14	8,40	-	-
Jumlah	95	100	20	21,05	75	78,95	167	100	29	17,37	138	82,63

Data diolah dari Register Reskrim Poltabes Padang, 2003

Berikut Tindak kejahatan yang meningkat sangat tajam adalah poligami dari 3 kasus tahun 2001 menjadi 13 kasus tahun 2002, atau meningkat 333,33 persen. Dilihat dari kasus poligami, jumlahnya relatif sedikit, walaupun sesungguhnya dalam kenyataan kasus ini banyak

dijumpai. Artinya banyak kasus poligami yang tidak dilaporkan. Menurut asumsi peneliti keengganan perempuan untuk melaporkan tindak poligami yang dilakukan suaminya tidak terlepas dari faktor kecemasan, ketakutan perempuan akan beban ekonomi, ketergantungan perempuan terhadap laki-laki yang sangat besar, status, sampai pada faktor aib keluarga.

Selanjutnya dilihat dari dimensi usia korban dan jenis tindak kejahatan baik tahun 2001 dan tahun 2002, tampak korban penganiayaan dominan dialami oleh orang dewasa dibanding anak-anak. Sementara tindak kejahatan perkosaan pada tahun 2001 lebih banyak dialami oleh anak-anak, dan pada tahun 2002 perkosaan lebih banyak dialami oleh orang dewasa. Demikian halnya dengan tindak kejahatan pencabulan, tahun 2001 korbannya lebih banyak orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Namun pada tahun 2002 korban tindak kejahatan pencabulan jumlahnya sama antara anak-anak dan orang dewasa.

Tabel 18 Pelaku Tindak Kejahatan di Kota Padang Tahun 2001,2002

Jenis Tindak Kejahatan	2001						2002					
	Anak-anak		Dewasa		TT		Anak-anak		Dewasa		TT	
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	F	%
Perkosaan	1	1,05	3	3,15	2	2,11	-	-	5	2,99	1	0,59
Pencabulan	-	-	11	11,58	1	1,05	4	3,29	15	8,98	1	0,59
Poligami	-	-	3	3,16	-	-	-	-	13	7,78	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,59	2	1,19
Kekerasan	-	-	53	55,78	8	8,42	-	-	80	47,59	16	9,58
Penghinaan	-	-	3	3,16	1	1,05	-	-	13	7,78	2	1,19
Melarikan	1	1,05	8	8,42	-	-	-	-	14	8,38	-	-
Jumlah	2	2,11	81	89,01	12	12,63	4	2,40	141	84,42	22	13,17

Data diolah dari *reskrim Poltabes Padang, 2003*

Dari dimensi pelaku tampak pada tabel 18 bahwa, tindak kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh orang dewasa. Pelaku anak-anak ditemui pada kasus perkosaan, pencabulan, dan melarikan anak di bawah umur. Artinya pelaku anak-anak terjebak pada kasus pergaulan bebas. Jumlah tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak memang relatif kecil akan tetapi hal ini perlu diwaspadai

sebagai suatu sinyal ke depan untuk mengantisipasi meningkatnya kejahatan anak.

### 3.4.2 Kabupaten Padang Pariaman

Tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman periode 2001-2003 didominasi oleh tindak kekerasan/aniaya (36,11 persen). Kasus menonjol berikutnya adalah poligami (22,22 persen), disusul kemudian tindak kejahatan perkosaan (19,44 persen). Ketiga tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Khusus untuk tindak perkosaan korbannya tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga dialami anak-anak (tiga dari tujuh kasus).

Tabel 19 Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2001-2003

Jenis tindak kejahatan	Korban						Pelaku							
	Jumlah		Anak-anak		Dewasa		Jumlah		Anak-anak		Dewasa		Tidak tahu	
	F	%	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Perkosaan	7	19,44	3	8,33	4	11,11	12	26,66	-	-	10	22,22	2	4,44
Pencabulan	4	11,11	2	5,55	1	2,77	4	8,89	1	2,22	3	6,66	-	-
Poligami	8	22,22	-	-	8	22,22	8	17,78	-	-	8	17,78	-	-
Pembunuhan	1	2,77	1	2,77	-	-	1	2,22	-	-	1	2,22	-	-
Kekerasan/aniaya	13	36,11	1	2,77	12	33,33	16	35,56	-	-	15	33,33	1	2,23
Penghinaan	3	8,33	1	2,77	2	5,55	4	8,89	-	-	4	8,89	-	-
Total	36	100	8		28		45	100	1		41		3	

Data Diolah dari Data Rekrim Polres Padang Pariaman, 2003

Tidak jauh berbeda dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Padang, di Padang Pariaman tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak juga terkait dengan persoalan yang dipicu oleh gejala jiwa anak muda, dalam hal ini adalah kasus pencabulan (satu dari empat kasus).

### 3.4.3 Kabupaten Agam

Di wilayah Agam dalam priode 2001sampai Juli 2003 fenomena tindak kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak menunjukkan jenis yang sama dengan yang terjadi di Kota Padang, yaitu tindak kekerasan/penganiayaan (33,33 persen), pencabulan (28,58



persen), dan perkosaan (23,21 persen). Dari ketiga kasus tersebut, kasus perkosaan, kasus pencabulan dominan dialami oleh anak-anak. Sebagaimana halnya pelaku tindak kejahatan di Padang dan Padang Pariaman, orang dewasa juga pelaku dominan di Agam, kecuali kasus pencabulan juga dilakukan oleh anak-anak (satu dari enam kasus).

Temuan lain yang berbeda dengan di dua lokasi penelitian lainnya adalah tidak adanya kasus poligami yang dilaporkan ke pihak kepolisian di wilayah ini. Ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak terjadi kasus poligami. Hanya saja sebab tidak dilaporkannya kasus poligami ini belum teridentifikasi dalam penelitian ini.

Tabel 20 Tindak Kejahatan di kabuapetn Agam  
Priode Tahun 2001-2003

Jenis tindak kejahatan	Korban						Pelaku							
	Jumlah		Anak-Anak		Dewasa		Jumlah		Anak-anak		Dewasa		T tahu	
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Perkosaan	5	23,81	4	19,05	1	4,76	5	23,81	-	-	5	23,81	-	-
Pencabulan	6	28,58	6	28,58	-	-	6	28,57	1	4,76	4	19,05	1	4,76
Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembunuhan	3	14,28	-	-	3	14,28	3	14,28	-	-	1	4,76	2	9,52
Kekerasan/aniaya	7	33,33	3	14,28	4	19,05	7	33,33	-	-	7	33,33	-	-
Penghinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	21	100	13		8		21		1		17		3	

*Diolah dari data Reskrim Polres Agam, 2003*

Mencermati fenomena tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak di tiga kabupaten kota, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah: (1) kasus yang menonjol adalah kasus dimana perempuan dan anak-anak rentan, baik ditinjau dari faktor biologis maupun dari sosiologis, (2) anak-anak tidak hanya menjadi korban tetapi sekaligus juga pelaku tindak kejahatan, khususnya perkosaan dan pencabulan. Fakta ini menjadi tantangan bagi segenap komponen masyarakat, terutama keluarga untuk melakukan pembinaan kepribadian anak.

## **BAB 4**

### **PROFIL PEREMPUAN DI NAGARI**

Selain data sekunder, dalam penelitian ini juga dikemukakan data primer yang mengambil sampel di empat nagari di kabupaten Agam, dengan tipikal daerah yang berbeda. Seperti telah juga dikemukakan dalam bagian metodologi tipikal tersebut meliputi daerah nelayan, pertanian tradisional, pertanian komersial, dan daerah industri rumah tangga. Masing-masing adalah Nagari Tiku V Jorong, Nagari Tigo Koto Silungkang, Nagari Padang Luar, dan Nagari Balai Gurah. Data yang dihimpun adalah tentang karakteristik responden seperti dilihat dari struktur umur, pendidikan, pekerjaan dan anggota rumah tangganya. Selain itu juga dihimpun tentang fertilitas, mortalitas, mobilitas, dan kehidupan keagamaan.

#### **4.1 Karakteristik Responden dan Anggota Rumah Tangganya**

Profil responden dan profil anggota rumah tangga responden disusun ke dalam bentuk komposisi penduduk berdasarkan karakteristik tertentu dari masing-masing 60 rumah tangga responden di lokasi penelitian. Komposisi tersebut, menyangkut identitas responden seperti karakteristik umur, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan responden, jenis rumah dan status rumah yang ditempati responden, pendidikan dan pekerjaan suami responden. Pada bagian ini juga dikemukakan struktur umur dan jenis kelamin anggota rumah tangga responden, serta jumlah anak putus sekolah.

##### **4.1.1 Struktur Umur Responden**

Dari data tabel 21 tampak bahwa umur responden di nagari Tigo Koto Silungkang (tipikal pertanian tradisional) tersebar pada kelompok umur belum produktif penuh (15-19 tahun) sampai pada kelompok umur tidak produktif lagi (64 tahun ke atas). Jumlah terbanyak adalah pada

rumah tangga, sama halnya dengan di nagari Padang Luar, tidak terdapat responden pada dua kelompok umur awal, tetapi di daerah ini ditemukan responden pada kelompok umur tua, 70 tahun ke atas. Sedangkan jumlah terbanyak responden adalah pada kelompok umur 40–44 tahun, 26, 67 persen.

#### 4.1.2 Status Kawin, dan Umur Responden Kali Pertama Kawin

Dilihat dari status kawin di ketiga lokasi penelitian, ditemukan responden yang berstatus kawin maupun berstatus janda. Jumlah responden yang berstatus janda, masing-masing mulai dari yang terbanyak adalah di Balai Gurah 18,33 persen, Padang Luar 13,33 persen, di Tiku V Jorong 11,67 persen, dan di Tigo Koto Silungkang 10 persen. Jumlah responden yang berstatus janda di keempat nagari lokasi penelitian memang tidak terlalu besar, meskipun demikian, seperti sudah disebutkan di muka, harus disadari bahwa responden menanggung beban hidup yang makin berat.

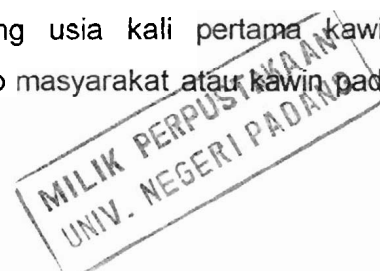
Tabel 22 Jumlah Responden Menurut Status Kawin

Status Kawin	Nagari Tigo Koto Silungkang		Nagari Tiku V Jorong		Nagari Padang Luar		Nagari Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Kawin	54	90,0	53	88,33	52	86,67	49	81,67
Janda	6	10,0	7	11,67	8	13,33	11	18,33
Jumlah	60	100	60	100,00	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Selanjutnya dilihat dari dimensi usia kali pertama kawin, ditemukan lebih dari sepertiga (berkisar antara 36,66 persen sampai 38,33 persen) responden di nagari Tigo Koto Silungkang, Padang Luar, dan Tiku V Jorong kawin pada usia yang belum matang, yaitu usia anak-anak (< 18 tahun), dan usia muda (18-19 tahun). Sedangkan di di nagari Balai Gurah, responden yang kawin pada usia muda, maupun yang kawin di usia anak-anak relatif sedikit. Masing-masing 5 persen kawin pada usia anak-anak, dan 10 persen kawin pada usia muda.

Beranjak dari temuan data tentang usia kali pertama kawin responden, sosialisasi usia kawin terhadap masyarakat atau kawin pada



usia yang matang tetap urgen untuk diberikan, terutama di kenagarian dengan tipikal pertanian tradisional, nelayan, maupun di nagari tipikal pertanian komersial dengan akses perempuan yang lebih baik terhadap berbagai bidang kehidupan. Apalagi dilihat dari struktur umur anggota rumah tangga responden di lokasi penelitian termasuk ke dalam umur muda.

Tabel 23 Frekuensi Responden Menurut Umur Kali Pertama Kawin

Umur Kali Pertama Kawin	Nagari III Koto Singgalang		Nagari Tiku V Jorong		Nagari Padang Luar		Nagari Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
< 18	10	16,66	6	10,00	7	11,67	3	5,00
18 – 19	12	20,00	17	28,33	15	25,00	6	10,00
20 – 21	19	31,67	23	38,34	11	18,33	11	18,33
> 21	19	31,67	14	23,33	27	45,00	40	66,67
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

#### 4.1.3 Kegiatan Utama responden dan Suaminya

Dilihat dari kegiatan utama yang dilakukan responden di keempat daerah lokasi penelitian dengan tipikal daerah yang berbeda, dominasi responden yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi ditemui di kenagarian Tiku V Jorong. Lebih separoh (60,00 persen) dari responden di daerah ini hanya berperan di domestik. Berdasarkan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, dinyatakan bahwa masyarakat di daerah ini masih berpegang pada "*filosofi*" hidup daerah pesisir. Seperti yang mereka tuturkan "*lai jo tadanga bunyi ombak pantang rasonyo mambulakangi langik*" (kalimat ini telah diperhalus dari aslinya). Filosofi yang demikian terimplementasikan dalam pola hidup, dan kehidupan masyarakat laki-laki maupun perempuan. Misalnya tawaran untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di daerah ini pada awal berdirinya tidak banyak mendapat respon dari masyarakat. Seperti dituturkan,

*"dulu katiko PT (Perusahaan yang mengembangkan Usaha Perkebunan Sawit) mulai bukak di siko ndak, banyak nan dimintak karajo dek ibuk, tapi angkektu ndak banyak nan amuah doh, sabauk bakarajo tani di ladang sawit, tapi kini banyak pulo nan amuah karajo PT tu, tapi ndak ditarimo laidoh, yo kami di siko*

*duduak-duduakkolah, ndak ado karajodoh. Adoh ado juo kami di siko nan karajo di PT tapi ndak bara na doh. Karajo-e kasa lonyoh buuk, di lahan manyiangi umpuik, mambuek banda. .... Ko mandatako lai ka ado bantuan ko buk ?.*

Pengaruh nyata filosofi tersebut terhadap perempuan dapat diamati pada pola hidup mereka sehari-hari. Kebanyakan mereka mulai dari pagi sampai para suami ataupun nelayan pulang melaut lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di sekitar rumah ataupun di warung-warung pinggir pantai. Mereka biasanya juga tidak memasak (nasi) pada pagi hari, cukup menyiapkan sarapan ringan seperti beli roti. Bagi yang mempunyai anak yang masih kecil sarapan atau makan pagi diberikan dari kelebihan makanan kemaren sore. Artinya banyak responden menghabiskan harinya dengan tidak menghargai waktu. Selain itu tidak banyak dari mereka yang memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya untuk ditanami tanaman seperti kunyit, jahe, sayuran, dan sebagainya, meskipun lahan yang ada cukup tersedia. Hal ini bukan berarti tidak ada diantara responden yang terlibat dalam kegiatan pertanian, 10 persen diantaranya menyatakan kegiatan utama mereka adalah bertani (berladang), dan 13,33 persen menyatakan menjadi buruh di Perkebunan Sawit.

Berbeda dengan Tiku V Jorong, di kenagarian Tigo Koto Silungkang, hampir dua pertiga responden menyatakan mempunyai kegiatan utama selain di rumah tangga. Jumlah terbanyak (45 persen) adalah bertani. Terbanyak berikutnya (31,67 persen) adalah yang menyatakan kegiatan utama mereka di rumah tangga, kemudian (13,33 persen) adalah berdagang atau berjualan. Di daerah ini tidak ditemukan responden yang bekerja di sektor industri rumah tangga. Fenomena lain yang perlu dikemukakan tentang pekerjaan responden di daerah ini adalah, selain mengolah lahan milik sendiri, jika punya waktu luang beberapa responden juga bekerja (memburuh) di lahan milik petani lain. Sementara responden yang menyatakan kegiatan utamanya adalah

rumah tangga, pada waktu-waktu tertentu juga ikut bekerja di sawah membantu suaminya. Artinya responden di daerah ini dalam kesehariannya tetap terlibat dalam kegiatan produktif terutama ke sawah, meskipun diantara mereka menyatakan bahwa bertani bukanlah sebagai kegiatan utama.

Tabel 24 Frekuensi Responden Menurut Lapangan Pekerjaan

Pekerjaan	Nagari III Koto Singgalang		Nagari Tiku V Jorong		Nagari Padang Luar		Nagari Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. R.Tangga	19	31,67	36	60,00	7	11,67	14	23,33
2. Bertani	27	45,00	6	10,00	23	38,33	10	16,67
3. Buruh	1	1,67	8	13,33	3	5,00	1	1,67
4. Jualan/dagang	8	13,33	10	16,67	19	31,67	4	6,67
5. Industri	-	-	-	-	-	-	19	31,67
6. Pegawai	3	5,00	-	-	4	6,67	12	20,00
7. Lain-lain	2	3,33	-	-	4	6,67	-	-
Jumlah	60		60	100	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Hampir sama dengan Tigo Koto Silungkang, di Padang Luar jumlah terbanyak (38,33 persen) kegiatan utama responden adalah bertani, khususnya mengusahakan hasil pertanian (sayuran) untuk dipasarkan. Kegiatan utama lainnya, selain yang menyatakan di rumah tangga, dan bertani, yang dilakukan responden di daerah ini adalah berjualan atau berdagang (31,67 persen). Karena selain daerah pertanian komersial, daerah ini sekaligus merupakan sentra perdagangan sayuran, dengan letak daerah yang cukup strategis, sehingga memberikan akses lebih luas bagi responden untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Dibanding ketiga daerah di atas, kegiatan utama yang dilakukan responden di Balai Gurah lebih variatif. Sesuai dengan tipikal daerahnya, jumlah terbanyak (31,67 persen) responden adalah bekerja di bidang industri (*Home industry*). Walaupun demikian jumlah responden yang bertani juga dominan, hampir sama dominannya dengan jumlah responden yang menyatakan pekerjaan pokoknya adalah pegawai Negeri/Swasta. Masing-masing 16,67 dan 23 persen.

Berdasarkan temuan tentang kegiatan utama yang dilakukan, pada umumnya responden di lokasi penelitian, kecuali di nagari Tiku V Jorong, berbeban ganda, karena stereotipe yang ada dalam masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Akhirnya, meskipun responden (perempuan) terlibat dalam pencaharian nafkah, kerja domestik tetap menjadi tanggung jawab responden. Kecuali di Tiku V Jorong, jumlah responden yang bekerja di rumah tangga tetap dominan setelah pekerjaan yang sesuai dengan tipikal daerah masing-masing.

Pada bagian ini juga dikemukakan tentang pekerjaan suami responden. Dari data tabel 25 tampak bahwa, kegiatan utama yang dilakukan suami responden yang cukup variatif ditemukan di tiga tempat, yaitu Balai Gurah, Padang Luar, dan Tiku V Jorong. Data tersebut juga menunjukkan, kecuali di Tiku V Jorong, kegiatan utama terbanyak yang dilakukan suami responden adalah di sektor pertanian, baik di daerah dengan tipikal pertanian maupun di daerah dengan tipikal industri rumah tangga. Sementara di Tiku V Jorong sesuai dengan tipikal daerahnya, 46,67 persen pekerjaan suami responden adalah nelayan. Diikuti berdagang sebanyak 18,33 persen, khususnya perdagangan yang terkait dengan hasil laut, pedagang ikan.

Tabel 25 Frekuensi Pekerjaan Suami Responden

Pekerjaan	Nagari III Koto Singgalang		Nagari Tiku V Jorong		Nagari Padang Luar		Nagari Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Tani	39	65,00	5	8,33	21	35,00	17	28,33
2. Buruh			8	13,33	5	8,33	-	-
3. Jualan/dagang	3	5,00	11	18,33	14	23,33	8	13,33
4. Industri RT					-	-	8	13,33
5. Pegawai	6	10,00	1	1,67	6	10,00	9	15,00
6. Lain-lain	7	11,67	28*	46,67	6	10,00	7	11,67
Jumlah	55	91,67	53	88,33	52	86,67	49	81,67

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

\* Nelayan

#### 4.1.4 Tingkat Pendidikan Responden dan Suaminya

Pendidikan, khususnya yang ditamatkan merupakan salah satu indikator utama kualitas pendidikan formal. Dari data tabel 26 tampak

bahwa pendidikan tertinggi yang ditempuh responden maupun suami responden adalah SMU tamat. Jumlah terbanyak responden yang tamat SMU ditemukan di nagari tipikal industri kecil (35%), kemudian nagari tipikal pertanian komersial (31,67%), nagari tipikal pertanian tradisional (23,33%), dan yang terendah adalah di nagari tipikal nelayan (5%). Meskipun demikian jumlah responden yang tidak tamat SD di keempat lokasi penelitian berdasarkan tipe nagari yang ada, relatif masih besar. Jumlah tersebut mulai dari yang terbanyak adalah: di nagari tipikal pertanian tradisional (41,67%), nagari tipikal nelayan (25,00%), nagari tipikal pertanian komersial (20,00%), dan terendah di nagari tipikal industri kecil (11,67%). Bila dibandingkan dengan perempuan yang tidak punya ijazah di kabupaten Agam secara keseluruhan untuk nagari tipikal industri kecil, tipikal pertanian komersial maupun tipikal nagari nelayan, persentase responden yang tidak tamat SD relatif lebih sedikit. Sebaliknya di nagari tipikal pertanian tradisional, persentase responden yang tidak tamat SD relatif lebih banyak dibanding dengan persentase perempuan yang tidak punya ijazah di kabupaten Agam secara keseluruhan.

Tabel 26 Tingkat Pendidikan Responden, dan Suaminya

Tingkat Pendidikan	Nagari Tigo Koto Silungkang				Nagari Tiku V Jorong				Nagari Padang Luar				Nagari Balai Gurah			
	Responden		Suami		Responden		Suami		Responden		Suami		Responden		Suami	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
SD TT	25	41,67	16	29,63	15	25,00	9	16,98	12	20,0	8	15,38	7	11,67	7	14,29
SD Tamat	9	15,00	20	37,04	35	58,33	36	67,92	15	25,00	20	38,46	20	33,33	15	30,61
SLTP TT	3	5,00	1	1,85	1	1,67	1	1,89	2	3,33	-	-	2	3,33	-	-
SLPT Tamat	9	15,00	4	7,41	5	8,33	3	5,66	12	20,00	8	15,38	9	15,00	12	24,49
SMU TT	-	-	1	1,85	1	1,67	-	-	-	-	-	-	1	1,67	-	-
SMU Tamat	14	23,33	12	22,22	3	5,00	4	7,55	19	31,67	16	30,77	21	35,00	15	30,61
Jumlah	60	100	54	100	60	100	53	100	60	100	52	100	60	100	49	100

Sumber: Analisis Data Primer 2003

Merujuk pada data tabel 26 bila dibuat perbandingan tingkat pendidikan responden maupun suaminya di keempat nagari lokasi penelitian, kualitas pendidikan di Tiku V Jorong relatif lebih rendah dari



pada di tiga daerah lain. Hal ini ditunjukkan konsentrasi jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh responden maupun suaminya adalah Tamat SD, dan tidak tamat SD.

#### 4.1.5 Penyakit Yang Dikeluhkan Responden Satu Tahun Terakhir

Tabel 27 Frekuensi Responden Menurut Penyakit Yang Dikeluhkan Selama satu Terakhir

Jenis Penyakit	Nagari III Koto Singgalang		Nagari Tiku V Jorong		Nagari Padang Luar		Nagari Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Hipertensi	2	3,33	1	1,67	1	1,67	1	1,67
Anemia	2	3,33	-	-	3	5,00	1	1,67
Diabetes	-	-	-	-	-	-	1	1,67
Kanker	-	-	1	1,67	1	1,67	-	-
Tumor	-	-	1	1,67	-	-	1	1,67
Alergi	1	1,67	1	1,67	-	-	-	-
Asma	2	3,33	-	-	3	5,00	-	-
Reumatik	2	3,33	1	1,67	1	1,67	5	8,33
Pendarahan	2	3,33	-	-	4	6,67	2	3,33
Gangguan Pencernaan	-	-	-	-	1	1,67	1	1,67
Ginjal	-	-	-	-	1	1,67	-	-
Tipus	1	1,67	1	1,67	1	1,67	-	-
Sakit kepala/Demam	1	1,67	-	-	3	5,00	-	-
Batuk	-	-	1	1,67	-	-	1	1,67
Muntaber	-	-	1	1,67	-	-	-	-
Jumlah	13	21,67	8	13,33	19	31,67	13	21,67

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Pada bagian ini juga dikemukakan penyakit yang dikeluhkan oleh responden satu tahun terakhir, untuk mengetahui kondisi kesehatan perempuan khususnya yang berkaitan dengan kekhasan fungsi reproduksinya. Data tabel 27 memperlihatkan jumlah terbanyak (31,67 persen) responden yang mengeluhkan menderita penyakit terdapat di nagari Padang Luar, kemudian di nagari Tigo Koto Silungkang dan Balai Gurah, masing-masing 21,67. Sementara responden yang mengeluhkan adanya penyakit nagari di Tiku V Jorong, jumlahnya relatif lebih kecil (13,33 persen).

Berdasarkan jenis penyakit yang dikeluhkan responden, penyakit yang perlu mendapat perhatian utama di lokasi penelitian adalah anemia dan pendarahan. Tanpa terkecuali di nagari Tiku V Jorong, meskipun di

daerah tersebut tidak ditemukan responden yang mengeluhkan adanya penyakit tersebut. Hal ini bukan berarti penyakit lainnya tidak perlu mendapat perhatian. Karena pendarahan dan anemia sangat erat kaitannya dengan proses reproduksi perempuan.

#### 4.1.6 Jenis Dan Status Rumah Responden

Perumahan perlu menjadi fokus penelitian ini, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang terkait erat dengan perempuan. Berdasarkan jenis rumah yang ditempati, dapat dikatakan bahwa sebagian besar sudah terpenuhi, kecuali di nagari Tiku V Jorong, dan Tigo Koto Silungkang masih ditemukan responden, dan anggota rumah tangganya yang menempati rumah gubuk. Masing-masing 11,67 dan 1,67 ( tabel 28).

Tabel 28 Frekuensi Rseponden Berdasarkan Jenis Rumah yang Ditempati

Jenis Rumah	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Permanan	27	45	15	25,0	22	36,67	30	50,0
Semi Permanen	11	18,33	26	43,33	23	38,33	12	20,0
Papan	21	35	12	20,0	15	25,0	18	30,0
Gubuk	1	1,67	7	11,67	-	-	-	-
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100

Sumber: *Analsis Data Primer, 2003*

Meskipun dari jenis rumah yang ditempati relatif sudah baik, namun bila dilihat dari status rumah yang ditempati, masih banyak responden yang menyatakan tidak menempati rumah sendiri. Rumah yang ditempati responden kebanyakan milik orang tua mereka. Selain itu ada yang menyatakan tinggal di rumah mertua, kecuali di nagari Tigo Koto Silungkang tidak ditemukan responden yang tinggal di rumah mertua. Dari data tabel 29 juga ditemukan responden yang tinggal di rumah sewa, dan lain-lain seperti tinggal di rumah dinas, khususnya di nagari Tigo Koto Silungkang, Padang Luar, dan Balai Gurah.

Tabel 29 Frekuensi Reponden Berdasarkan Status Rumah Yang Ditempati

Status Rumah	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rumah Sendiri	37	61,67	40	66,67	22	36,67	39	65
Rumah Orang Tua	16	26,67	19	31,66	21	35	15	25
Rumah Mertua	-	-	1	1,67	1	1,67	2	3,33
Rumah Saudara	-	-	-	-	1	1,67	1	1,67
Sewa	5	8,33	-	-	8	13,33	1	1,67
Lain-lain	2	3,33	-	-	7	11,67	2	3,33
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

#### 4.1.7 Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Yang dimaksud dengan anggota rumah tangga dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang masih menjadi tanggungan orang tuanya (responden), dan semua individu yang terdapat dalam rumah tersebut, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

Tabel 30 Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden

Umur	Tigo Koto Silungkang			Tiku V Jorong			Padang Luar			Balai Gurah		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
0 – 4	15	23	38	16	27	43	8	14	22	15	7	22
5 – 9	32	26	58	28	26	54	19	13	32	22	12	34
10 – 14	21	26	47	27	22	49	16	19	35	18	12	30
15 – 19	8	26	34	24	16	40	25	25	50	12	30	42
20 – 24	15	22	37	10	14	24	15	28	43	13	27	40
25 – 29	15	19	34	10	15	25	20	15	35	15	15	30
30 – 34	12	26	38	14	11	25	13	15	28	10	15	25
35 – 39	19	19	38	15	14	29	11	13	24	9	8	17
40 – 44	10	10	20	8	10	18	7	12	19	17	18	35
45 – 49	5	6	11	10	7	17	10	13	23	12	10	22
50 – 54	8	6	14	6	6	12	11	8	19	5	12	17
55 – 59	4	1	5	4	3	7	6	3	9	5	4	9
60 – 64	5	4	9	3	2	5	5	5	10	3	4	7
65 – 69	1	0	1	1	2	3	4	6	10	5	6	11
70 +	2	1	3	3	2	5	2	8	10	3	10	13
Jumlah	172	215	387	179	177	356	172	197	369	164	190	354

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Jumlah anggota rumah tangga yang terdapat di masing-masing daerah penelitian relatif sama banyak, berkisar antara 354 sampai 387 orang. Dari jumlah tersebut dapat dihitung rata-rata anggota rumah tangga, yaitu 6 orang per rumah tangga. Selanjutnya dari data tabel 30 juga dapat dilihat jumlah beban tanggungan, serta perbandingan jumlah

laki-laki dan perempuan di masing-masing daerah lokasi penelitian. Di kenagarian Tigo Koto Silungkang, dari 60 responden tersebut terdapat 387 orang anggota rumah tangga, terdiri dari 172 orang (44,44 persen) laki-laki, dan 215 orang (55,56 persen) perempuan, dan beban tanggungan sebesar 61,25. Di Tikus V Jorong terdapat 356 orang anggota rumah tangga, terdiri dari 179 orang (50,28 persen) laki-laki, dan 177 orang (49,72 persen) perempuan dengan beban tanggungan sebesar 76,24. Berikut di nagari Padang Luar terdapat jumlah anggota rumah tangga 369 orang, terdiri dari 172 orang (46,61 persen), dan 179 orang (53,39 persen), dengan beban tanggungan 41,92. Terakhir di nagari Balai Gurah terdapat 354 orang anggota rumah tangga, terdiri dari 164 orang (46,33 persen), dan 190 orang (53,67 persen) perempuan, dan beban tanggungan 59,62.

Angka di atas menunjukkan bahwa beban tanggungan di tiga lokasi penelitian termasuk baik, kecuali di Tikus V Jorong angka beban tanggungan termasuk besar. Artinya tiap 100 orang penduduk produktif menanggung 76,24 orang.

#### **4.1.8 Status Pendidikan Anak Pada Jenjang Pendidikan Dasar**

Tingkat pendidikan anak yang dikemukakan dalam penelitian ini dibatasi pada: SD tidak tamat, SD tamat, dan SLTP tidak tamat, guna melihat jumlah anak yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun, atau jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

Data tabel 31 menunjukkan bahwa bagian terbesar dari anak-anak responden, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun mulai dari yang terbanyak ditemukan di nagari tipikal pertanian tradisional (57 orang dari 60 orang responden), kemudian di nagari tipikal nelayan (40 orang dari 60 orang responden), nagari tipikal industri kecil (28 orang dari 60 orang

responden), dan nagari tipikal pertanian komersial (23 orang dari 60 orang responden).

Selanjutnya dari tabel 31 juga dapat bagian terbesar dari anak responden yang tidak menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun adalah tamat SD, kecuali di nagari tipikal pertanian tradisional. Lebih separoh dari jumlah anak yang tidak menyelesaikan pendidikan sembilan tahun di nagari tipikal pertanian tradisional adalah tidak tamat sekolah dasar. Hal ini memberi pembenaran bahwa peran orang tua terhadap anaknya sangat besar. Seperti telah disebutkan sebelumnya (lihat tabel 26) bagian terbesar responden di daerah tipikla pertanian tradisional juga tidak tamat Sekolah Dasar.

Tabel 31 Distribusi Tingkat Pendidikan Anak Responden Pada Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jenjang Pendidikan	Tigo Koto Silungkang			Tiku V Jorong			Padang Luar			Balai Gurah		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
SD TT	13	16	29	5	-	5	4	3	7	1	6	7
SD Tamat	5	15	20	14	20	34	7	9	16	15	4	19
SLTP TT	4	4	8	-	1	1	-	-	-	1	1	2
Jumlah	22	35	57	19	21	40	11	12	23	17	11	28

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Selanjutnya bila dilihat dari perbandingan anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun berdasarkan jenis kelamin, disparitas anak putus sekolah terdapat di Tigo Koto Silungkang. Lebih dari separoh anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun (wajib belajar) di daerah ini terdiri dari anak perempuan. Disparitas anak putus sekolah berdasarkan jenis kelamin juga ditemukan di nagari Balai Gurah, tetapi berbalikan dengan di nagari Tigo Koto Silungkang, lebih dari separoh anak putus sekolah pada pendidikan dasar sembilan tahun di nagari ini adalah laki-laki. Masih ditemukan anak-anak yang putus sekolah, khususnya yang tidak menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun di masing-masing nagari lokasi penelitian merupakan dilema dalam peningkatan pendidikan yang harus disikapi. Karena disisi lain pemerintah mencanagkan wajib belajar sembilan tahun. Persoalan ini tentunya juga

12/10/2013  
KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

terkait dengan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak yang juga mungkin masih rendah, karena pendidikan mereka yang juga relatif rendah sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Menyikapi gambaran tingkat pendidikan penduduk di nagari lokasi penelitian, perlu dipikirkan suatu strategi upaya pendidikan non formal yang cerdas yang dapat menyentuh baik anak-anak maupun responden (perempuan) yang putus sekolah, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat.

#### **4.2 Fertilitas dan Partisipasi Responden Dalam KB**

Fertilitas merupakan kemampuan bereproduksi yang sebenarnya dari suatu penduduk (*actual reproductive performance*), yang dapat dilihat dari jumlah anak lahir hidup yang dimiliki. Dalam hal ini adalah jumlah anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Pembahasan, dan analisis fertilitas yang dikemukakan meliputi jumlah anak lahir hidup yang dimiliki responden, rata-rata anak lahir hidup berdasarkan kelompok umur, umur perkawinan pertama, menurut pekerjaan, dan pendidikan responden. Pada bagian ini juga dikemukakan jumlah persalian yang ditolong oleh dukun beranak dan tenaga medis, keikutsertaan responden dalam KB, dan alat kontrasepsi yang digunakan responden.

##### **4.2.1 Jumlah Responden Menurut Anak Lahir Hidup**

Seperti dikemukakan di muka, fertilitas atau jumlah anak yang dilahirkan hidup merupakan salah satu indikator tentang kualitas hidup dan kesehatan perempuan. Data tabel 32 memperlihatkan bahwa jumlah anak lahir hidup yang dimiliki responden bervariasi di setiap daerah penelitian. Jumlah dominan adalah anatar 2 sampai 5 orang per responden. Data tabel 32 juga menunjukkan, kecuali di Balai Gurah, responden yang mempunyai anak lahir hidup dalam jumlah yang besar relatif masih banyak, yaitu lebih dari 40 persen. Sementara di Balai Gurah responden yang mempunyai anak lahir hidup dalam jumlah yang besar

agak lebih kecil, yaitu 31,67 persen. Selain itu juga dapat dilihat jumlah anak lahir hidup paling banyak yang dimiliki oleh responden, angka fenomenal terutama di daerah Tigo Koto Silungkang dan Tiku V Jorong, tampak diantara responden ada yang memiliki anak lahir hidup sangat banyak, 10 orang sampai 13 orang.

Wawancara mendalam tentang fertilitas dan ketidak ikutan responden dalam KB di Tigo Koto Silungkang dilakukan terhadap masing-masing satu orang responden yang mempunyai anak lahir hidup 7 orang (dikatakan sebagai subjek penelitian pertama), satu orang responden yang mempunyai anak lahir hidup 10 orang (dikatakan sebagai subjek kedua), dan satu orang responden yang mempunyai anak lahir hidup 13 orang (disebut sebagai subjek penelitian ketiga). Ketiganya adalah responden usia reproduktif yang pada saat wawancara berlangsung tidak sebagai peserta KB. Subjek pertama berumur 37 tahun, subjek kedua berumur 38 tahun, keduanya adalah pendatang dari daerah Data Munti kecamatan yang sama, Palembang, yang kawin dengan laki-laki asal daerah ini (Tigo Koto Silungkang). Sementara subjek ketiga adalah penduduk asli Tigo Koto Silungkang berumur 43 tahun.

Tabel 32 Jumlah Responden Menurut Anak Lahir Hidup

Jumlah Anak	III Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
0	1	1,67	5	8,33	1	1,67	3	5,00
1	3	5,00	4	6,67	3	5,00	1	1,67
2	10	16,67	8	13,33	7	11,67	13	21,67
3	11	18,33	7	11,67	14	23,33	9	15,00
4	10	16,67	10	16,67	10	16,67	15	25,00
5	8	13,33	10	16,67	10	16,67	8	13,33
6	2	3,33	3	5,00	7	11,67	4	6,67
7	4	6,67	5	8,33	4	6,67	2	3,33
8	6	10,00	5	8,33	2	3,33	5	8,33
9	1	1,67	1	1,67	-	-	-	-
10	2	3,33	1	1,67	-	-	-	-
11	1	1,67	-	-	-	-	-	-
12	-	-	1	1,67	2	3,33	-	-
13	1	1,67	-	-	-	-	-	-
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100
paritas >4		41,67		43,33		41,67		31,57

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2003

Subjek pertama termasuk suaminya mendukung subjek untuk ikut KB, subjek sendiri pernah ikut KB. Pernah memakai suntik, pernah memakai spiral, tetapi selama memakai suntik (3 tahun) selalu mengalami pendarahan. Setelah subjek berkonsultasi dengan "Bidan Desa". Bidan menyarankan untuk pakai spiral, tetapi selama pakai spiral subjek selalu merasa sakit kepala, dan kulit menjadi keriput. Akhirnya setelah kembali dikonsultasikan dengan Bidan, disarankan untuk tidak ber KB saja. Kemudian, karena efek sampingan alat kontrasepsi yang pernah dialaminya, dan juga sesuai saran Bidan Desa subjek memilih untuk tidak ikut KB meskipun anaknya sudah 7 orang. Sementara kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak mendukung untuk kehidupan keluarga mereka apalagi untuk satu keluarga besar. Karena pekerjaan subjek maupun suaminya hanya bertani mengolah lahan milik orang lain. Begitu juga rumah yang ditempatinya adalah rumah pemilik sawah yang mereka olah, yang ditinggalkan karena merantau. Pada saat wawancara juga ditanyakan tentang ketidak ikutan suaminya dalam KB, suaminya menjawab dengan tertawa agak panjang, *"itu ndak mungkin, ndak ado laki-laki nan ba KB di awak siko doh"*.

Selanjutnya subjek kedua, dan ketiga menyatakan ketidak ikutan mereka berKB karena tidak diizinkan suami yang mencemaskan ketidak mampuan mereka untuk melakukan pengobatan, andaikata terjadi masalah karena penggunaan alat kontrasepsi, kalau istrinya ikut KB. Sebagaimana dituturkan oleh subjek kedua *"... Nen iyo lai kainginan KB tumah tapi kecek uda, kalau ado apo-apo beko joa kadiubek, awak bansaiknyo..."*. Akhirnya, meskipun mereka sudah mempunyai anak banyak (10 orang pada saat wawancara ini berlangsung) keluarga ini memilih untuk tidak ikut KB.

Subjek kedua dalam mengasuh dan mengurus anaknya sehari-hari lebih banyak dilakukan sendiri, karena suaminya adalah seorang supir truk, yang bekerja pada salah seorang *toke* ternak di daerah ini, dan hampir setiap hari ke luar daerah. Jumlah anak yang banyak yang masih



kecil-kecil, dikatakan oleh subjek memang sesuatu hal yang berat yang harus dilakukannya setiap hari. Dari enam orang anaknya yang seharusnya berada di bangku sekolah, anak tertua mereka, perempuan, cukup beruntung sekarang masih sekolah di MAN Bayur, kelas III. Sementara dua orang berikutnya, keduanya perempuan, hanya tamat SD, bahkan anak nomor empat juga perempuan, tidak tamat SD, dan dua orang di bawahnya sekarang sedang berada di bangku Sekolah Dasar.

Pendukung utama ekonomi keluarga ini adalah suami subjek, dan dibantu oleh tiga orang anak perempuan mereka, yang putus sekolah, yang bekerja menjadi buruh jahit di Bukittinggi. Keluarga ini juga tidak memiliki lahan pertanian untuk diolah, apalagi seperti telah disebutkan di atas subjek kedua adalah pendatang dari daerah lain. Meskipun demikian, dibanding dengan subjek pertama, subjek kedua lebih beruntung karena sudah tinggal di rumah semi permanen milik sendiri.

Demikian juga halnya dengan subjek ketiga, dengan anak yang lebih banyak, 12 orang yang masih hidup dari 13 anak lahir hidup, juga tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk ikut KB. Pada saat wawancara berlangsung subjek kedua didampingi oleh suaminya, sehingga wawancara juga dilakukan dengan suaminya. Suami subjek menuturkan bahwa dia merasa enggan kalau istrinya ikut KB. Kemudian dinyatakan juga bahwa, anaknya tetap "dapat dibiayai". Bedanya dengan subjek pertama, beberapa anaknya sudah dewasa, tiga orang diantaranya merantau ke Pekanbaru dan ke Padang, bekerja sebarai Pembantu Rumah Tangga. Meskipun suami subjek menyatakan bahwa, mereka mempunyai kemampuan untuk membiayai anak-anak mereka, pendidikan tertinggi yang ditempuh anaknya hanya sampai SD. Dua orang anaknya tamat SD, empat orang lainnya tidak tamat SD. Sementara pendidikan subjek sendiri hanya sampai kelas 2 SD, dan suaminya tamat SD. Hal lain, yang cukup memprihatinkan adalah, rumah yang mereka tempati ukurannya sangat kecil dengan hanya satu kamar, terbuat dari bambu, dan dapur berlantai tanah (rumah darurat). Suami subjek hanya bekerja

sebagai buruh tani, yang tidak menguasai lahan pertanian. Demikian juga halnya dengan subjek sendiri, jika anaknya sudah bisa ditinggalkan dengan kakak-kakaknya, subjek juga ikut memburuh sepanjang harinya. Anak terkecil subjek dari 12 anaknya yang masih hidup baru berumur 8 bulan.

Berdasarkan jawaban suami subjek kedua, dan ketiga, maupun penuturan subjek pertama tentang kecemasan suaminya kalau subjek ikut KB KB menunjukkan bahwa, keterlibatan langsung suami dalam pemakaian KB di daerah ini belum populer, dan masih dianggap sesuatu yang tidak lumrah. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas kesehatan, para suami di daerah ini belum ada yang menggunakan alat kontrasepsi, termasuk Kondom. Selain tidak lumrah, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan, sementara untuk hidup sehari-hari saja sudah sulit bagi kebanyakan keluarga di daerah ini. Artinya untuk keterlibatan laki-laki (suami) dalam KB di daerah ini masih sangat dibutuhkan kesabaran, dan sosialisasi baik dalam hubungannya dengan agama maupun peralatan yang dapat digunakan laki-laki termasuk sosialisasi peserta KB laki-laki yang sudah ada dari daerah lain sebagai bahan perbandingan. Sasaran utama sosialisasi adalah keluarga (suami istri), bukan hanya perempuan atau para istri.

Wawancara mendalam juga dilakukan di Padang Luar dengan salah seorang responden yang sudah berumur 51 tahun, yang menempati rumah kerabat suaminya untuk tempat tinggal. Wawancara diarahkan pada ketidak ikutannya dalam KB, dari hasil wawancara terungkap bahwa, sebenarnya subjek pernah ikut menggunakan pil KB pada saat subjek telah mempunyai anak 7 orang tanpa sepengetahuan suaminya, tetapi karena tidak cocok, bidan menyarankan untuk menggunakan spiral. Pada waktu itu subjek merasa takut apalagi tanpa sepengetahuan dan dukungan suaminya, akhirnya subjek memilih tidak ikut KB, hingga memiliki anak lahir hidup sampai 12 orang selama masa reproduksinya. Keikutan subjek dalam KB pada waktu itu (dulu) tetap dirahasiakan, dan

baru diketahui oleh suaminya pada saat wawancara penelitian ini berlangsung. Reaksi yang diberikan suami subjek cukup bersahabat, tidak emosi hanya dikatakan oleh suami subjek, jika pada waktu itu diketahuinya, subjek tidak akan diizinkan untuk ikut KB. Dengan alasan, karena masih terdapat dua paham di tengah ulama, yang memperbolehkan KB, dan yang tidak membolehkan. Sedangkan suami subjek memilih yang tidak memperbolehkan. Wawancara juga diarahkan pada keikutan anak menantunya dalam KB, suami subjek menjawab diplomatis bahwa itu tergantung pada mereka dan suaminya, orang tua tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Lebih lanjut partisipasi responden dalam KB dapat dilihat pada pembahasan berikut.

Mengacu pada temuan di atas beberapa hal dapat dikemukakan, pengetahuan responden terhadap kesehatan reproduksi relatif masih terbatas, sehingga masih banyak ditemukan responden yang memiliki anak yang banyak meskipun itu dari kesehatan tidak baik. Demikian juga halnya dukungan suami terhadap kesehatan reproduksi juga masih rendah, termasuk dalam hal partisipasinya dalam KB. Lebih lanjut tentang partisipasi responden dalam KB KB dikemukakan beriku ini.

#### **4.2.2 Partisipasi Responden dalam KB**

Partisipasi responden dalam KB perlu dikemukakan, meskipun program KB masih dipertentangkan, tetapi program ini mempunyai nilai positif dalam hal kesehatan reproduksi. Selain itu, KB juga merupakan salah satu pilihan untuk keluar dari kemiskinan.

Dari data tabel 33 dapat dilihat relatif masih banyak responden yang tidak ikut KB. Jumlah terbanyak terdapat di nagari tipikal industri rumah tangga (78,33 persen), kemudian nagari tipikal nelayan (70,00), dan nagari tipikal pertanian komesrsial (66,67 persen).

Ada beberapa alasan utama yang dikemukakan tentang ketidakikutan mereka atau pasangannya dalam program KB yaitu, belum punya

anak, ingin punya anak lagi, takut dengan efek sampingan pemakaian alat kontrasepsi, dan ketiadaan dukungan/izin suami. Responden yang mengemukakan alasan tidak diizinkan suami secara berurutan terdapat di Tiku V Jorong (25,00 persen), Tigo Koto Silungkang (20 persen), dan Padang Luar (21 persen). Sedangkan di Balai Gurah (16,66 persen). Tidak cocok dan takut efek sampingan pemakaian alat kontrasepsi merupakan alasan dominan dikemukakan responden, yaitu 53,33 persen di Balai Gurah, 31,66 persen di Padang Luar, 26,66 persen di Tiku V Jorong, dan 20,00 persen di Tigo Koto Silungkang.

Tabel 33 Partisipasi Responden dalam KB dan Alasan Ketidakitannya

Kesertaan dan Alasan	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Ikut KB	28	46,67	18	30,00	20	33,33	13	21,67
Tidak Ikut KB/Alasan								
• belum punya anak	1	1,67	5	8,33	1	1,67	3	5,00
• Ingin anak lagi	7	11,67	6	10,00	7	11,67	2	3,33
• Tidak cocok/takut efek samping	12	20,00	16	26,66	19	31,66	32	53,33
• Tidak diizinkan suami	12	20,00	15	25,00	13	21,66	10	16,66

Sumber: Analisis Data Primer. 2003

Dari hasil wawancara dengan salah seorang suami responden PUS di salah satu daerah lokasi penelitian seperti dikemukakan di atas bahwa keikutsertaan para suami dalam KB masih dianggap tidak lumrah. Artinya *stereotip* juga terjadi dalam pemakaian alat kontrasepsi. Stereotip ini diperkuat dengan bias jendernya alat-alat kontrasepsi, yang lebih banyak ditujukan untuk perempuan, sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (1996); Anonim (tt). Selain itu rendahnya partisipasi suami dalam KB dapat diindikasikan sebagai rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya para suami, tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi. Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan, sama halnya rekomendasi yang dikemukakan dalam analisis data sekunder,

pelayanan KB dan konsultasi yang berkelanjutan baik bagi keluarga pengguna maupun yang tidak peserta KB perlu ditingkatkan.

Relatif masih banyaknya responden yang tidak ikut KB karena tidak diizinkan suami, menunjukkan masih tingginya nilai *patriarkhis* yang membelenggu kehidupan perempuan termasuk untuk tubuhnya sendiri, dan kapan mau hamil ataupun kapan mau melahirkan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara seperti diungkapkan di muka bahwa, sebenarnya perempuan istri, terutama yang sudah mempunyai anak banyak, punya motivasi yang besar untuk ikut KB tetapi terhalang oleh ketiadaan izin suami.

#### 4.2.2.1 Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Responden

Alat kontrasepsi yang dominan digunakan responden di daerah penelitian adalah suntikan, dan pil. Kecuali di Tigo Koto Silungkang setelah suntikan alat kontrasepsi yang relatif banyak digunakan responden adalah inplant (25 persen). Dari keempat daerah penelitian variasi penggunaan alat kontrasepsi ditemukan di Padang Luar dan Balai Gurah.

Tabel 34 Distribusi Alat Kontrasepsi yang Digunakan Responden Peserta KB

Alat Kontrasepsi	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Pil	2	7,15	1	5,56	5	25	2	15,38
Suntikan	19	67,86	17	94,44	7	35	7	53,85
Inplant	7	25	-	-	3	15	1	7,69
IUD	-	-	-	-	2	8	-	-
Tubektomi	-	-	-	-	3	15	3	23,08

Sumber: Analisis Data primer, 2003

#### 4.2.2.2 Pengetahuan Responden tentang Alat Kontrasepsi

Data tabel 35 menunjukkan bahwa, responden di daerah penelitian relatif tidak mengetahui informasi tentang jenis alat KB, dan efek pemakaian alat KB, baik di daerah dengan tipikal pertanian tradisional,

daerah nelayan, maupun pada daerah dengan tipikal pertanian komersial, dan daerah sentra industri rumah tangga dengan aksesibilitas yang lebih baik terhadap pusat informasi dan pusat kota. Walaupun bila dibanding keempat daerah lokasi penelitian, pengetahuan responden tentang KB yang cukup baik adalah di daerah Balai Gurah. Sepertiga responden di daerah ini mengetahui atau memperoleh informasi tentang jenis alat kontrasepsi, dan efek sampingnya. Sementara di tiga daerah lainnya, responden yang memperoleh informasi tentang cara-cara kontrasepsi, jumlahnya relatif sedikit.

Tabel 35 Frekuensi Responden Berdasarkan Informasi KB

Pengetahuan Tentang Alat KB	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	f	%	F	%	F	%	F	%
Mengetahui jenis, dan efek alat kontrasepsi	11	18,33	8	13,33	11	18,33	20	33,33
Tidak mengetahui jenis, dan efek alat kontrasepsi	49	81,67	52	86,67	49	81,67	40	66,67
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Beranjak dari kelahiran maupun partisipasi responden dalam KB, konseling oleh BKKBN dan KUA tentang kesadaran bahwa jumlah kelahiran dan tingkat kesejahteraan tidak dapat dipisahkan. Melalui upaya tersebut suami istri memandang kelahiran bukanlah peristiwa alamiah semata. Disisi lain suami istri juga mempunyai konsep keluarga berkualitas, sehingga secara sadar mereka dapat memilih alat-alat kontrasepsi yang ada program KB alternatif.

#### 4.2.3 Rata-rata Anak Lahir Hidup Berdasarkan Umur Responden

Data tabel 36 menunjukkan kecenderungan rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki umur tua (40 tahun ke atas) relatif lebih banyak, berkisar antara 5 sampai 8 orang, dibandingkan rata-rata anak yang dimiliki responden pada kelompok umur yang lebih muda (di bawah 40 tahun), antara 1 sampai 5 orang per kelompok umur. Hal ini terutama

ditemui di Tigo Koto Silungkang dan Tiku V Jorong. Artinya dapat diasumsikan paritas yang dimiliki perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya umur responden.

Tabel 36 Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Responden

Umur	Rata-rata Anak Lahir Hidup			
	Tigo Koto Silungkang (orang)	Tiku V Jorong (orang)	Padang Luar (orang)	Balai Gurah (orang)
15 – 19	2	-	-	-
20 – 24	1	1	-	-
25 – 29	3	3	1	2
30 – 34	3	3	3	3
35 – 39	5	5	5	2
40 – 44	7	5	5	4
45 – 49	5	5	5	5
50 – 54	7	7	4	5
55 – 59	8	-	6	7
60 – 64	8	8	8	3
65 – 69	-	-	7	5
70 +	-	-	-	4

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2003

#### 4.2.4 Rata-rata Anak Lahir Hidup Berdasarkan Umur Pertama Kali Kawin

Umur kali pertama kawin dalam teori fertilitas merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi jumlah anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang perempuan. Makin banyak perempuan yang umur perkawinan pertama kalinya dalam umur muda, jumlah anak yang dimiliki juga makin besar. Data tabel 37 memberi pembenaran teori tersebut, rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki oleh responden yang umur kali pertama kawinnya lebih rendah cenderung lebih besar dibanding rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh responden yang umur kali pertama kawinnya lebih tinggi. Kecuali responden kelompok umur 10-14 tahun di kenagarian Tigo Koto Silungkang, rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki lebih sedikit yaitu 2 orang. Setelah didiskusikan dengan data yang ada, ternyata responden yang umur kali pertama kawinnya antara 10 – 14

tahun, pada saat penelitian berlangsung umur perkawinan mereka masih muda, sehingga anak yang mereka miliki masih sedikit.

Tabel 37 Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Kali Pertama Kawin

Umur Kawin Pertama	Rata-rata Anak Lahir Hidup			
	Tigo Koto Silungkang (orang)	Tiku V Jorong (orang)	Padang Luar (orang)	Balai Gurah (orang)
10 – 14	2		6	5
15 – 19	6	5	5	6
20 – 24	4	3	4	4
25 – 29	4	4	4	3
30 – 34	3		-	3

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2003

Informasi dan pengertian terhadap pasangan yang kawin pada usia muda untuk pendandaan anak kelahiran pertama, tetap perlu diberikan. Selain memperhatikan faktor kesehatan dari usia yang aman untuk melahirkan juga dari kesiapan atau kematangan pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat diberikan melalui koordinasi antara BKKBN dengan Depag, dalam hal ini petugas KUA melalui nasehat perkawinan.

#### 4.2.5 Rata-rata Anak Lahir Hidup Berdasarkan Pekerjaan Responden

Data tabel 38 menunjukkan bahwa rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki responden yang bekerja di sektor pertanian, termasuk buruh tani dan kategori lain-lain di Tigo Koto Silungkang, relatif lebih besar dibanding responden yang bekerja di sektor lainnya. Seperti disebutkan di atas angka fenomenal jumlah anak yang dimiliki, 13 orang, adalah berasal dari buruh tani. Besarnya angka ini juga karena responden dalam kategori ini hanya satu orang.

Di kenagarian Tiku V Jorong yang sebagian besar respondennya adalah bekerja rumah tangga, tetapi responden yang memiliki rata-rata anak lahir hidup terbanyak adalah yang kegiatan utamanya di sektor pertanian. Sedangkan rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki responden



yang bekerja di sektor lainnya termasuk yang bekerja di sektor domestik jumlahnya sama banyak, yaitu 4 orang per responden. Sementara di kenagarian Padang Luar, rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki responden berdasarkan pekerjaannya lebih bervariasi berkisar antara 2 sampai 5 orang. Rata-rata terbanyak dimiliki oleh responden yang pekerjaannya bertani dan berjualan, dan rata-rata paling sedikit adalah responden yang kegiatan utamanya buruh. Yang lainnya, pegawai, termasuk lain-lain, dan ibu rumah tangga memiliki rata-rata anak lahir hidup sebanyak 4 orang per responden.

Tabel 38 Distribusi Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Pekerjaan Responden

Umur Kawin Pertama	Rata-rata Anak Lahir Hidup			
	Tigo Koto Silungkang (orang)	Tiku V Jorong (orang)	Padang Luar (orang)	Balai Gurah (orang)
Rumah tangga	4	4	4	5
Tani	5	7	5	5
Buruh	13	4	2	3
Jualan/dagang	3	4	5	3
Industri	-	-	-	4
Pegawai	3	-	4	3
Lain-lain	6	-	4	2

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2003

Sama halnya dengan di Padang Luar, rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki responden di Balai Gurah berdasarkan pekerjaannya berkisar antara 2 sampai 5 orang. Rata-rata anak terbanyak, dimiliki oleh responden yang kegiatan utamanya bertani berikut rumah tangga. Sedangkan yang memiliki rata-rata anak lahir hidup paling sedikit dari responden di daerah ini berdasarkan pekerjaannya adalah buruh. Selanjutnya rata-rata anak lahir hidup yang dimiliki responden yang bekerja pada industri rumah tangga lebih sedikit dibanding responden yang pekerjaannya bertani, dan rumah tangga, tetapi lebih besar dibanding responden buruh, berjualan maupun yang bergerak di bidang lain-lain.

#### 4.2.6 Rata-rata Anak Lahir Hidup Berdasarkan Pendidikan Responden

Beranjak dari data tabel 39 dapat dikemukakan bahwa di kenagarian Tigo Koto Silungkang, rata-rata anak yang dimiliki responden yang tingkat pendidikannya lebih rendah, SD tidak tamat maupun tamat SD relatif lebih banyak dibanding responden dengan pendidikan SLTP ke atas, berkisar antara 5 sampai 6 orang per responden. Demikian halnya di kenagarian Tiku V Jorong menunjukkan pola yang hampir sama, kecuali responden yang pendidikannya SMU tamat, justru memiliki rata-rata anak terbanyak yaitu 8 orang per responden. Berikut di Padang Luar, rata-rata anak yang dimiliki responden berdasarkan pendidikannya termasuk besar, kecuali yang pendidikannya SMU tamat rata-rata anak yang dimiliki adalah 3 orang per responden.

Tabel 39 Distribusi Rata-rata Anak lahir Hidup Berdasarkan Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Rata-rata anak lahir Hidup			
	Tigo Koto Silungkang (orang)	Tiku V Jorong (orang)	Padang Luar (orang)	Balai Gurah (orang)
1. SD TT	6	5	5	6
2. SD Tamat	5	4	5	4
3. SLTP TT	2	0	6	6
4. SLTP Tamat	4	1	5	4
5. SMU TT	-	2	-	4
6. SMU Tamat	3	8	3	3

Sumber: Analisis Data Primer, 2003.

Sama halnya dengan di Padang Luar, rata-rata anak lahir hidup yang relatif sedikit di Balai Gurah berdasarkan pendidikan tertinggi responden adalah responden yang pendidikannya SMU tamat, 3 orang per responden. Sementara rata-rata anak lahir hidup yang cukup besar dimiliki oleh responden adalah yang pendidikannya SD tidak tamat, dan SMP tidak tamat, yaitu 6 orang per responden.

#### 4.2.7 Jumlah Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Medis dan Dukun

Tabel 40 Distribusi Persalinan yang Ditolong Oleh Dukun dan Tenaga Medis

Anak Ke	Tigo Koto Silungkang			Tiku V Jorong			Padang Luar			Balai Gurah		
	Dukun	Bidan	Pus/RS	Dukun	Bidan	Pus/RS	Dukun	Bidan	Pus/RS	Dukun	Bidan	Pus/RS
I	17 28,81	41 69,49	1 1,69	28 50,91	26 47,27	1 1,81	6 10,17	39 66,10	14 23,73	3 5,26	40 70,18	14 24,56
II	14 25,00	41 73,21	1 1,79	33 64,71	17 33,33	1 19,61	4 7,14	40 71,43	12 21,43	2 3,57	40 71,43	14 25,00
III	2 25,53	35 74,47	-	28 65,12	14 32,56	1 2,36	5 10,20	30 61,22	14 28,57	3 6,98	29 67,44	11 25,58
IV	9 25,71	26 74,29	-	25 69,44	10 27,78	1 2,78	1 2,86	24 68,57	10 28,57	2 5,88	21 61,76	11 32,35
V	7 28,00	18 72,00	-	20 76,92	6 23,08	-	3 12,00	18 72,00	4 16,00	2 10,53	13 68,42	4 21,05
VI	6 35,29	10 58,82	1 5,88	14 87,5	2 12,5	-	1 6,67	13 86,67	1 6,67	2 20,00	8 80,00	-
VII	5 33,33	10 66,67	-	11 84,62	2 15,38	-	2 25,00	6 75,00	-	2 28,57	5 71,43	-
VIII	5 45,45	6 54,54	-	7 87,5	1 12,5	-	2 50,00	2 50,00	-	1 20,00	4 80,00	-
IX	1 20,00	4 80,00	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
X	1 25,00	3 75,00	-	1 50,00	1 50,00	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	1 100	-	-	1 50,00	1 50,00	-	-	-	-
XIII	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Analisis Data Primer, 2003.

Secara umum dari data tabel 40, tampak bahwa persalinan anak pertama, kedua, dan seterusnya di tiga daerah penelitian, kecuali Tiku V Jorong, pada umumnya ditolong oleh Bidan. Di Tiku V Jorong kelahiran anak pertama, kedua, dan seterusnya justru banyak ditolong oleh dukun beranak. Keterisolasian daerah ini dari dunia luar, dapat diidentifikasi sebagai salah satu faktor relatif sedikitnya kelahiran anak responden yang ditolong oleh tenaga medis. Daerah ini menjadi terbuka dengan dunia luar terutama sejak adanya Perusahaan Perkebunan, lebih kurang 5 atau 7 tahun belakangan. Sebelumnya perhubungan daerah ini dengan dunia luar melalui transportasi laut. Sementara dari segi fasilitas yang ada, baik fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas lainnya di daerah juga sangat minim. Untuk kenagarian Tiku V Jorong terdapat satu buah Puskesmas di Jorong Muaro Putus (yang pada pertengahan September 2003 ini daerahnya terkena bencana Abrasi). Untuk mengakses fasilitas kesehatan

yang ada (Puskesmas) dari masing-masing jorong di Tiku V Jorong relatif jauh, sedangkan sarana transportasi umum tidak tersedia. Pelayanan kesehatan lain yang dapat diakses saat ini adalah bidan desa di tiap Jorong, tetapi keberadaan mereka tidak tetap. Artinya akses perempuan ke dukun di daerah ini lebih mudah, selain itu secara ekonomi lebih terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dukun beranak di daerah ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Dinas Kesehatan, dengan menjadikan dukun beranak sebagai mitra kerja dengan bidan desa.

### 4.3 Mortalitas

Mortalitas sebagaimana disebutkan di muka merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian sangat penting baik bagi pemerintah maupun pihak swasta atau lembaga yang konsern terhadap masalah kesehatan. Kematian, khususnya kematian anak dan kematian maternal merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan suatu daerah. Seperti telah disebutkan juga di muka bahwa ada hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kematian anak dan kematian maternal dengan pembangunan ekonomi. Artinya apabila kematian anak dan kematian maternal rendah menunjukkan pembangunan ekonomi yang maju. Sebaliknya apabila kematian anak, dan kematian maternal tinggi, maka pembangunan ekonomi rendah.

Sehubungan mortalitas di tingkat kecamatan lokasi penelitian, hasil laporan tentang "*Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2001*", mencatat dari empat kecamatan lokasi penelitian ini, kematian maternal hanya terdapat di kecamatan Tanjung Mutiara, sebanyak 1 orang. Sementara di kecamatan lainnya tidak terdapat kematian maternal. Namun bila dilihat dari kematian bayi, ternyata di keempat kecamatan lokasi penelitian terdapat kematian bayi dengan jumlah yang berbeda. Jumlah kematian bayi terbanyak terdapat di kecamatan Banuhampu Sei

Puar, yaitu 15 orang, Tanjung Mutiara 8 orang. Kemudian di dua kecamatan lainnya, kecamatan IV Angkat Candung, dan kecamatan Palembang angka kematian bayi lebih kecil, masing-masing 3 orang dalam tahun 2001 (Dinkes, Lubuk Basung, 2002).

Mortalitas yang dikemukakan dalam penelitian terkait dengan profil perempuan adalah abortus, anak lahir mati, bayi mati, dan anak mati yang pernah dialami responden. Karena kematian bayi maupun kematian anak erat kaitannya dengan status gizi dan kesehatan perempuan, atau tersangkut dengan perilaku perempuan, khususnya dalam masa pra kelahiran, melahirkan dan pasca melahirkan sebagaimana telah disebutkan di muka.

Tabel 41 Responden yang Abortus dan Mempunyai Bayi Lahir Mati, Bayi Mati dan Anak Mati Per Wilayah

Persitiwa	III Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	f	%	F	%
Abortus	4	6,67	10	16,67	10	16,67	11	18,33
LM	3	5,00	5	8,33	1	1,67	-	-
Kematian Bayi	4	6,67	10	16,67	10	16,67	7	11,67
Kematian Anak	3	5,00	3	5,00	3	5,00	1	1,67

Sumber: Analisis Data Primer, 2003.

Dari data tabel 41 tampak bahwa di masing-masing daerah lokus penelitian ditemukan responden yang mengalami abortus, memiliki bayi mati, dan anak mati. Kecuali di Balai Gurah tidak ditemukan responden yang mempunyai anak lahir mati. Tetapi bila dilihat dari responden yang pernah mengalami abortus jumlah terbanyak justru terdapat di daerah ini, yakni 18,33 persen dari 60 orang responden pernah mengalami abortus. Selain itu, responden yang mempunyai bayi mati di daerah ini juga cukup besar, yaitu 11,67 persen.

Bila dibandingkan keempat wilayah penelitian dengan tipikal yang berbeda, resiko mortalitas sekaitan dengan kualitas kesehatan ibu hampir merata, yang terbanyak adalah di tipikal nagari pesisir/nelayan, kemudian tipikal pertanian tradisional dan pertanian komersial. Seperti disebutkan di

muka (bagian fertilitas), hal ini karena akses perempuan dan anak di daerah ini terhadap pelayanan kesehatan, maupun fasilitas lainnya sangat rendah, yang masih sangat perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwenang.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa responden yang mempunyai bayi mati, dan anak mati adalah responden yang frekuensi melahirkannya lebih sering. Salah seorang diantara mereka adalah yang frekuensi melahirkannya 13 kali. Sebagaimana juga diungkapkan di muka, responden tersebut dan pasangannya tidak sebagai peserta KB, meskipun anak mereka sudah tiga belas orang, dan masih hidup 12 orang dengan usia anak tertua adalah 21 tahun. Ketidak ikutan responden juga karena tidak adanya dukungan suami.

Relatif banyaknya responden yang mempunyai bayi mati, dan anak yang mati, dan relatif masih banyaknya responden dengan frekuensi yang sering serta masih rendahnya partisipasi pasangan terutama suami dalam KB, sebagaimana telah jugag disebutkan di muka pelayanan KB terhadap masyarakat tetap urgen untuk diberikan dengan melalui informasi dan pelayanan KB yang berkualitas. Selain kepada masyarakat BKKBN juga perlu melakukan sosialisasi peningkatan sensitivitas tentang kesehatan reproduksi tokoh masyarakat yang terhimpun dalam lembaga lokal di nagari.

#### **4.4 Mobilitas Nonpermanen**

Mobilitas penduduk dapat dibagi atas mobilitas permanen, dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen adalah mobilitas penduduk untuk mereka yang telah menetap di daerah lain minimal dalam kurun waktu enam bulan ataupun penduduk berniat untuk tinggal selama enam bulan atau lebih di daerah lain. Sedangkan mobilitas non permanen adalah mobilitas yang dilakukan untuk tujuan menetap di daerah lain dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Mobilitas non permanen dapat dilakukan dalam bentuk sirkulasi ataupun mondok.

Saefullah (1996) menyebutkan bahwa informasi tentang mobilitas penduduk, terutama dari data sensus, terbatas pada gerak penduduk meliwati batas propinsi, dan hanya bisa memberikan gambaran tentang perpindahan tetap (migrasi). Padahal dalam kenyataannya menurut Saefullah sebagian besar gerak mobilitas penduduk terjadi dalam bentuk migrasi non permanen. Mobilitas atau gerak penduduk dalam penelitian ini dilihat dari pola mobilitas yang dilakukan responden dalam bentuk mobilitas non permanen yang dilakukan antar nagari dan meliwati batas kecamatan.

Mobilitas non permanen dalam penelitian ini adalah mobilitas yang dilakukan oleh responden meliwati batas nagari untuk tujuan tidak menetap. Pola mobilitas non permanen yang dilakukan responden berdasarkan daerah tujuannya dapat dikelompokkan atas enam daerah: mobilitas yaitu, ke pasar antar nagari, ke ibukota kecamatan, ke ibukota kabupaten, ke ibukota propinsi, ke kota lainnya dalam propinsi, dan ke kota atau daerah lainnya di luar propinsi. Sedangkan dilihat dari frekuensi gerak mobilitas yang dilakukan dapat dikelompokkan atas empat yaitu: (1) satu kali setahun, (2) dua kali setahun, (3) minimal sekali sebulan, dan (4) minimal satu kali seminggu.

#### **4.4.1 Ke Pasar Antar Nagari Dalam Kecamatan**

Dari data tabel 42 tampak bahwa mobilitas antar nagari dengan tujuan ke pasar, yang dilakukan responden di daerah penelitian cukup bervariasi. Pola yang hampir sama dapat dilihat antara nagari Tigo Koto Silungkang dengan nagari Balai Gurah, dan antara nagari Tiku V Jorong dengan nagari Padang Luar.

Di nagari Tigo Koto Silungkang jumlah terbanyak responden yang melakukan mobilitas ke pasar antar nagari adalah minimal satu kali dalam satu minggu. Hal ini karena *pertama*, hari pasar di nagari Tigo Koto Silungkang, hari *minggu* yaitu di "*Pasar Simpang*", bersamaan dengan hari pasar di salah satu nagari tetangga, yaitu "*Pasar Koto Alam*". *Kedua*,

pasar Koto Alam lebih besar, dan lebih lengkap dibandingkan dengan pasar Simpang. Selain itu, transportasi antar kedua pasar tersebut atau antar kedua nagari tersebut cukup lancar, khususnya hari minggu. Artinya frekuensi ke pasar antar nagari yang terbanyak (76,67 persen) yang dilakukan responden di nagari tipikal pertanian tradisional adalah minimal satu kali dalam satu minggu, dan sesuai pula dengan hari pasaran. Hal yang sama juga ditemukan di nagari Balai Gurah, sebagian besar (56,67 persen) kegiatan ke pasar antar nagari yang dilakukan responden adalah minimal satu kali dalam satu minggu. Akan tetapi dilihat dari prasarana ekonomi yang ada, dalam hal ini ketersediaan pasar, kondisinya berbeda dengan di nagari Tigo Koto Silungkang. Di daerah ini tidak terdapat pasar lokal (nagari) yang dapat diakses oleh responden (perempuan).

Tabel 42 Mobilitas ke Pasar Antar Nagari

Nagari	Satu kali setahun		Dua kali setahun		Min. 1 x sebulan		Min. 1 x seminggu	
	f	%	F	%	F	%	F	%
Tigo Koto Silungkang	-	-	5	8,33	9	15,00	46	76,67
Tiku V Jorong	-	-	1	1,67	3	5,00	1	1,67
Padang Luar	1	1,67	1	1,67	1	1,67	6	10,00
Balai Gurah	1	1,67	-	-	4	6,67	34	56,67

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Berbeda dengan pola mobilitas di dua nagari di atas, responden yang melakukan mobilitas ke pasar antar nagari di Tiku V Jorong, relatif sangat sedikit. Walaupun dari hasil observasi, di daerah ini tidak terdapat "pasar", baik pasar jorong maupun pasar nagari. Pasar terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah ini adalah Pasar di Pusat Ibukota kecamatan. Namun persoalannya untuk pergi ke pasar tersebut dibutuhkan biaya yang besar sekitar Rp.25.000, pulang-pergi dengan menggunakan "ojek". Karena di daerah ini belum tersedia sarana transportasi umum lain yang dapat menghubungkan daerah ini dengan daerah lainnya, termasuk ke ibu kota kecamatan, Tanjung Mutiara. Bahkan lima tahun sebelum ini transportasi utama masyarakat di daerah ini untuk mobilitas ke ke luar daerah harus menggunakan transportasi laut,



sampan. Boleh dikatakan daerah ini terisolasi dengan sendirinya dari dunia luar.

Untuk kebutuhan harian saat ini, selain ikan, responden di Tiku V Jorong membelinya di warung-warung yang ada di kenagarian tersebut atau di jorong masing-masing. Alternatif lain adalah membelinya pada pedagang keliling, namun tidak rutin. Para responden yang sebahagian besar istri nelayan mengakui mereka mesti mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kebutuhan harian keluarga. Sementara hasil laut, udang, pada umumnya langsung dijual ke toke. Sehingga tidak jarang ditemui, anak-anak mereka makan hanya dengan nasi putih tanpa lauk-pauk. Kalaupun mereka memanfaatkan hasil tangkapan laut, terbatas pada ikan-ikan yang telah disortir. Terbatasnya akses masyarakat, khususnya perempuan terhadap pasar di daerah ini, dan terhadap dunia luar sudah seharusnya menjadi pemikiran bersama, baik oleh pemuka masyarakat yang ada di nagari itu sendiri maupun oleh pemerintah.

Selanjutnya seperti disebutkan di atas gerak responden antar nagari di kenagarian Padang Luar, polanya hampir sama dengan di Tiku V Jorong. Meskipun demikian dengan nuansa atau kondisi yang berbeda. Responden yang melakukan mobilitas antar nagari hanya sekitar 15,0 persen. Relatif sedikitnya responden yang melakukan mobilitas ke pasar antar nagari karena pasar lokal, Pasar Padang Luar, cukup representatif untuk pemenuhan kebutuhan harian, dengan hari pasar hampir setiap hari, dan pasar puncaknya adalah hari Kamis dan Minggu.

#### **4.4.2 Mobilitas Melewati Batas Kecamatan**

Seperti disebutkan di atas, mobilitas responden ke luar nagari atau ke luar kecamatan adalah ke kota kabupaten, ke kota Propinsi, kota lainnya di Sumatera Barat, dan kota/daerah lainnya di luar propinsi.

##### *4.4.2.1 Ke Ibukota Kabupaten*

**Tabel 43 Frekuensi Mobilitas Responden Ke Ibukota Kabupaten**

Nagari	Satu kali setahun		Dua kali setahun		Min. 1 x sebulan		Min. 1 x seminggu		Jumlah
	F	%	F	%	F	%	f	%	%
Tigo Koto Silkg.	3	5,00	1	1,67	-	-	-	-	6,67
Tiku V Jorong	1	1,67	2	3,33	2	3,33	-	-	8,33
Padang Luar	2	3,33	3	5,00	4	6,67	1	1,67	16,57
Balai Gurah	-	-	3	5,00	4	4,67	2	3,33	15,00

*Sumber: Analisis Data Primer, 2003*

Data tabel 43 menunjukkan jumlah responden yang melakukan mobilitas ke ibukota kabupaten, Lubuk Basung, relatif sedikit. Hal ini karena letak dan jarak yang relatif jauh ke ibukota kabupaten dibanding kota lainnya yang lebih mudah diakses dari daerah masing-masing. Akses ke daerah tersebut lebih sulit dibanding kota lainnya yang terdekat. Artinya kalau tidak urusan atau keperluan khusus, misalnya yang terkait dengan pekerjaan, responden cenderung untuk tidak melakukan mobilitas ke ibukota kabupaten.

#### 4.4.2.2 Ke Ibukota Propinsi

Responden yang melakukan mobilitas ke ibukota propinsi relatif lebih banyak dibanding dengan yang melakukan mobilitas ke ibukota kabupaten. Meski demikian, jumlah yang melakukan mobilitas tersebut relatif masih sedikit. Frekuensi gerak yang dilakukan pun dominan dalam rentang waktu yang panjang. Jumlah terbanyak responden yang melakukan gerak ke ibukota propinsi adalah di Balai Gurah (31,67 persen), terbanyak kedua adalah di Padang Luar (23,33 persen).

**Tabel 44 Frekuensi Mobilitas Responden Ke Ibukota Propinsi**

Nagari	Satu kali setahun		Dua kali setahun		Min. 1 x sebulan		Min. 1 x seminggu		Jlh
	F	%	F	%	F	%	f	%	%
Tigo Koto Sil.	-	-	1	1,67	5	8,33	-	-	10,00
Tiku V Jorong	3	5,00	1	1,67	2	3,33	-	-	10,00
Padang Luar	2	3,33	10	16,67	1	1,67	1	1,67	23,33
Balai Gurah	5	8,33	10	16,67	3	5,00	1	1,67	31,67

*Sumber: Analisis Data Primer, 2003*

#### 4.4.2.3 Ke Kota Lain di dalam Propinsi

Tabel 45 Frekuensi Mobilitas Responden Ke Kota Lain di Dalam Propinsi

Nagari	Satu kali setahun		Dua kali setahun		Min. satu kali satu bulan		Min. 1 x seminggu		Jlh
	F	%	f	%	F	%	F	%	%
Tigo Koto Sil.	9	15,00	7	11,67	4	6,67	-	-	33,33
Tiku V Jorong	-	-	-	-	-	-	1	1,67	1,67
Padang Luar	2	3,33	5	8,33	12	20,00	8	18,33	45,00
Balai Gurah	6	10,00	21	35,00	9	15,00	9	15,00	75,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

Bila dibanding mobilitas lainnya yang dilakukan oleh responden meliwati batas kecamatan, mobilitas ke kota lainnya dalam propinsi relatif lebih sering. Dari keempat daerah penelitian mobilitas yang tinggi terdapat di nagari Balai Gurah, Tigo Koto Silungkang dan Padang Luar. Mobilitas tertinggi adalah di nagari Balai Gurah. Hal ini sekaitan dengan dominan pekerjaan responden dalam industri rumah tangga. Mobilitas responden tertinggi kedua terdapat di nagari Padang Luar. Relatif tingginya mobilitas responden di kedua nagari tersebut, selain karena terkait dengan pekerjaan juga karena aksesibilitas wilayah yang tinggi.

#### 4.4.2.4 Ke Luar Propinsi

Jumlah responden yang melakukan mobilitas ke kota lainnya, selain ibukota kabupaten/propinsi, berbeda kontras untuk setiap daerah. Jumlah terbanyak responden yang melakukan mobilitas ke kota lain dalam propinsi adalah di Balai Gurah (75 persen). Kemudian di Padang Luar sebagai salah satu daerah yang diasumsikan dengan mobilitas tinggi, karena terletak bersebelahan dengan kota Bukittinggi, jumlah responden yang melakukan mobilitas justru tidak sampai separoh. Terungkap dari hasil wawancara, kebutuhan mereka dapat terpenuhi di Pasar Padang Luar. Sedangkan untuk membeli pakaian anak, atau membawa anak berjalan-jalan ke Bukittinggi lebih banyak dilakukan oleh suami. Mobilitas

yang sangat rendah ditemukan di Tiku V Jorong, seperti halnya dikemukakan di atas bahwa aksesibilitas daerah ini sangat tidak mendukung untuk melakukan mobilitas. Selain itu juga kurangnya dukungan ekonomi untuk dapat melakukan mobilitas.

Tabel 46 Frekuensi Mobilitas Responden Ke Luar Propinsi

Nagari	Satu kali setahun		Dua kali setahun		Min. 1 x sebulan		Min. 1 x sebulan	
	F	%	F	%	F	%	f	%
Tigo Koto Silungkang	1	1,67	-					
Tiku V Jorong	1	1,67	3	5,0	-		-	
Padang Luar	2	3,33	4	6,67	-		-	
Balai Gurah	4	6,67	3	5,0	-		-	

Sumber: Analisis Data Primerr, 2003

Dilihat dari mobilitas yang dilakukan responden ke luar propinsi menunjukkan pola yang hampir sama di setiap daerah, bahwa responden yang melakukan mobilitas adalah dalam rentang waktu yang relatif panjang. Kemudian responden yang melakukan gerakan ke luar propinsi jumlahnya juga relatif kecil untuk setiap wilayah. Mobilitas yang relatif intens dilakukan oleh dilakuakn responden, selain mobilitas antar nagari adalah, ke kota lain di luar ibukota kabupaten.

#### 4.5 Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan agama yang dianut responden yang ada dilokus penelitian, seluruhnya beragama Islam, maka aktivitas ibadah dilihat dari ibadah shalat wajib, shalat berjamaah yang dilakukan responden di Masjid/Surau, dan frekuensi responden dalam membaca Alquran. Ibadah shalat wajib, dan ibadah membaca Alquran yang dilakukan responden dibatasi dua bulan terakhir. Sedangkan ibadah shalat berjamaah dibatasi dalam satu tahun terakhir.

Mengacu kepada hasil temuan lapangan, frekuensi ibadah shalat wajib yang dilakukan responden dalam penelitian ini dibagi atas tiga kelompok yaitu, tidak pernah shalat, jarang atau kadang-kadang, dan selalu melaksanakan shalat wajib. Kemudian frekuensi shalat berjamaah

yang dilakukan responden dapat dikelompokkan atas 5 yaitu, tidak pernah shalat berjamaah, 1-2 kali setahun, 1-2 kali sebulan, shalat berjamaah kalau ada wirid, dan minimal satu kali dalam satu minggu. Sedangkan ibadah membaca Alquran yang dilakukan responden dalam dua bulan terakhir ini dikelompokkan atas 3 yaitu, (1) responden yang tidak pernah mengaji, (2) responden yang jarang mengaji atau satu kali dua minggu atau lebih, dan (3) sering mengaji atau minimal satu kali dalam satu minggu.

#### 4.5.1 Ibadah Shalat Wajib

Data tabel 47 memperlihatkan bahwa di beberapa daerah penelitian, Tigo Koto Silungkang, di Tiku V jorong, dan Padang Luar, ditemukan responden yang tidak melakukan shalat wajib ataupun yang jarang shalat dalam dua bulan terakhir ini. Jumlah terbanyak responden yang tidak melakukan shalat wajib terdapat di Tiku V Jorong yaitu sebanyak 5,0 persen. Kemudian di Tigo Koto Silungkang, dan di Padang Luar, masing-masing sebanyak 3,33 persen. Demikian juga halnya dengan responden yang jarang melaksanakan Shalat wajib, ditemukan pola yang hampir sama dengan yang tidak melaksanakan shalat wajib. Jumlah terbanyak ditemukan di Tiku V Jorong, kemudian di Tigo Koto Silungkang. Masing-masing 8,33 persen dari responden yang ada menyatakan jarang atau kadang-kadang saja melaksanakan shalat wajib. Di Padang Luar juga ditemukan responden yang menyatakan shalat wajib hanya dilaksanakan kalau ada waktu atau kadang-kadang dalam jumlah yang lebih sedikit, 1,67 persen.

Tabel 47 Aktivitas Ibadah Shalat Wajib Responden Dalam Dua Bulan Terakhir

Frekuensi Shalat	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	f	%	F	%	F	%	f	%
Tidak shalat	2	3,33	3	5,0	2	3,33	0	0
Jarang	5	8,33	5	8,33	1	1,67	0	0
Selalu	53	88,33	52	86,67	57	95,0	60	100
Jumlah	60	100	60	100	60	100	60	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

#### 4.5.2 Ibadah Shalat Berjamaah

Kegiatan ibadah yang dilakukan responden juga dilihat dari frekuensi shalat berjamaah di Mesjid ataupun di Surau. Ibadah shalat berjamaah seperti dikemukakan di atas dibatasi dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu satu tahun belakangan. Frekuensi shalat berjamaah yang diikuti responden cukup bervariasi untuk semua daerah. Bila diperhatikan data tabel 48, ada diantara responden yang ikut shalat berjamaah dua kali setahun. Dengan kata lain mereka shalat berjamaah pada perayaan hari besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jumlah terbanyak ditemukan di Tiku V Jorong, lebih dari separoh (66,67 persen) hanya melakukan shalat berjamaah di Mesjid dua kali setahun. Jumlah terbanyak berikutnya ditemukan di Tigo Koto Silungkang, yaitu sebanyak 36,67 persen, kemudian di Padang Luar, 5 persen, dan di Balai Gurah 3,33 persen.

Selanjutnya dari data tabel 48 juga dapat dilihat, ada diantara responden yang tidak pernah melaksanakan shalat berjamaah dalam satu tahun terakhir, khususnya di Tiku V Jorong, dan Tigo Koto Silungkang. Masing-masing 15 persen, dan 1,67 persen.

Tabel 48 Aktivitas Shalat Berjamaah Yang Dilakukan Responden Dalam satu Tahun Terakhir

Frekuensi Shalat Berjamaah	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	f	%	F	%
Tidak pernah	1	1,67	9	15,00	-	-	-	-
1-2 kali setahun	22	36,67	40	66,67	3	5,0	2	3,33
1-2 kali sebulan	-	-	7	11,67	15	25,0	10	16,67
Kalau ada wirid	31	51,67	4	6,67	5	8,33	5	8,33
Minimal satu kali seminggu	6	10,00	0	0	37	61,67	43	71,67

Sumber: Analisis Data Primer, 2003

#### 4.5.3 Frekuensi Membaca Alquran

Dari data tabel 49 tampak bahwa di keempat daerah lokus penelitian ditemukan responden yang tidak pernah membaca Alquran dalam dua bulan terakhir. Sama halnya dengan frekuensi ibadah Shalat berjamaah di Mesjid, jumlah terbanyak responden yang tidak pernah

membaca Alquran terdapat di Tiku V Jorong, berikut di Tigo Koto Silungkang, Padang Luar, dan Balai Gurah. Masing-masing sebanyak, 40 perse, 33,33 persen, 26,67 persen, dan 11,67 persen.

**Tabel 49 Aktivitas Ibadah Mengaji Yang Dilakukan Responden Dalam Dua Bulan Terakhir**

Frekuensi Membaca Alquran	Tigo Koto Silungkang		Tiku V Jorong		Padang Luar		Balai Gurah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak ada	20	33,33	24	40,00	16	26,67	7	11,67
1 kali dua minggu/lebih	15	25,00	17	28,33	16	26,67	22	36,67
Minimal satu kali seminggu	25	41,67	19	31,67	25	41,67	28	46,67

*Sumber: Analisis Data Primer, 2003*

Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh responden, khususnya yang tidak melaksanakan shalat wajib, seperti di nagari Tigo Koto Silungkang responden pertama, yang mempunyai anak tujuh orang, semuanya masih usia SD, menyatakan karena sebahagian besar waktunya habis untuk kegiatan pencaharian nafkah, bertani. Hal senada juga diungkapkan oleh responden yang bekerja sebagai buruh di pasar Padang Luar bahwa, mereka tidak shalat lantaran waktunya habis untuk pekerjaan. Sementara responden berikutnya di Tigo Koto Silungkang menyatakan karena sama sekali tidak tahu pelaksanaan ibadah shalat. Seperti penuturannya di bawah ini,

...“ha ha ha.....mangaji? baa ka mangaji, ka sumbayang, den miang ndak tantu mambaconodoh, tapi tiok rayo lai jo den sumbayang ka Musajik Lambah. Sakali-sakalino baa lo ndak kapai puloh.... Cucudentu ndaklodoh (sambil menunjuk cucunya yang sedang berjalan ke arah sawah membawa sabit)” .

Dilihat dari rumah yang ditempati, dan tampilan (pakaian) responden, dan anggota rumah tangganya saat wawancara berlangsung, responden secara materi tidak tergolong miskin. Mereka hanya miskin rohani atau miskin mental spritual, seperti pendidikan yang rendah, tidak bisa tulis baca. Kemiskinan tersebut juga tersosialisasi kepada anak dan cucu mereka yang juga tidak bisa tulis baca, dan tidak bersekolah.

Di Tiku V Jorong, responden tidak shalat bukan karena ketiadaan waktu ataupun karena sibuk oleh pekerjaan mencari nafkah, melainkan karena kefrustrasian menghadapi beban hidup yang sangat berat. Sebagaimana dituturkan *“mamikiaan iduikselah pusiang wak dek-eba kasumbayang”*.

Di daerah ini wawancara juga diarahkan kepada ibadah Shalat Berjamaah di Mesjid. Dari beberapa orang responden yang diwawancarai terungkap bahwa, Mesjid jarang sekali digunakan untuk shalat berjamaah, kecuali pada hari Jumat. Sementara responden lainnya, di lokasi Mesjid yang berbeda mengatakan bahwa perilaku “Imam” sehari-hari tidak dapat dijadikan suri tauladan.

Menyikapi temuan sehubungan dengan kegiatan keagamaan di lokus penelitian, terutama di nagari dengan tipikal daerah nelayan, dan tipikal pertanian tradisional, sudah harus disadari bersama bahwa pengamalan Aqidah, termasuk nilai-nilai adat, sedang mengalami degradasi. Keberadaan lembaga kemasyarakatan lokal di nagari perlu dikembangkan dan ditingkatkan perannya untuk keberdayaan umat dalam pengamalan nilai-nilai Agama, dan Adat. Temuan ini juga dapat menjadi catatan khususnya bagi MUI Sumatera Barat untuk mengaktualisasikan kembali nilai dasar filosofi masyarakat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” dalam kehidupan nyata. Sehingga filosofi itu tidak hanya menjadi slogan semata. Walaupun secara formal pemerintah telah mencanangkan gerakan kembali ke Surau seiring dengan kembali ke nagari, dan wajib belajar baca tulis Alquran bagi anak usia sekolah dasar.



## BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Sepanjang penelitian tentang Profil Perempuan Sumatera Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Jumlah perempuan di tiga kabupaten kota daerah penelitian lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Kenyataan ini berangkat dari besaran angka *sex ratio* di kota Padang sebesar 97,2, di Padang Pariaman sebesar 92, dan di kabupaten Agam 92,1. Meskipun demikian pada umur-umur tertentu juga terdapat jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terutama pada kelompok umur muda.
2. Berdasarkan struktur umur, penduduk di tiga kabupaten kota termasuk ke dalam struktur umur muda, beban ketergantungan yang termasuk besar terdapat di Padang Pariaman, dan kabupaten Agam. Di Padang Pariaman setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 74 orang yang tidak produktif, dan di Agam sebanyak 63 orang. Sementara di Padang tiap 100 orang produktif menanggung beban tidak produktif yang lebih sedikit yaitu sebanyak 51 orang.
3. Angka penyerapan tenaga kerja yang dominan dan relatif berimbang di ketiga lokasi penelitian dilihat dari lapangan kerja yang ada adalah di sektor jasa. Bila dicermati penyerapan tenaga kerja perwilayah, maka di Padang sektor jasa memberikan kontribusi yang terbesar. Sedangkan Padang Pariaman dan Agam adalah pertanian. Sementara itu dari data pencari kerja tercatat jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan yang mencari kerja untuk Padang dan Pariaman, kecuali Agam. Demikian juga halnya berdasarkan analisis data di nagari lokasi penelitian, bahwa perempuan menjadi pihak yang turut berkontribusi bagi peningkatan ekonomi keluarga, sehingga mereka menanggung beban kerja ganda. Artinya dari segi konsep kerja, mereka tidak hanya dituntut menjalani aktifitas dalam kegiatan reproduktif melainkan juga di

kegiatan produktif. Bahkan bagi perempuan yang menyatakan bahwa kegiatan utamanya adalah di rumah tangga (reproduktif), pada waktu-waktu tertentu juga ikut terlibat dalam kegiatan pertanian (produktif), khususnya di daerah tipikal pertanian tradisional. Hal ini terjadi karena adanya pembagian peran berdasarkan konstruksi gender.

4. Tindak kejahatan yang terjadi di tiga kabupaten kota, menunjukkan kerentanan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Kuantitas jenis tindak kejahatan terbesar adalah kekerasan/penganiaya, perkosaan serta pencabulan. Hal yang tragis dari sisi ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa anak-anak pun turut sebagai pelaku tindak kejahatan pencabulan.
5. Tingkat pendidikan perempuan di kabupaten kota relatif cukup baik, terutama dilihat dari jumlah perempuan yang memiliki ijazah sudah lebih banyak dibanding perempuan yang tidak memiliki ijazah. Kondisi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berkiperah di sektor publik, tidak hanya domestik seperti paradigma yang berlaku selama ini. Hanya saja perempuan maupun laki-laki yang berijazah terkonsentrasi pada pendidikan menengah. Selain itu, perempuan putus sekolah, dan yang tidak bisa baca tulis juga lebih besar dari laki-laki. Jumlah terbanyak, dari ketiga kabupaten kota, terdapat di kabupaten Agam. Persoalan yang hampir sama juga terdapat di nagari lokasi penelitian, responden yang tidak tamat Sekolah Dasar ditemukan dalam jumlah yang agak besar, bahkan di nagari pertanian tradisional hampir separoh responden yang ada tidak tamat Sekolah Dasar. Selain itu, di keempat nagari lokasi penelitian juga terdapat anak-anak responden yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, jumlah yang juga cukup besar terdapat di nagari tipe pertanian tradisional, dan nagari tipe nelayan.
6. Kasus perceraian yang terjadi memberi gambaran bahwa proporsi cerai gugat lebih besar daripada cerai talak. Di sini terdapat indikasi bahwa perempuan memiliki "keberanian" dalam menentukan sikap

serta menghadapi segala konsekuensi yang timbul dari sikap yang diambilnya itu. Berdasarkan kelompok umur, perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, dominan pada kelompok umur 26-35 tahun. Pada kelompok umur yang lebih muda (16-25) maupun pada kelompok umur tua (55+) juga terjadi perceraian, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Sedangkan pekerjaan perempuan bercerai dominan ibu rumah tangga. Implikasi dari perceraian yang terjadi adalah beban ekonomi perempuan akan semakin berat, karena setelah bercerai biasanya anak ikut ibunya, apalagi bila tanggung jawab seorang ayah terputus terhadap anaknya. Fenomena lain yang terungkap dari kasus cerai ini bahwa, salah satu sebab perempuan mengajukan gugat cerai adalah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dengan alasan pembuktian, dan prosedural yang relatif rumit, dalam proses peradilan argumentasi tersebut tidak dimunculkan.

7. Rata-rata anak yang dimiliki oleh seorang perempuan di tingkat kabupaten kota meningkat seiring dengan peningkatan umur. Artinya paritas yang dimiliki oleh perempuan setelah habis masa reproduksinya termasuk besar, rata-rata 5 orang per perempuan. Namun dalam analisis ini, fertilitas di kabupaten kota dari karakteristik lain tidak dapat dikemukakan, karena pada data publikasi BPS hasil sensus tahun 2000 tidak dilengkapi karakteristik lainnya.
8. Jumlah anak lahir hidup yang dimiliki responden di nagari cukup bervariasi, dari yang tidak mempunyai anak sampai yang memiliki anak lahir hidup sebanyak 13 orang. Tetapi pada umumnya responden juga memiliki anak lahir hidup dalam jumlah yang besar, sekalipun pada nagari tipikal pertanian komersial, dan industri rumah tangga dengan aksesibilitas daerah yang lebih baik. Dilihat dari rata-rata anak lahir hidup setelah habis masa reproduksinya, sama halnya dengan yang ditemukan di kabupaten kota, juga termasuk besar untuk keempat nagari lokasi penelitian. Sedangkan dari usia kali pertama kawin memberi pembenaran bahwa perempuan yang kawin pada usia

muda mempunyai rata-rata anak lahir hidup lebih banyak dibanding yang kawin pada umur yang lebih tua (matang). Sementara dilihat dari pekerjaannya, perempuan bertani termasuk buruh tani, cenderung mempunyai rata-rata anak lebih besar. Sedangkan dilihat dari pendidikan perempuan, rata-rata anak yang dilahirkan bervariasi per jenjang pendidikan.

9. Partisipasi PUS khususnya perempuan dalam KB di kabupaten kota sudah cukup tinggi, meskipun demikian dari data rata-rata anak lahir hidup setelah habis masa reproduksinya menunjukkan jumlah yang besar. Sehubungan dengan data sekunder tentang partisipasi KB dan rata-rata jumlah anak ini, perlu dipertanyakan kenapa terdapat ketimpangan seperti itu. Selanjutnya bila dilihat partisipasi suami dalam KB di kabupaten kota secara keseluruhan sangat rendah sekali. Agak berbeda dengan temuan di kabupaten kota, partisipasi responden (perempuan) dalam KB di nagari masih rendah untuk keempat nagari. Diantara alasan yang dikemukakan responden adalah tidak diizinkan suami, meskipun responden punya keinginan yang besar untuk ikut KB. Sedangkan dari persepsi laki-laki di nagari, laki-laki ber-KB dianggap tidak lumrah. Realita ini menunjukkan masih tingginya nilai *patriakhis* yang membelenggu kehidupan perempuan termasuk untuk tubuhnya sendiri.
10. Kasus abortus, bayi mati, dan kematian anak ditemukan di setiap nagari dengan tipikal dan aksesibilitas daerah yang berbeda. Dari hasil wawancara terungkap bahwa diantara perempuan yang mempunyai anak lahir mati adalah perempuan yang frekuensi melahirkannya lebih sering. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu indikasi masih rendahnya kualitas kesehatan perempuan.
11. Tingginya paritas yang dimiliki perempuan, rendahnya partisipasi PUS, khususnya laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi, dan sebaran rata-rata anak lahir hidup terutama dilihat dari umur kali pertama kawin di tingkat nagari, mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran

masyarakat terhadap kesehatan khususnya kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Kesehatan reproduksi lebih merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk pada saat keluarga mau ber-KB secara otomatis perempuanlah yang ikut KB. Persoalan ini diperparah oleh masih rendahnya pelayanan kesehatan yang diberikan, termasuk sarana dan akses terhadap pusat-pusat pelayanan.

12. Intensitas mobilitas perempuan ke pasar antar nagari yang tinggi adalah di nagari tipikal pertanian tradisional, dan nagari tipikal industri rumah tangga. Sementara di nagari tipikal daerah pesisir, mobilitas perempuan ke pasar antar nagari tetap rendah, sekalipun tidak ada pasar nagari, karena minimnya sarana transportasi yang tersedia, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan di tipikal daerah pertanian dengan aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas ke pasar antar nagari juga rendah. Tingginya mobilitas ke pasar antar nagari lebih disebabkan ketidakterediaan pasar di nagari tersebut, dan kalupun ada barang-barang yang ditawarkan tidak lengkap. Selain itu juga dipengaruhi oleh aksesibilitas daerah.
13. Sebaliknya mobilitas perempuan ke kota kabupaten, kota propinsi, dan ke luar propinsi sangat rendah untuk semua tipe daerah. Kecuali mobilitas ke kota lainnya (kota terdekat) pada daerah tipikal tertentu termasuk tinggi terutama yang aksesibilitas daerahnya juga baik. Rendahnya mobilitas non permanen perempuan menjadi kendala yang sangat menentukan bagi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, baik secara sosial maupun bagi peningkatan kualitas dirinya sendiri.
14. Kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan dan keluarganya, serta rendahnya kapasitas intelektual dan pengetahuan agama menjadikan mereka tidak punya kesungguhan dalam menjalankan kehidupan keagamaan secara baik, demikian juga anak-anak mereka.
15. Dilema kehidupan masyarakat yang sangat komplit di tingkat nagari terjadi di Tiku V Jorong dengan tipikal daerah pesisir, baik dalam

kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan, transportasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan.

## 5.2 Rekomendasi dan *Action Plan*

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat direkomendasikan beberapa hal dalam bentuk kebijakan dan penelitian lanjutan.

### ***Rekomendasi pertama***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih cenderung mengalami bentuk ketidakadilan berupa beban kerja ganda, kekerasan, stereotip, dan subordinasi, sebagai akibat konstruksi sosial di dalam masyarakat (gender). Mensikapi hal ini Biro PP Propinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* pemberdayaan perempuan perlu berkoordinasi dengan DIKNAS, DEPAG, MUI, LKAAM, Dinas Kesehatan, BKKBN, PSW di Perguruan Tinggi, dalam upaya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.

### ***Action Plan***

DIKNAS perlu mengupayakan terintegrasinya prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam kurikulum maupun dalam proses pembelajaran mulai dari TK sampai sekolah menengah. Dalam konteks ini, DIKNAS harus menjadikan guru sebagai khalayak sasaran strategis.

DEPAG, dalam hal ini BP4 bekerjasama dengan lembaga pendidikan, psikolog, seksolog, praktisi hukum untuk menyusun program pendidikan pranikah yang komprehensif bagi calon pengantin dalam kemasan *short course*. BP4 juga diharapkan dapat mensosialisasikan dan memantapkan perjanjian bagi pasangan yang akan menikah. Disamping itu, perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan sensitivitas gender hakim pengadilan agama, dan KUA.

MUI diharapkan berperan untuk membekali para ulama, dan mubalig untuk mensosialisasikan konstruksi kepemimpinan, dan posisi perempuan dalam berbagai bidang. Disamping itu, perlu kajian yang kontekstual tentang perempuan dalam perspektif islam.

LKAAM bersama pemangku adat perlu melakukan reevaluasi posisi perempuan dalam budaya Minangkabau, karena dalam realitasnya posisi perempuan sebagai bundo kanduang lebih bermakna simbolik.

Dinas Kesehatan, BKKBN perlu melakukan, meningkatkan sosialisasi KB, dan kesehatan reproduksi bagi laki-laki, mengingat masih tingginya nilai *patriakhis* yang membelenggu kehidupan perempuan termasuk terhadap dirinya sendiri. Selain itu, lembaga/intansi ini juga perlu meningkatkan sensitivitas gender petugas kesehatan.

PSW yang ada di Perguruan Tinggi perlu proaktif melakukan kajian yang mendalam, dan evaluasi terhadap program sosialisasi kesetaraan, dan keadilan gender, seperti materi, metoda, dan media sosialisasi yang digunakan. Sehingga ditemukan model sosialisasi yang efektif guna tercapainya pemahaman yang tepat terhadap kesetaraan gender. PSW juga perlu meningkatkan tawaran program sosialisasi melalui Lembaga pengabdian pada Masyarakat yang ada di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Biro pemberdayaan Perempuan propinsi maupun kabupaten kota perlu meningkatkan penyebarluasan informasi tentang kesetaraan, dan keadilan gender melalui *talk show*, dan *bill board*. Penyebarluasan informasi ini dapat juga dilakukan melalui kompetisi karya seni, sastra, dan budaya serta simulasi yang bernuansa gender.

### ***Rekomendasi kedua***

Sejauh ini persoalan ketidaksetaraan, dan ketidakadilan terhadap perempuan masih banyak bersumber dari kebijakan yang belum sensitif gender. Untuk itu perlu upaya peningkatan penyusunan berbagai kebijakan, hukum, dan aturan yang lebih sensitif gender. Dalam hal ini oleh pemerintah, DPRD, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan DIKNAS.

### ***Action Plan***

DPRD bersama pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota perlu merealisasikan APBD yang berspektif gender. Sehingga dengan dukungan dana yang memadai pada bidang-bidang yang banyak terkait dengan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor informal akan dapat meningkatkan kesejahteraan, dan eksistensi perempuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam setiap Perda yang akan dibuat, DPRD harus mempertimbangkan konsepsi kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan memposisikan perempuan sebagai salah satu *Agenda Setter* dalam proses penyusunan Rancangan Perda.

Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) hendaknya dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak mengupayakan kebijakan yang berpihak kepada korban. Hal ini didasarkan atas realitas ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan, dan anak terutama dalam kasus perkosaan yang kurang mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban. Demikian juga dalam proses penyidikan, dan peradilan, korban cenderung dijadikan pihak yang disudutkan. Sehubungan dengan komplitnya permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak,



diharapkan LSM pemerhati perempuan perlu meningkatkan upaya advokasi bagi korban.

Pihak pengadilan agama dalam menetapkan putusan perceraian harus mengeksplicitkan kewajiban material maupun spritual seorang Bapak, dan Ibu terhadap anaknya, beserta sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Selain itu, pengadilan agama juga perlu menetapkan aturan tentang Surat Izin Cerai dan Pembagian Gaji bagi pasangan yang suaminya bekerja tetap dari instansi tempat mereka bekerja. Sedangkan bagi pasangan yang suaminya tidak bekerja tetap.

Dinas Kesehatan dan BKKBN perlu merevitalisasi pelaksanaan program KB di nagari terutama dalam peningkatan kualitas layanan serta mebangun kemauan untuk memberikan kejelasan memilih alat kontrasepsi yang cocok serta efek sampingnya. Disamping itu, institusi ini perlu selektif dalam rekrutmen kader kesehatan di nagari dengan mempertimbangkan kemampuan intelektual calon kader.

Dinas Pendidikan perlu melakukan kajian untuk memformulasikan model pendidikan informal yang efektif untuk mengembangkan potensi perempuan yang putus sekolah terutama dalam mengasah wawasan dan keterampilan hidupnya.

Pemerintah kabupaten Agam, harus memberikan perhatian khusus terhadap nagari Tiku V Jorong terutama untuk memperbaiki serta meningkatkan sarana transportsai dan komunikasi yang akan berimplikasi terhadap pengembangan diri masyarakat pesisir yang secara sosial budaya relatif terpinggirkan

Dinas Pertanian Agam melalui PPL dapat berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Nagari membina masyarakat, khususnya perempuan,

untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan atau lingkungan tempat tinggal mereka untuk usaha produktif. Diharapkan PKK kecamatan untuk dapat membina dan memfungsikan PKK, dan kelompok perpuluhan (Dasawisma) nagari.

Pemerintah nagari beserta segenap komponen masyarakat harus mengupayakan implementasi nyata dari gerakan kembali ke nagari dan kembali ke surau dengan menganggarkan dana bagi pencapaian tujuan tersebut serta memfokuskan pembangunan bidang keagamaan pada aspek Sumber Daya Manusianya melalui pelatihan kader mubalig, dan menggiatkan majelis taklim. Dalam konteks ini, DEPAG juga perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif bagi guru TPA/TPSA.

#### ***Rekomendasi Ketiga***

Tidak ada atau terbatasnya data menyangkut aspek kependudukan yang terdapat di nagari, baik yang ditemukan dari penelitian ini maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti, BPS perlu melakukan reorganisasi pengumpulan data dalam bentuk sensus maupun survai. Sehingga nagari memiliki data, dan nagari dapat melakukan pembaharuan data setiap tahunnya dengan sistem registrasi penduduk. Disamping itu dalam upaya penyebarluasan data dan informasi yang ada, diperlukan keterbukaan berbagai institusi bagi peneliti dalam mengakses data yang dimiliki, sehingga berkontribusi bagi perencanaan pembangunan.

#### ***Action Plan***

BPS perlu melakukan reorganisasi dengan menempatkan stafnya di nagari sebagai penanggung jawab tersedianya *data base* nagari.

BPS perlu melatih staf pemerintah nagari untuk terampil dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

BPS perlu melibatkan pemerintah ataupun lembaga yang ada di nagari dalam melakukan sensus ataupun survai.

BPS maupun institusi lainnya perlu responsif terhadap upaya pengaksesan data oleh peneliti.

#### ***Rekomendasi Keempat Tentang Penelitian Lanjutan***

Penelitian ini tidak mengungkapkan mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan domestik terjadi serta mengapa perempuan enggan mengungkapkannya. Selain itu perlu diungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan perkosaan dan pencabulan, terutama dilihat dari pengaruh pornografi dan porno aksi.

Implikasi rendahnya mobilitas non permanen perempuan terhadap aktualisasi dirinya sehingga diperoleh data guna membuat kebijakan strategis bagi pemberdayaan perempuan. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB perlu ditelusuri lebih jauh dengan meneliti bagaimana persepsi laki-laki terhadap pemakaian alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi perempuan.

Untuk mengungkapkan kecenderungan fertilitas dan mortalitas secara lebih dalam perlu diteliti dengan jangkauan responden yang lebih besar sekalipun penelitian telah menyinggung hal tersebut dari beberapa aspek dengan responden yang sangat terbatas.

Munculnya keengganan dan ketakutan perempuan terhadap risiko pemakaian alat kontrasepsi perlu diteliti terutama dalam kaitannya dengan bentuk dan kualitas pelayanan yang diberikan dalam KB dan kesehatan reproduksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. Penelitian Gender dalam Ilmu Sosial: *Makalah* disampaikan LUSTRUM II FISIP Universitas Andalas, Padang Tanggal 23 Januari 2003 di FISIP Universitas Andalas.
- Alwasilah, A Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Anonim. (tt). *Panduan Pelatihan Regional Pengarusutamaan Jender di Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan*. Jakarta: Kerjasama Meneg PP, United Nations Population, dan BKKBN.
- Anonim. 2002. *Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000*. Jakarta: BPS; Kementrian Negaran Pemberdayaan Perempuan.
- Anonim. 2002. *Profil Kesehatan Kabupaten Agam tahun 2002*. Lubuk Basung: Dinas Kesehatan
- Anonim. 2002. *Profil Kesehatan Kota Padang*. Padang: Dinas Kesehatan
- Anonim. 2002. *Profil kesehatan Kabupaten Padang Pariaman*. Pariaman: Dinas Kesehatan
- Anonim. 2003. *Master Plan Prasarana dan Sarana Kesehatan Seta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman*. Pariaman: Dinas Kesehatan
- Anonim. *Karakteristik Penduduk Padang Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Padang: BPS Propinsi Sumatera Barat
- Anonim. *Karakteristik Penduduk Padang Pariaman Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Padang: BPS Propinsi Sumatera Barat
- Anonim. *Karakteristik Penduduk Agam Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Padang: BPS Propinsi Sumatera Barat
- Anonim. 2003. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kota Padang Tahun 2002*. Padang: BKKBN
- Anonim. 2003. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2002*. Pariaman: BKKBN
- Anonim. 2003. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten Agam Tahun 2002*. Lubuk Basung: BKKBN
- Brannen, Julia. 1983. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Avebury: Thomas Coran Research Unit Institute of Education.
- Chotib, Ananta Aris. 1996. Analisis Mobilitas Penduduk: Subyek penting yang Belum Banyak Tergarap; dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta: Kantor menteri Negara kependudukan/BKKBN dan lembaga Demografi, fakultas ekonomi, Universitas Indonesia.
- Ediastuti, Endang; Faturachman. 1995. *Fertilitas dan aktivitas Perempuan di Pedesaan*. Yogyakarta: PPK-UGM
- Effendi, Tadjudin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fatmariza; Yurni Suasti; Suryanef; Maria montesori; Indrati; Avriva Khaidir; Ikhwan. 2002. *Laporan penelitian Kajian Pengembangan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Nagari*. Padang: Balitbang kerjasama dengan LP-UNP Padang.
- Gulardi, Sri Tresnaningias. 199. "Perubahan Nilai di Kalangan Perempuan yang Bercerai" dalam Ihromi. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 166-191
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromi, T.O. 1999. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Irawan dan M. Suparmoko. 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:BPFE
- Isnarmi dan Yurni Suasti. 2002. *Laporan Penelitian Media Massa dan Keadilan Gender Analisis Isi dan Artikel Koran Lokal Sumatera Barat*. Padang: FIS-UNP Padang.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 135-165
- Krishnan, P. 1975. "Mortality Decline in India, 1951-1961: Development Versus Public Health Program Hypothesis", *Social Science and Medicine*, 9:475-479
- Mantra, Ida Bagus. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Mantra, Ida Bagus. 1995/1996. *Demografi Umum*. Yogyakarta: S2 .Studi Kependudukan Program Pasca Sarjana UGM.
- Nadia, F. Ita. 1998. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender" dalam Natalie Kollman. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation
- Nurdin, Harto. 1981. *Struktur dan Persebaran Penduduk; Dalam Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E.Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif Untuk penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP&PP Fakultas Psikologi UI.
- Sadli, Saparinah. 1996. *Perspektif Perempuan dalam Kajian Penelitian Sosial*. Jakarta: Kajian Wanita UI
- Sudjana. H.D. 2000. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah production.
- Suasti, Yurni; Fatamariza; Isnarmi. 2000. *Laporan Penelitian Kondisi Perkembangan Usaha pekerja Perempuan pada Industri Bordir Rumah Tangga di Desa naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara*. Padang: FIS-UNP Padang.
- Tukiran. 1997. Analisis Fertilitas di Indonesia dari data Sekunder: disampaikan pada *Pelatihan Peningkatan kemampuan Penelitian dan Analisis Data Bagi Staf Biro Pusat statistik di Yogyakarta*, 20 Oktober- 1 November 1997. 1-19.

Buku Register Perceraian Kota Padang Tahun 2001, 2003  
Buku Register Perceraian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2001,  
2003  
Buku Register Perceraian Agam Tahun 2001, 2003  
Buku Register Kejahatan di Kota Padang Tahun 2001, 2002  
Buku Register Kejahatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2001,  
2002  
Buku Register Kejahatan Kabupaten Agam Tahun 2001, 2002